Justisia

Jurnal Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan

Teo eko logi

ISSN : 1410-1785

Edisi: 50 Th XXIV 2019

JUSTISIA
UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN

IJIN TERBIT
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
No. 01/B-1 WS/III/1993
ISSN 1410-1785
Jurnal Edisi 48
Th. XXXIII /2017

Alamat Redaksi:
Gedung Student Center
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Lantai 1
Jl. Raya Prof. Hamka KM.2
Ngaliyan, Semarang 50185
Telp. (024) 7601291
Fax. (024) 7410126
Email: Justisia.pers@gmail.com

DAFTAR ISI

Redaksi menerima naskah 7-8 halaman, spasi 1, diutamakan dalam bentuk *rtf. Naskah disertai foto dan bagi yang dimuat akan mendapatkan imbalah sepantasnya. Redaksi berhak mengedit naskah tanpa mengubah subtansinya. Masing-masing tulisan merupakan tanggungjawab penuh penulis.

REDAKSI

Ide pemilihan tema teoekologi dalam Jurnal Justisia edisi 51 ini timbul dari obrolan-obrolan ringan para redaktur beberapa waktu lalu di *basecamp* Justisia yang kemudian diperdalam kembali di angkringan-angkringan kopi beberapa waktu lalu. Saat itu kami menunaikan sholat jum'at di salah satu masjid dekat basecamp Justisia. Khotib selaku pengkhutbah menuturkan akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan berdasarkan tuntun agama. Mendengar dan memahami isi ceramah tersebut membuat kami penasaran. Sesampai jum'ata selesai beberapa saat kemudian salah satu dari kami berkata "Aku tertarik sama khutbah tadi. Jadi penasaran gimana ya konsep agama-agama dalam menjaga dan merawat lingkungan?". Terlebih lagi saat itu sedang tenar-tenarnya film "Sexy Killer" karya Watchdoc diputar di mana-mana untuk menyuarakan menjaga dan merawat lingkungan yang baik. Bermula dari pertanyaan itu, kami semakin terhanyut dalam pembahasan, dan memutuskan untuk membahasnya lebih serius dan selanjutnya disepakati menjadi tema jurnal.

Permasalahan lingkungan masih tergolong hanya gelintir peminat, bahkan lebih sering diabaikan oleh masyarakat Indonesia umumnya. Indonesia sendiri yang di dalamnya terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah dan ratusan bahkan ribuan kepercayaan dirasa mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Terutama Islam yang dalam hal ini menjadi agama mayoritas di tanah air. Meski menjadi kelompok mayoritas, dalam lembaga pendidikan yang berbasiskan pesantren masih sedikit dijumpai untuk menjadikan pesantren berimprovisasi menuju lembaga yang menyuarakan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan.

Hal di atas adalah sekelumit opini redaktur yang mendasari salah satu penelitian yang ada di jurnal ini. selain riset tentang pesantren ramah lingkungan yang berada di wilayah Semarang, masih ada beberapa penelitian lain yang cukup menarik, salah satunya adalah riset terhadap "Front Nahdliyyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)" kelompok ini getol terhadap isu-

isu lingkungan. Selanjutnya ada yang membahas tentang pandangan beberapa agama dalam menyikapi lingkungan sekitar. Pada artikel utama salah satu redaktur ada yang membahas tentang pandangan gerakan feminisme dalam memandang alam. Hal ini kurang banyak didengar. Padahal perempuan adalah salah satu rantai terpenting dalam menjaga kelestarian alam. Selain artikel yang ditulis oleh redaksi dalam, ada pula tulisan dari redaktur luar yang tidak kalah menarik untuk dibaca.

Dalam membicarakan cara pandang terhadap isu dalam tema ini, para redaktur sebagian besar menggunakan pendekatan fenomologi dan post-modernisme, Keputusan untuk menggunakan multi paradigma dalam jurnal kali ini bertujuan agar sedapat mungkin memahami dan mengungkapkan teoekologi dari berbagai sudut pandang. Semoga Jurnal Justisia edisi kali ini menjadi sebuah bahan refleksi kita untuk bersikap kritis dan lebih berempati terhadap menjaga dan melestarikan lingkungan. Redaksi mengucapkan, Selamat membaca!

Mukhammad Ainul Yaqin

Pimred Jurnal



Ekopesantren

Oleh: Mufti Muadib

Identifikasi Paradigma Epistimologi Ekopesantren

Pesantren menjadikan model pendidikan yang khas di Indonesia. Hal ini menjadikan nilai sosial kemasyarakatan yang lebih untuk identitas muslim di Indonesia khususnya yang wajib dipertahankan. Sebagai negara yang mayoritas muslim sebagian besar dari mereka memami keberadaan pesantren yang lahir dari masyarakat mereka sendiri. Menjadikan pesantren mampu menggerakan dalam upaya melakukan gerakan yang terlibat langsung dengan permasalahan lingkungan dimana pesantren tersebut berada.

Pemilihan pesantren sebagai tempat berangkat untuk turut serta banyak berkontribusi dalam persoalan lingkungan tentu sangat strategiss. Pesantren telah membentuk identitas dan ikatan masyarakat yang kuat. Pesantren memiliki dua posisi penting secara eksistentisnya. Pertama, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang original lahir dari cita-cita membertahankan kultur kebudayaan masyarakat. Kedua, pesantren sebagai tempat pemberdayaan masyarakat. Pembaerdayaan ini bisa dilihat bahwa pesantren secara aktif dan solutif untuk menjadi identitas masyarakat dalam membentuk gerakan masyarakat yang peduli terhadap konservasi lingkungan.

Houben (2003) menjelaskan bahwa Islam sendiri sebagai sebuah agama tidak berkutat pada persoalan teologis saja, melainkan mampu menjangkau hingga menjad petunjuk cara berkehidupan (*way of life*) hingga persoalan praktis para pemeluknya. Kondisi ini menjadi dasar kenapa pesantren kemudian melakukan terobosan keluar dari pemahaman umum yang hanya fokus dala pendidikan saja, namun juga pendidikan secara sosial.

Eksistensi pesantren sendiri melalui perdebatan dinamika yang cukup panjang. Bagaimana Ki Hadjar Dewantara dengan Sultan Takdir Ali Syahbana saling kritik. Takdir menyebutkan Ki Hadjar dan bebebrapa inteltual lain yang

menyerukan penguatana pendidikan khas pesantren, akan tetapi Taqdir justru beranggapan bahwa seruan itu lebih mendorong pada anti intelektualisme, individualisme, egoisme, dan metrialisme. Presmis ini berangkat dari budaya pesantren yang menurutnya sangat kolot dan terpaku pada wilayah keagamaan saja serta kedudukan kiai yang sangat tinggi sehingga tidak menimbulkan semangat modernisasi yang diagungkan oleh Takdir (Pengantar Dawam Rahadjo dalam buku Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah).

Pendekatan lingkungan melalui keyakinan merupakan salah satu bagian penting dalam mainstream penyelamatan keanekaragaman hayati, pelindungi kawasan konservasi juga aksi terhadap perubahan iklim (WWF & ARC 2006; ARC & UNDP; Palmer & VInaly 2005).

Pendekatan melalui agama (keyakinan) dapat menyokong pilar yang mendorong pada kunci pembangunan berkelanjutan *economically* (*available*), *ecogically* (*viable*) dan *socially* (*acceptable*) dan *spiritually* (*respectable*).

Pesantren dapat berkontribusi besar dalam memberikan sumbangan pada model pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan *education for sustainable development* (ESD).

Dalam menyusun desain program ekopesantren yang mencakup bagaimana prosesnya yang dilandasi kerangka pembangunan berkelanjutan yang memiliki beberapa dimensi; sosial, ekonomi, ekologi, spiritual (kelembagaan). Sehingga pesantren mampu berkontribusi dalam membantu perkembangan Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dengan berbagai prosesnya.

Pertama, menganalisis keterkaitan kesadaran konservasi dan lingkungan elalui pendekatan agama Islam (*Islamic environmentalism*).

Kedua, menganalisis ketangguhan kelembagaan dan program lingkungan di pesantren.

Ketiga, menganalisis tingkat kesadaran santri terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Keempat, menganalisis kebijakan yang terkait ESD dan ekopesantren.

Kelima, membuat formulasi dan desain program untuk pesantren ramah lingkungan (ekpesantren)

Keenam, kiai dan ustadz mempunyai peran penting dalam mendorng terwujudnya ekopesantren.

Dalam tawaran ekopesantren diharapkan akan dengan mudah segera diterima dan terealisasi secara melus. Hal ini tidak terlepas dari tidak adanya resisten dalam kalangan ulama Islam (para pengasuh pondok pesantren) di Indonesia dalam membicarakan persoalan lingkungan. Hal ini tidak terlepas mereka semua telah menyaksikan secara jelas kerusakan yang begitu parah dan bencana yang terjadi karena kondisi alam yang kian rusak. Tindak lanjut dan kegiatan yang lebih luas yang melibatkan kalangan pesantren dan stakeholders disekitarnya harus mendapatkan perhatian.

Desain model ekopesantren ecara ideal merupakan bentuk institusi dan diiringi dengan program yang berbasis pada pemberdyaan masyarakat atau komunitas pesantren itu sendiri yang dalam kegiatanya harus mencakup keterlibatan banyak elemen pendukung. Pengasuh ponpes, sebagai lembaga tertinggi yang sangat dihormati dalam tradisi pesantren, yang bisa melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga dalam bidang terkait, semikal KLHK. Semua itu dapat di follow up dengan menggerakan kapasitas pesnatren dan mendorong menjadi sebuah program ekopesantren.

Salah satu bentuk kegiatan yang lebih kontekstual dan tranformatif tersebut dapat terlihat dari munculnya gerakan ekologis yang didorong oleh pesantren sehingga mampu mendorong masyarakat melakukan upaya perbaikan dan konservasi lingkungan. Bentuk konservasi lingkungan yang dilakukan beberapa pesantren di Indonesia setidaknya terlihat ada pada yang dilakukan oleh Ponpes Pabelan, Ponpes An-Nuqyah, Ponpes Maslakhul Huda, Ponpes Cipasung, Ponpes Darunnajah, dan bebrapa pesantren lainnya pada era 80an. Beberapa pesantren yang disebutkan didepan pernah mandapatkan pengharaan dari pemerintah berupa penghargaan Kalpataru sebagai apresiasi atas kepedulian mereka atas lingkungan.[1]

Kiai sebagai aspek materil kenusantaraan yang hilang

“Pesantren saya kira menjadi ujung tombak dalam hal penyemaian kehidupan yang lebih produktif terkait dengan pemeliharaan alam. Ketika

[1]Pentar ekologi IPB HLM 4

pemikiran itu sudah muncul dari pesantren akan segera bisa disosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya menjaga alam ini,,," KH Arja' Imoni

KH Arja' Imroni seorang ahli tafsir yang juga wakil katib 'am PWNU Jateng membenarkan bahwa memulai proses kesadaran melestarikan lingkungan harus dipersiapkan secara akar para digmanya. *Ulumul fiqh* yang sudah melekat dan menjadi ciri khas pesantren mejadi pegangan hidup dan pandangan kaum muslimn secara luas. Namun fiqh belum banyak menyentuh untuk secara tegas bersikap dalam persoalan kerusakan alam.

"Secara paradigmatik membicarakan persoalan ekopesantren itu harus dimulai dari kajian akademis harus dikuatkan. Dalam fiqh maupun ushul fiqh sendiri itu sudah ada kemauan yang cukup pesat dalam pemikiran persoalan kehidupan masyarakat. Tapi kemaslahatan yang dibicarakan di dalam ushul fiqh itu masih hanya pada *al-kulliyatul Khoms*,"[2]

Maqasid Syariah (tujuan Syariah) bersifat *dhoruri* artinya wajib adanya untuk kemaslahatan manusia. Namun perlu rerelevansi kembali karena *al-kulliyatul khoms* belum membicarakan atau memberikan porsi tersndiri dalam perlindungan terhadap alam (*khifdul biah*). Ijtihad fiqh karya ulama klasik bukan berarti tidak mampu menjawab persoalan namun perlu direlevansikan kembali (rerelevansi) dalam konteks permasalahan kehidupan hari ini.

Lingkungan terus menjadi isu penting dalam dinamika diskursus akademis. Maka perlu rekontruksi secara epistomologi yang akan berimplementasi dalam gerakan yang lebih *awareness* (kepedulian kepada lingkungan).

"Memelihara lingkungan menjadi sangat penting karena manusia bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Sehingga manusia hidup dari alam dan kembali ke alam, sehingga alam menjadi bagian diri manusia. Manusia sebagai mikrocosmos dan alam ini disebut sebagain makrokosmos. Artinya antara mikrocosmos dan makrocosmos harus selaras. Kerusakan makrokosmos juga akan mempengaruhi mikrokosmos,"

Membuat landasan kuat secara epistimologi dan sepiritual teologis dalam mendesain ekopesantren. Artinya bahwa manusia harus menyadari bahwa

[2]Wawancara dengan KH Arja' Imroni mantan sekretaris PWNU Jateng priode sebelumnya Kamis (3/1/19).

semua yang terjadi tidak terlepas dari tingkah laku manusia. Sehingga saat mengehatui bahwa lingkungan ini bagian dari amanat yang diberikan kepada manusia utuk dinikmati dan ditinggali, maka kita mempunyai kewajiban untuk memeliharanya.

Menurut korrdinator FNKSDA Nasional, Gus Roy Murtadho bahwa untuk kembali membut pesantren sebagai fungsi sosial yang menjawab problematika persoalan harus melihat bagaimana akar pesantren itu berangkat. Pesantren yang cederung lahir secara organik ditengah kultur masyarakat lokal memang mempunyai beberapa fungsi. Mereka para kiai yang mengajarkan ngaji kepada para santri, dan masyarakar serta berdakwah secara ikhlas mempunyai tujuan menyebarkan ilmu pengetahuan (*knowledge*) aspek emansipatif membebaskan berjuang membela rakyat, bukan membebaskan belenggu dirinya semata.

“Kita harus menggali akar pesantren, misalkan pesantren punya ciri khas agraris. Pesantren sendiri secara akar kata ‘pecangkrikan’ tempat orang mendalami kebijaksanaan hidup. Apa aspek materil dari pesantren, ada tanah, tempat mengolah sawah, selalu begitulah pesantren. Itu yang hilang, aspek meterialnya dan kesan historis orang pesantren. Teologi (di pesantren) sebagai penguat saja kesadaran tetang kehidupan itu apa,” [3]

Peran kiai sebagai sentral yang dihormati secara keilmuan maupun status keilmuannya berbeda dengan kepala sekolah. Kepala sekolah tidak punye preferensi untuk membela rakyatnya yang dilemahkan. Namun pesantren murni lahir secara organic, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, yang menggunakan tatakelola musyarokah.

Namun kini ada beberapa yang hilang dari peran seorang kiai pengasuh pondok pesantren maupun kiai di kampung-kampung. Dahulu hampir semua problematika masyarakat akan ditanyakan kepada kiai, agar dicarikan solusinya (hari bagus). Seperti seorang petani yang akan mulai menanami sawahnya, mereka akan menanyakan kepada kiai terlebih dahulu, selain untuk meminta dia berkah seorang kiai. Namun kini seakan ada peran orisinil yang hilang, katena mereka (kiai) hanya menjawab problemarika persoalan keagamaan saja.[4]

---

[3]Wawancara dengan koordinator FNKSDA Nasional, Gus Roy Murtadho, Minggu (6/1/19).

[4]Disarikan dari wawancara dengan Direktur Ekskutif Sajogyo Institute, Amir Mahmud, Minggu

Peran besar kiai kembali dibutuhkan keberpihakannya dalam problematika permasalahan saat ini. Hal ini karena tak lain adalah berkah dari kealiman seorang kiai yang secara spiritual sudah sangat dekat dengan Allah SWT, dan ini menjadikan aspek material kenusantaraan sekarang yang hilang.



(6/1/19)

Tanah Haram: Konsep Moral dan Pola Relasi Manusia dengan Lingkungan

Oleh : Hasan Ainul Yaqin

Abstrak

Allah telah menjadikan tanah haram sebagai daerah mulia di banding dengan daerah lain. Sholat di dalamnya lebih utama dibanding sholat di masjid atau di tempat lain. Ketika masuk di wilayah tersebut terdapat peraturan yang patut dipatuhi bagi siapapun. Tidak boleh melakukan perbuatan yang menodai kesucian tanah haram seperti penganiayaan terhadap sesama makhluk hidup baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Semuanya tidak boleh diganggu kehidupanya.

Larangan tersebut terdapat konsep moral yang patut disadari manusia. Hubungan manusia di tanah haram tersebut bukan hanya antar sesamanya tetapi dengan makhluk dan lingkungan harus berjalan baik.

***Keynote**: Tanah Haram, Moral, Manusia, dan Alam.*

Kondisi geografis di setiap daerah di muka bumi berbeda-beda antara tempat satu dengan lainnya. Perbedaan geografis itu kemudian mempengaruhi sikap dan perwatakan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan. Tidak heran bila perawakan manusia di daerah tertentu berbeda dengan manusia yang tinggal di daerah lain.

Hal ini membuktikan bahwa salah satu watak seseorang dibentuk oleh faktor yang melingkupinya, salah satunya

adalah lingkungan. Ada satu daerah yang oleh Allah sendiri ditetapkan sebagai daerah mulia yang belum pernah disematkan pada daerah lain. Dalam pengamatan sejarah Islam, tanah yang oleh Allah kultuskan sebagai daerah mulia itu disebut tanah haram.

Allah telah menjadikan masjidil haram sebagai tempat aman dan negeri yang damai dan tenang, baik bagi orang yang berdiam di sana ataupun yang sekedar lewat. Ia Baitullah yang menyamakan keseluruhan hambanya. Saat masuk ke tempat tersebut kedudukan manusia adalah sama. Tidak ada pengistimewaan antara manusia satu dengan yang lainnya.

Manhaj yang telah diatur Allah bagi manusia berkenaan dengan masjidil haram telah lebih dahulu daripada segala manusia untuk menjadikan wilayah ini sebagai tanah haram.[1] Sebenarnya kemuliaan tanah haram ini sudah dianggap suci sebelum Nabi Muhammad datang dengan Islam yang dibawanya ke kota Makkah.

Dahulu kala tanah haram dijadikan tempat berlindung bagi pengemban risalah dakwah apabila mereka mendapatkan kesulitan di tempat mereka menyampaikan dakwahnya. Seperti ditolak oleh penduduk setempat, mereka tidak mendapatkan tempat berlindung kecuali di tanah haram ini. Hal semacam ini pula yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ketika beliau mendapatkan hambatan ia memilih Makkah sebagai tempat untuk mencari perlindungan.[2]

Kemuliaan Tanah Haram

Kesempurnaan tanah haram dijelaskan di berbagai sumber Al Qur'an maupun Hadits, mengapa tanah haram dikatagorikan sebagai tempat paling mulia dibanding dengan daerah lain, yang mana daerah itu juga termasuk bagian kawasan Islam. Seperti dijelaskan dalam surah An-Naml (27:91)

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

---

[1] Sayyid Quthb. *Fi Zhilalil Qur'an*. Darusy – Syuruq, Beirut. 1992. hal. 113

[2] Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad Saw*. penerjemah : Muhammad Halabi Hamdi. Yogyakarta: Mardhiyah Press. 2007. hal. 63

Artinya: Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

Bahkan dalam Hadist Nabi pun beliau bersabda, bahwa orang yang melaksanakan ibadah sholat di masjidil haram lebih utama daripada seratus ribu sholat di masjid lainya. Artinya ada kemuliaan tersendiri yang melekat di tanah haram tersebut. Penulis kira kemuliaan yang tersirat di dalamnya menarik untuk dikaji mengapa tanah haram dikultuskan menjadi daerah yang mulia nan suci di banding dengan daerah lain.

Dalam penjelasan pada surah An-Naml yang telah disebutkan di atas mengacu pada makna kesucian. Artinya apabila manusia masuk ke kawasan tanah haram tersebut, haram baginya melakukan segala aktivitas yang dapat menodai kesucian tanah haram. Pelarangan bertindak itu sebagai bentuk penghormatan terhadap daerah yang oleh Allah ditetapakan dalam firmanya.

Quraish Shihab di dalam Tafsir Misbahnya berpendapat tanah haram yang ia maksud yaitu keadaan kota Makkah yang telah menjadi kesepakatan semua pihak dan diakui serta dikukuhkan oleh Islam. Sudah menjadi rahasia umum, jauh sebelum Nabi Muhammad hadir, masyarakat Arab telah sepakat untuk menjadikan daerah tersebut sebagai tanah yang aman, bebas penganiayaan, bahkan aman untuk semua kalangan yang berhimpun di sana. Bukan hanya manusia yang bebas dari penganiayaan, binatang dan tumbuhan yang berada dan tumbuh di sekitar tanah haram tersebut tidak boleh diganggu kehidupannya.[3]

Dalam buku Sejarah Islam karya Karen Amstrong dijelaskan, umat Islam melakukan ibadah ritual yang lazim di Ka'bah. Selama di Makkah dan di wilayah sekitarnya semua kekerasan di larang sepanjang waktu. Begitupun selama berhaji, jamaah dilarang membawa senjata, bersitegang, berburu, bahkan memukul serangga dan berkata kasar.[4]

Dari aturan tersebut tampaknya untuk memuliakan tanah haram yang oleh <u>Allah sendiri s</u>emua aktivitas yang menodai kesucian tanah tersebut dilarang.

[3]Quraish Shihab. *Tafsir Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Ciputan: Lentara Hati 2017. hal. 629

[4] Karen Armstrong. *Sejarah Islam, telaah ringkas – komprehensif perkembangan islam sepanjang zaman*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2014. hal. 56-57

Penghormatan terhadap daerah itu terdapat nilai moral yang perlu disadari bagi manusia untuk memandangnya lebih bijaksana selama berhaji.

Tatkala pulang dari ibadah haji kemudian sampai di rumah, kesadaran moral itu tetap dipertahankan yang pada akhirnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan di luar ibadah haji. Baik berkaitan dengan ibadah haji ataupun kehidupan selama di tanah haram tersebut. Ibadah haji bukan sebatas ibadah ritual semata, ada aspek sosial dan kemanusiaan yang tersimpan di balik perjalanan haji tersebut yang penulis ambil kesimpulan terkait hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan sekitar.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa adanya sifat saling menghormati antar sesama makhluk Tuhan. Bagaimanapun juga makhluk yang ada di muka bumi mempunyai hak yang sama seperti jenis hewan dan tumbuhan seperti layaknya manusia. Hanya saja makhluk selain manusia itu pembicaraannya tidak bisa difahami oleh manusia dan tidak bisa menuntut haknya apabila hak mereka dilanggar. Hak yang sama dalam ayat ini melekat pada semua makhluk. Karena mereka mempunyai hak untuk tidak diganggu kehidupanya.

Karena mereka tidak bisa menggugat layaknya manusia, makhluk hidup tersebut membutuhkan perlindungan dari diri manusia sebagai kholifah di muka bumi yang mempunyai tugas untuk memakmurkan alam dan memberikan pengawasan keamanan kepada makhluk lain. Dilarangnya melakukan penganiayaan terhadap sesama makhluk di tanah haram ini bisa dijadikan refleksi bahan penghayatan di saat keluar dari tanah haram.

Sehingga manusia yang termasuk bagian makhluk paling dominan atas teritorial yang dipijaknya, ketika hendak melakukan aktivitas di luar tanah haram harus mempertimbangkan sesuatu yang sekiranya bukan hanya manusia saja yang dijadikan tolak ukur dalam bertindak. Hewan, tumbuhan, dan alam sekitar perlu difikirkan juga. Tentu sifat demikian membawa pada konsekuensi supaya makhluk hidup secara keseluruhan dalam keadaan aman dan tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lain.

Selain alasan tersebut, terdapat alasan mengapa Makkah dijadikan tempat

paling mulia oleh Allah. Karena di Makkah ada Ka'bah yang dijadikan kiblat dari setiap orang untuk melaksanakan ibadah, dan tempat umat muslim untuk menunaikan rukun Islam kelima. Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan Ismail as, sebagai tempat untuk menyembah Allah dan juga menjadi pusat dakwah kepada ketauhidan hingga akhir zaman.[5]

Kemuliaan kota Makkah yang dibangun Nabi Ibrahim dan putranya dijelaskan dalam Al Qur'an Al-Imron (3;96) yang artinya; Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Bakkah (Makkah) yang penuh berkah dan menjadi petunjuk bagi alam semesta.

Islam dan Kedaulatan Lingkungan

Dalam konteks tanah haram tersebut mengilustrasian bahwa ajaran agama Islam tidak saja berkaitan dengan persoalan teologi saja, yakni hubungan manusia dengan Tuhan semesta. Ibadah kepada Tuhan tidak melulu diartikan menjalankan ibadah yang sifatnya ritual dan berdiminsi ketuhanan. Tetapi Islam bicara banyak hal yang di dalamnya tersirat banyak aspek namun tetap berada di bawah koredor ketuhanan dan semangat ketauhidan.

Salah satunya teologi dalam Islam juga berbicara mengenai bagaimana Islam dalam memandang lingkungan ini serta keterkaitan hubungan manusia dengan lingkungannnya seperti peraturan yang terdapat dalam ibadah haji di tanah haram tersebut.

Seperti dijelaskan dalam Al Qur'an sesungguhnya apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya:106-107).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia yang direpresentasikan dengan nabi Muhammad sebagai makhluk, memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan serta memeliharanya. Bukan justru menjadi penguasa atau pemilik yang bisa seenaknya berbuat memenuhi kepentingan dirinya.

---

[5]Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad Saw*. penerjemah : Muhammad Halabi Hamdi. Yogyakarta: Mardhiyah Press. 2007. hal. 43

Menjaga lingkungan adalah mengelola sumber daya alam sehingga dapat memberi manfaat kepada manusia tanpa merugikan alam itu sendiri. Allah menyediakan bumi ini untuk disikapi oleh manusia dengan kerja keras mengolah dan memeliharanya sehingga melahirkan nilai tambah yang tinggi.

Kemudian nilai tinggi itu dapat dipetik bagi manusia untuk kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera pada skala jangka panjang. Seperti dijelaskan oleh Sudirman dalam bukunya bahwa kekayaan alam yang berlimpah-ruah disediakan Allah kepada manusia dengan cara mengambil dan memberi manfaat daripada alam serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak alam.[6]

Konsep moral yang menghubungkan relasi manusia terhadap alam dijelaskan terang-terangan dalam Al Qur'an dalam surat Al-Qoshos (28:77) "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Larangan dalam ayat ini teramat jelas menggambarkan betapa bearnya tanggung jawab yang dipikul manusia terhadap alam.

Relasi Manusia dengan Alam

Manusia dibebani kewajiban menjaga kelestarian alam. Alam diciptakan bukan untuk kepentingan manusia sepihak. Diciptakan alam demi alam itu sendiri sementara manusia hanya menopang bergantung kepada alam. Bermula terjadinya ekploitasi yang dilakukan oleh manusia terhadap alam merupakan kesalahpahaman dalam memandang alam dengan cara menfokuskannya hanya sebatas objek yang dapat dikeruk untuk memenuhi hasrat kepentingan manusia sendiri.

Banyak studi menyatakan jikalau alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia itu sendiri. Memposisikan manusia di tingkatan tertinggi menandakan seolah manusia bertindak superior yang memiliki sikap bebas berbuat segalanya terhadap alam. Pola pikir semacam ini pada gilirannya membentuk mitos bahwa alam merupakan ruang material yang

[6]Sudirman. *Pilar-pilar Islam Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim*. Malang. UIN Maliki Press. 2001. hal. 272

misterius yang berada dalam jangkauan manusia. Akibatnya manusia merasa tidak perlu bersahabat dengan alam. Dengan demikian tak heran bila manusia dengan segala kebebasanya seringkali melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap alam itu sendiri.

Mitos seperti ini biasanya dibangun atas beberapa hal, salah satunya berasal dari dogma teologis yang timpang. Ketimpangan dalam dogma ini menyebabkan manusia khususnya umat beragama menjadi apatis dan tidak memerlukan persahabatan dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya dogma teologis berkenaan dengan masalah hubungan antar manusia atau yang dalam Islam biasa disebut muamalah.

Pembahasan dalam muamalah ini menyudutkan pada manusia semata, bagaimana hubungan antara manusia satu dengan lainya, sementara fiqih lingkungan jarang disentuh. Kurangnya sentuhan akan pemahaman seputar ekologis ini membuat manusia tidak tahu menahu tentang masalah lingkungan, bahkan menjadikan manusia anti ekologi. Padahal Islam sendiri mengajarkan pentingnya prinsip keseimbangan, keindahan, serta kelestarian.[7]

Pemusatan manusia sebagai makhluk paling menentukan memang perlu disadari, Al-Qur'an sendiri mengabadikan bahwa manusia adalah *master peace* di muka bumi, sebab manusia dibekali banyak kelebihan dibanding dengan makhluk apapun, dengan akal yang melengkapi dirinya terdapat kemampuan besar untuk mengubah dan mempengaruhi lingkungannya. Hanya saja lingkungan mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menerima perubahan yang dikendalikan oleh manusia sebagai subjek dominan. Batas kamampuan menerima perubahan inilah yang disebut dengan daya tampung lingkungan.[8]

Di Indonesia sendiri daya tampung lingkungan disinggung dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang disebut daya dukung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia,

[7] Subhan Setowara dan Soimin. *Agama dan Politik Moral.* Malang : Intrans Publishing. 2013. hal. 59

[8] Muhammad Akib. *Hukum lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 201. hal. 4

makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.[9] Dengan demikian dapat difahami lingkungan hidup mempunyai batasan kemampuan untuk menerima intervensi semaunya yang diselayangkan oleh manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Oleh karena itu perlu ada batasan dalam pengambilan yang terdapat di dalam perut alam. Bila tidak ada batasan dalam menguasai alam untuk memenuhi kebutuhanya, yang terjadi adalah kerusakan alam dimana-mana. Tanah longsor, banjir, kekeringan dan persoalan ekologis lainya. Kesemuanya diakibatkan dari ekosistem yang tidak seimbang yang dilatarbelakangi oleh aktivitas manusia secara bebas tanpa memikirkan keadaan alam sekitarnya.

Kehendak bebasnya manusia dalam melakukan segala aktivitasnya, manusia dituntut mempertanggungjawabkan hal ikhwal perbuatanya.[10] Sehingga atas apa yang dilakukan manusia harus didasari pada aspek lain dimana sekiranya tidak ada pihak dirugikan termasuk kedudukan alam. Caranya yaitu memandang ia sebagai subjek hukum pula. Menempatkan alam sebagaimana halnya manusia yang semestinya dihormati hak dan kedudukannya merupakan buah moral yang sudah seharusnya disadari kemudian ditanam pada diri manusia dalam berelasi dengan alam lingkungan.

Bumi mempunyai keterbatasan sebagaimana manusia, karena itu bumi harus dihargai bernilai pada dirinya sendiri.[11] Etika ini perlu diperluas, tidak sebatas pada bumi belaka, bicara bumi itu berarti bicara sesuatu yang berada di atas bumi. Tanah, air, tumbuhan, hewan dan segala makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

Akibat akhlak yang buruk terhadap lingkungan, dapat disaksikan dengan jelas bagaimana hutan dieksploitasi tanpa batas kemudian melahirkan malapetaka kebakaran hutan, yang mengakibatkan kerusakan pada hutan dan habitat hewan. Begitu juga eksploitasi kekayaan laut, bila tanpa memperhitungkan kelestarian ekologi laut melahirkan kerusakan hebat pada ekosistem laut.

---

[9]Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup UPPLH No 32 Tahun 2009
[10] M. Luthfi Malik. *Etos, kerja, pasar dan masjid.* Jakarta: LP3ES. 2013. hal.115
[11]Rachhmad K. Dwi Susilo. *Sosilogi Lingkungan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014. hal.103

Tentu dari segala bentuk ekploitasi tanpa menilai batas pengerukannya apalagi sampai dilandasi dengan kebijakan negara yang sifatnya sementara akan melahirkan bencana parah yang tidak bisa ditangani, jika hal tersebut tidak segera dihentikan. Tidak hanya generasi saat ini yang merasakan akibatnya, generasi berikutnya pun menanggung beban amat memilukan.

Batasan dalam penguasaan alam terletak pada alam itu sendiri dengan menjadikannya sebagai subjek yang juga dihormati kedudukannya. Kalau pandangan manusia terhadap alam sebatas objek semata yang bisa diperlakukan oleh subjek demi memenuhi kebutuhan manusia. Maka manusia tidak akan berhenti dan tidak pernah merasa puas untuk terus memanfaatkan alam untuk dieksploitasi demi kepentingannya tanpa melihat bagaimana kondisi alam dan dampak pada manusia sekitar bila pengerukan itu tidak dibatasi.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara agraris, masa depan alam perlu disadari dalam waktu jangka panjang. Alam yang permai ini merupakan sumber kekayaan yang tidak ada taranya. Ini merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki oleh segenap bangsa, seperti dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[12]

Kekayaan alam yang terpendam di Indonesia perlu disadari dengan dorongan moral yang tinggi dan menahan nafsu keserakahan dari manusia maupun negara. Sehingga alam ini tidak hanya generasi kita saja yang menikmati, tetapi bagaimana generasi berikutnya merasakan alam ini indah dan tentu mendatangkan keberkahan dalam skala waktu jangka panjang.

Kesalahan Fatal Paradigma Antroposentrisme

Paham pemutlakan manusia sebagai subjek tunggal seperti ini masih berkembang di beberapa negara termasuk Indonesia sebagai negara yang penduduk muslim terbesar dunia. Paham ini kita sebut dengan paradigma antroposentrisme, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat daripada alam semesta. Hanya manusia yang mendapat perhatian. Segala

[12] UUD 1945

sesuatu di luar manusia mendapat nilai apabila menunjang kebutuhan dan kepentingan manusia.[13]

Pemahaman yang melihat pada satu sisi saja membawa pada pengertian manusia merupakan subjek tunggal dalam dunia ini termasuk kaitannya dengan alam. Bila pemahaman subjek hanya manusia patokannya ini tetap dipertahankan tanpa melihat batasan dan subjek lain yaitu alam dan makhluk hidup lainya dipandang sebagai subjek, otomatis manusia menyalurkan hasrat kerakusannya untuk mengekploitasi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sementara dampaknya tidak lagi dipedulikan.

Mental manusia dalam paradigma antroposentris mencetak manusia berkarakter pendobrak lahan baru. Pendobrak lahan baru ini dalam istilah Chiras disebut *Frontier*. Manusia Frontier memiliki tiga persepsi dalam memandang alam[14]. *Pertama,* dengan keyakinanya manusia mengaggap bahwa alam dan bumi sebagai pemberi kehidupan yang tidak terbatas.

Dalam pandangan ini, alam adalah objek untuk dikeruk tanpa menilai sampai mana objek itu dikuasai dan sejauh mana objek itu diperuntukkan, dengan nafsu keserakahan yang hanya memusatkan manusia inilah kemudian memunculkan sebuah indikasi bahwa kerusakan alam disebaban ulah tangan manusia.

Kedua, memandang manusia makhluk di luar alam. Penyimpangan dari penyatuan alam itu melahirkan sikap egoistis dalam diri manusia, alam tidak lagi dipersepsikan bagian darinya. Tak heran bila sampai saat ini alam menjadi objek sasaran yang menurutnya menjanjikan untuk dieksploitasi yang melahirkan nilai keuntungan melimpah. *Ketiga,* memandang alam sebagai sesuatu yang perlu dikuasai.

Sehingga dengan sikap kekuasaan tunggal tanpa melirik alam ini telah menghilangkan pola relasi antara manusia dengan alam. Padahal keduanya tidak bisa dipisahkan. Alam butuh manusia melestarikan bukan menguasai, sementara manusia butuh alam sebagai batu pijakan dalam beraktivitas lebih-lebih memenuhi kebutuhan hidupnya.

[13]Arif Zulkifli. *Pandangan Islam Terhadap Lingkungan.* Yogyakarta: Ecobook. 2017. hal. 41
[14]Rachhmad K. Dwi Susilo. *Sosilogi Lingkungan.* hal.62

Berbicara alam selalu dikaitkan dengan persoalan ekologi. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel pakar ilmu hayati dalam pertengahan dasawarsa 1860-an. Istilah *eikos* secara bahasa bermakna rumah, sementara *logos* berarti ilmu. Artinya ekologi secara harfiah bermaka ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya yaitu alam semesta.

Makhluk hidup tersebut meliputi hewan, tumbuhan, manusia serta makhluk lain yang berada di alam semesta. Sementara MT Zen dalam mendefinisikan ekologi adalah berkaitan dengan kegiatan manusia dalam hal pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam.[15]

Pandangan tersebut pada intinya bahwa masa depan alam berada di tangan manusia dan manusia tidak akan lepas kehidupanya untuk selalu bergantung pada yang namanya alam.[16] Seperti ada timbal balik hubungan manusia dengan lingkunganya yang tidak bisa dipisahkan, selamanya terjadi hubungan simbolik antar keduanya.

Oleh karena itulah bila terjadi kerusakan lingkungan, kemungkinan besar disebabkan karena ulah tangan manusia yang telah mengambil kekayaan alam dengan cara tidak bijaksana. Sehingga yang terjadi alam meluntahkan kemarahan yang pada akhirnya bukan hanya alam tercemar, kehidupan manusia pun terancam.

Seperti tertera dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum (30:41), telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Salah satu bentuk nyata kerusakan alam diakibatkan karena ulah tangan manusia seperti pembakaran, pengerukan, pertambangan, dan segala bentuk ekploitasi besar lainnya.

Apabila eksploitasi terhadap alam ini belum mampu dikendalikan dengan semangat moral yang tinggi oleh segenap elemen dan kesadaran teologi oleh kaum agama, maka berdampak pada apa yang dinamakan krisis ekologis. Dalam

[15]Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta;Sinar Grafika. 2008. hal. 2

[16]Rachhmad K. Dwi Susilo. *Sosilogi Lingkungan.* hal.38

catatan ekonomi, krisis ekologis atau krisis lingkungan disebabkan karena pembangunan besar-besaran dengan motif mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan tentu diperlukan untuk kemakmuran negara, namun harus mempertimbangkan keseimbangan ekologi. Jika tidak, maka akan berbanding terbalik. Bukan kemakmuran yang dirasakan, jutru malapetaka yang hadir.

Akselari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha, atau masyarakat secara praktis akan berhadapan dengan lingkungan hidup. Sebab pembangunan apapun bentuknya yang bernilai ekonomis tidak terlepas dari pengambilan atau pengelolaan sumber daya alam sebagai aset. Karena salah satu aset ekonomi yang bernilai besar adalah sumber daya alam.[17]

Akan tetapi meskipun sumber daya alam merupakan aset ekonomi hendaknya diperlakukan dengan cara yang bijak. Kebijaksanaan dapat dicapai dengan memandang bahwa ketika dilakukannya pembangunan harus memperhatikan alam sebagai subjek hukum yang harus dipandang tidak hanya alat pemuas nafsu ekomis semata, tetapi nilai dan hak yang seharusnya masih bisa dinikmati dengan masa jangka panjang perlu diperhatikan.

Kesimpulan

Dalam hal penghormatan terhadap lingkungan, aktivitas terlarang di tanah haram seperti haram melakukan pemburuhan terhadap makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, dapat dijadikan cerminan. Bahwa semuanya mempunyai hak yang sama (baik manusia maupun makhluk lainnya) dan ingin merasakan kehidupan yang tentram bukan hanya manusia tetapi semua makhluk hidup lainnya.

Pentingnya manusia saling bekerjasama. Solidaritas antar sesama itulah yang nantinya mampu mendukung kehidupan yang lebih damai dan menghindari dari segala malapetaka yang hadir yang disebabkan karena krisis lingkungan. Bila alam diperhatikan dalam segala pengambilan Keputusan, tentu menjadikan bangsa dan negara ini sebagai negara yang *baldatun toyyibatun wa robbun ghofur* akan tercapai.

[17] Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia.* hal. 7

Untuk mencapai kesemuanya, tentu ada di tangan manusia yang hidup di wilayah tersebut, yang mempunyai kesadaran moral tinggi dan peduli pada keberlangsungan lingkungan hidup. Apabila manusia apatis pada lingkungan bahkan menjadikan lingkungan alat pemuas ekonomi semata, tanpa pertimbangan yang bijaksana untuk diambil manfaatnya. Ketika terjadi krisis lingkungan, imbasnya tidak hanya pada lingkungan semata, tetapi kehidupan manusia pun terancam. Tentu sampai kapan pun hal ini tidak diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

Akib, Muhammad .*Hukum lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

An-Nadwi.,Abul Hasan Ali Al-Hasani *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad Saw*. penerjemah : Muhammad Halabi Hamdi. Yogyakarta: Mardhiyah Press 2007

Armstrong, Karen *Sejarah Islam, telaah ringkas – komprehensif perkembangan islam sepanjang zaman*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2014

Malik,M. Luthfi. *Etos, kerja, pasar dan masjid.* Jakarta: LP3ES. 2013

Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an*. Darusy – Syuruq, Beirut. 1992

Setowara, Subhan. dan Soimin. *Agama dan Politik Moral.* Malang : Intrans Publishing. 2013

Shihab, Quraish. *Tafsir Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Ciputan: Lentara Hati 2017

Sudirman. *Pilar-pilar Islam Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim*. Malang. UIN Maliki Press. 2011

Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta;Sinar Grafika. 2008

Susilo,Rachhmad K. Dwi. *Sosilogi Lingkungan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014

Zulkifli, Arif. *Pandangan Islam Terhadap Lingkungan.* Yogyakarta: Ecobook. 2017

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup UPPLH No 32 Tahun 2009

Tanggung Jawab Wakil Tuhan (Khalifah) Untuk Merawat Lingkungan

(Antara Pertumbuhan Penduduk dan Industrialisasi)

Oleh: M. Ali Masruri

Abstrak

Manusia tidak sepantasnya menjerumuskan dirinya pada kehancuran. Bumi adalah habitat, merusak bumi sama halnya merusak diri. Pasca revolusi industri, pembangunan industri skala besar mulai be rmunculan, manusia mulai melakukan eksploitasi dengan menggunakan mesin-mesin dan teknologi. Seiring masifnya industrialisasi, kekhawatiran terhadap nasib bumi mulai muncul di benak manusia. Industrialisasi telah mencederai ekosistem. Peralihan fungsi hutan, reklamasi, dan bentuk eksploitasi alam lainnya telah berhasil mengganggu ekologi yang merupakan fakta postulat di muka bumi. Islam sebagai agama yang menempatkan manusia pada posisi wakil Tuhan telah memperingatkan agar mengelola alam yang diciptakan Tuhan untuk manusia dengan bijaksana. Berlebih-lebihan adalah perihal yang tidak dibenarkan oleh Islam termasuk dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Keynote*: Lingkungan dan Wakil Tuhan*

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dengan luas daratan sekitar 190,9 juta hektare mempunyai lebih dari 17.000 pulau, di mana 6.000 pulau diantaranya dihuni oleh penduduk. Sumber daya lahan bagi bangsa Indonesia merupakan sumber daya yang strategis untuk menunjang kehidupan dan meningkatkan kemakmuran, serta merupakan tumpuan hidup bagi sebagian besar untuk melakukan berbagai kegiatan produktif, seperti kegiatan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan), industri, pemukiman dan pariwisata. Selain sebagai modal dasar untuk memproduksi pangan, serat dan bahan-bahan lain untuk kehidupan (termasuk bahan obat-obatan), lahan juga berperan penting dalam menyangga lingkungan, seperti mengendalikan siklus air dan menjaga keseimbangan komposisi udara di dalam atmosfir.[1]

Berdasarkan perhitungan Neraca Penggunaan Lahan tahun 2000 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), penggunaan lahan pada kawasan lindung yang idealnya 100% berupa hutan, ternyata telah beralih fungsi menjadi non hutan seluas 12 juta ha atau 18% dari luas kawasan lindung. Perubahan fungsi kawasan lindung yang terbesar terjadi di wilayah Jawa dan Bali (53,6%) dan disusul oleh wilayah Sumatera (35,1%).[2]

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor deforestasi dan degradasi hutan. Emisi GRK ini sebagian besar berasal dari kebakaran dan drainase lahan gambut dengan emisi tahunan tidak kurang dari 0,5 miliar ton karbon. Sebagai negara yang dituding dengan tingkat laju deforestasi terbesar kedua di dunia setelah Brazil, kementrian kehutanan mencatat laju deforestasi di Indonesia berkisar antara 1,17 hektar pertahun (64,8%) dan 0,41 hektar pertahun (35,2%) di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain).

Kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh kegiatan alih guna lahan dan gambut serta kebakaran hutan dan pembalakan liar. Lemahnya pengawasan

[1]Sitanala Arsyad, Ernan Rustiadi, *Penyelamatan Tanah Air dan Lingkungan,* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm 4

[2]Sitanala Arsyad, Ernan Rustiadi, *Penyelamatan Tanah*....hlm 6

terhadap penerapan aturan penebangan pohon dan kewajiban penanaman kembali oleh pemilik konsensi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), merajalelanya pembalakan liar dan "diterbitkanya berbagai izin konversi hutan" oleh kementrian kehutanan dan pemerintah kabupaten, merupakan hal-hal yang telah mewarnai kerusakan hutan di Indonesia.[3]

Dilihat dari sejarah pengelolaan kawasan hutan, perluasan kebun sawit merupakan penyebab kerusakan hutan yang hadir paling akhir, yaitu setelah hutan dirusak oleh pemilik konsesi HPH dan akibat pembalakan liar. Demikian juga disebabkan oleh tuntutan pasar global terhadap produk sawit yang ramah lingkungan semakin tinggi, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa. Agar Indonesia senantiasa memenuhi permintaan pasar global, upaya untuk memperbaiki praktik pembukaan lahan baru dan pengelolaan harus dilakukan.[4]

Kebun sawit ini bukan menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini, namun hanya sebagai contoh dari bentuk kesalahan manusia ketika ia disebut sebagai khalifah di bumi, yang seharusnya menjaga bumi dengan baik dan bijak dalam mengelola. Bukan malah sebaliknya, dan inilah justru yang menjadi realita saat ini.

Kerusakan lingkungan kebanyakan berasal dari kesalahan makhluk yang disebut manusia. Dalam pandangan Islam, manusia di samping sebagai salah satu makhluk Tuhan, ia sekaligus sebagai wakil (khalifah) Tuhan di muka bumi (QS. Al-An'am: 165).

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ

Artinya: dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

---

[3]Agus Purnomo, *Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut,* (Jakarta, Gramesdia, 2012) hlm, 4

[4]Agus Purnomo, *Menjaga Hutan......*hlm, 6

Sebagai makhluk Tuhan, manusia mempunyai tugas untuk mengabdi, menghamba (beribadah) kepada Penciptanya (*al-Khaliq*). Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa merepresentasikan peran Allah terhadap alam semesta termasuk bumi seisinya antara lain memelihara (*al-rab*) dan menebarkan rahmat di alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*).[5] Maka dalam tulisan ini, penulis akan mengulas tentang bagaimana sebenarnya Islam memandang manusia sebagai sosok wakil (khalifah) Tuhan?. Kemudian bagaimana Islam menganjurkan dalam mengelola Alam?. Kajian ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam melakukan tanggungjawab kita sebagai manusia yang ditunjuk Allah menjadi khalifahnya.

Meningkatnya Jumlah Penduduk

Dalam mata pelajaran waktu di SMP telah diterangkan tentang ledakan penduduk dunia. Bahwa pada permulaan abad masehi (sekitar 2.000 tahun lalu) penduduk bumi diperkirakan hanya berjumlah 250 juta dan pada tahun 1650 menjadi dua kali lipatnya, yakni 500 juta, pada tahun 1975 telah mencapai 4.000 juta. Tahun 1990-an penduduk melampaui 5.000 juta jiwa. Pertumbuhan yang sangat cepat ini menandakan terjadinya ledakan penduduk dunia. Pertambahan penduduk pada akhir abad ke-20 ini terutama terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. 75% ledakan penduduk tersebut berada di negara-negara berkembang terutama di benua Asia, Amerika Selatan, dan Afrika.[6]

Sedangkan di Indonesia, ledakan penduduk hanya diketahui secara pasti sejak tahun 1920 yaitu jumlah penduduknya 49,3 juta dan tahun 1930 telah menjadi 60,7 juta. Sensus penduduk tahun 1961 mencatat jumlah penduduk Indonesia 97 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk terus terjadi hingga tahun 1980 menjadi 147.490.000 jiwa dan meningkat lagi pada tahun 1990 tercatat sebanyak 178.500.000 jiwa. Meskipun demikian menurut presentasenya, pertumbuhan penduduk yang tercatat pada sensus tahun 1990 dan 2000 telah mengalami penurunan yang berarti.

---

[5]Tim, *Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam,* (Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah dan Kementrian Lingkungan hidup, 2011) hlm, 11

[6] Indianto Mu'in MK, *Pengetahuan Sosial Geografi 2,* (Jakarta, Grasindo), hlm, 73

Ledakan penduduk mendatangkan dampak yang tidak diinginkan sebab pertumbuhannya sangat besar. Dampak yang ditimbulkan di antaranya adalah:

a. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan terutama makanan pokok sebab lahan pertanian yang tidak banyak bertambah meskipun teknologi pertanian (intensifikasi) telah diterapkan.

b. Terjadi persaingan dalam memenuhi kebutuhan pokok baik antar kelompok masyarakat maupun antar negara yang menyebabkan peperangan.

c. Terjadi perubahan fungsi lahan secara besar-besaran terutama dari hutan menjadi lahan pertanian. Selain itu terus-menerusnya dibuka lahan untuk pemukiman dan sarana sosial lainnya.[7]

Berbagai kemudahan teknologi dan peningkatan kualitas hidup mendorong orang untuk terus berkembang, termasuk melangsungkan keturunan. Fenomena "ledakan penduduk" tidak terelakkan lagi, setelah revolusi industri hanya sekitar dua abad terakhir jumlah manusia berkembang dahsyat. Al Gore dalam filmnya *"An Inconvenient truth"* mengkhawatirkan bahwa manusia yang semakin bertambah jumlahnya, peradabannya akan bertabrakan dengan Bumi dalam tiga hal yang saling mengait.

Pertama, jumlah penduduk yang begitu besar akan memerlukan sumber daya dan energi yang luar biasa dari alam, belum lagi dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan pembangunan. *Kedua*, teknologi yang terus berkembang melampaui kemampuan kendali manusia untuk mengaturnya. *Ketiga*, persoalan moral ketika pembangunan tidak dapat menciptakan perbaikan, tetapi justru banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kehancuran daya dukung kehidupan.[8]

Koorporasi dan Kerusakan Lingkungan

Sekarang dunia telah memasuki era baru Revolusi Industri (industri 4.0), di mana kekuatannya bertopang pada revolusi industri ketiga. Dalam abad ini, revolusi industri ditandai dengan bersatunya beberapa teknologi sehingga kita melihat suatu area baru yang terdiri dari tiga bidang ilmu independen:

[7] Indianto Mu'in MK, *Pengetahuan......*hlm, 73

[8] M. Baiquni, M. Baiquni, *Revolusi Industri, Ledakan Penduduk dan Masalah Lingkungan,* (Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, 2009) hlm, 42

fisika, digital dan biologi. Sejarah mencatat dunia kita telah mengalami empat kali Revolusi Industri, pertama dimulai sejak 1784 memperkaryakan air dan kekuatan uap untuk mekanisasi sistem produksi. Revolusi industri kedua yang dimulai tahun 1870 menggunakan daya listrik untuk melangsungkan produksi masal. Sedangkan revolusi industri ketiga yang dimulai tahun 1969 menggunakan kekuatan elektronik dan teknologi informasi untuk otomatisasi proses produksi.[9]

Dalam catatan sejarah, berbagai penemuan spektakuler membuat para ilmuwan berambisi selalu mengungguli yang lain. Pada 1769 James Watt dicatat sebagai pembuat mesin uap hasil penyempurnaan temuan para ilmuwan sebelumnya. Penemuan ini dianggap tonggak yang memicu revolusi industri. Berbagai mesin dikembangkan dengan basis mesin uap untuk menggerakkan kapal, kereta api dan mobil. Mesin-mesin industri juga bermunculan untuk mengolah sumber daya alam dan bahan mentah menjadi bahan jadi secara masal yang disebut industri.[10]

Menurut Clinard dan Yeager, bahwa hampir 40% dari 1.446 sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi atau industri adalah terhadap perbuatan-perbuatan yang secara langsung merugikan konsumen yang berkaitan dengan kualitas dan keamanan produk, dan hampir sepertiga sanksi dijatuhkan terhadap kerusakan lingkungan, 11,1% dijatuhkan terhadap pelanggaran ketentuan perburuhan, 8,2% terhadap tindakan yang merusak sistem ekonomi, 7,95 terhadap tindakan yang memengaruhi administrasi pemerintahan, serta 2,4% kerugian konsumen akibat dari kekuatan ekonomi.[11]

Allah Swt telah menggambarkan betapa kerusakan terjadi di atas bumi baik di daratan maupun lautan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian*

[9]Raimond R. Tjandrawinata, *Industri 4.0: Revolusi Industri Abad Ini dan Pengaruhnya Pada Bidang Kesehatan dan Bioteknologi,* (Jurnal Medicinus, 2016) hlm, 2

[10] M. Baiquni, *Revolusi Industri.......*hlm, 41

[11] M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum,* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018) hlm, 59

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum: 41)

Kemudian Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa termasuk perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan adalah sifat rakus yang ada pada diri manusia itu sendiri.

بما كسبت أيدي الناس من الظلم وكثرة المطامع وانتهاك الحرومات[12]

“Kerusakan di bumi disebabkan oleh tangan-tangan manusia dari perbuatan lalim, rakus, dan pelanggaran (perusakan).”

Garry Bates dan Zada Lipman menguraikan kerusakan lingkungan (*environmental harm*) dan pencemaran (*pollution*) melalui bukunya *Corporate Liability for Pollution,* yang intinya sebagai berikut: Penentuan kerusakan lingkungan secara jelas menentukan tanggung jawab koorporasi, karena *harm* atau potensi untuk rusak.[13]

Pada 2015, kita mendengar berbagai gejala mengkhawatirkan. Sebuah studi melaporkan suhu bumi naik antara 1,5° hingga 2° Celsius dibandingkan masa pra-industri. Menurut hasil penelitian lainnya, es Samudera Arktik terus mencair sehingga permukaan air laut makin tinggi saban tahun. Ada pula riset yang menunjukkan bahwa air dari Samudera Atlantik sudah naik ke Samudera Arktik. James Watson, profesor dari Universitas Queensland, Australia, menunjukkan sejumlah kecil bukti ancaman serius peningkatan suhu bumi bagi makhluk hidup. Ia mengatakan“ukuran salamander menyusut, burung migran mengubah rute migrasinya, serta sejumlah spesies kawin silang, semua ini terjadi hanya karena sedikit pemanasan global”.[14]

Eksploitasi alam, seperti reklamasi, alih fungsi hutan, limbah industri yang menyebabkan pencemaran lingkungan adalah bentuk dari kerakusan manusia. Mereka selalu tidak merasa cukup dengan sebuah kesederhanaan hidup. Hidup sederhana adalah pokok dari perlindungan alam, dengan hidup sederhana, manusia tidak perlu mengeksploitasi alam yang dapat menimbulkan kerusakan.

[12]Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi,* Juz 21, (Mesir, 1946), hlm, 55

[13]N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,* (Jakarta, Gelora Aksara Pratama, 2004) hlm, 281

[14]https://tirto.id/upaya-sektor-industri-turunkan-emisi-gas-rumah-kaca-dbLp, diakses 13/12/2018

Konsep *Khalifah Fi Al-Ardl* Perspektif Perlindungan Lingkungan

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".* (QS Al-Baqarah: 30)

Makna yang dikehendaki dari *al-khalifah fi al-ardl* dalam ayat tersebut adalah Nabi Adam As., yakni sebagai pengganti Tuhan di muka bumi dalam menegakan hukum-hukum Allah dan perintah-perintah-Nya.[15] Akan tetapi menurut Al-Hasan dalam kitab *Mafatih Al-Ghaib* dikatakan bahwa yang dimaksud dari *al-khalifah fi al-ardl* adalah keturunan Adam sebab, manusia akan menjadi pemimpin dari manusia lainnya.[16]

Oleh karena itu kewajiban manusia terhadap alam dalam rangka pengabdiannya kepada Allah SWT sebagai pemimpin di bumi adalah melakukan pemeliharaan terhadap alam (termasuk pemeliharaan kehidupan diri atau *hifdzun nafs*) untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam.[17] Dalam mengelola alam Allah memberi batas-batas kepada manusia agar tidak melewati batas sehingga disebut *"musrifin"*.

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.* (QS Al-An'am: 141)

و الاسراف: مجاوزة الحد, والحد الذي ينهى الله عن تجاوزه اما شرعي كتجاوز الحلال من الطعام و الشراب وما يتعلق بهما الى الحرام, واما فطري طبعي وهو تجاوز حد الشبع الى البطنة الضارة[18]

"Kata *'israf'* dari ayat tersebut adalah: melewati batas. Batas adalah sesuatu yang Allah melarangnya untuk dilewati, adakalanya batas itu berupa ketentuan syariat seperti melewati batas kehalalan makanan, minuman dan apapun

---

[15]Abi Abdillah Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an,* (Lebanon, Muassisah Al-Resalah, 2006) hlm, 395

[16] Muhammad Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib,* jild 2, (Lebanon, Dar Al-Fikr, 1981) hlm, 181

[17] Tim, *Teologi Lingkungan:.....*hlm, 11

[18]Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir......* Juz 8, hlm, 53

yang berkaitan dengan keduanya menuju kepada keharaman. Ataupun batas yang berasal dari fitrah watak manusia, melewati batas kecukupan menuju ketamakan yang membahayakan".

Al-Maraghi menempatkan "batas (*al-had*)" yang berasal dari fitrah watak manusia pada bagian dari batas Allah yang dilarang untuk melewatinya. Pemahaman Al-Maraghi itu memiliki semangat proteksi terhadap Alam sebagai wujud ketakwaan terhadap Allah SWT sebab dengan menjaga Alam berarti kita telah menjahui *'israf'* yakni tidak mengeksploitasi alam yang mengkibatkan kerusakan.

Kaitannya dengan watak manusia, dalam disiplin Filsafat Lingkungan Hidup, terdapat paradigma sistemis-organis atau juga dikenal sebagai paradigma Ekologis yang muncul pada abad ke-19 dan ke-20 mengatakan; keterkaitan, ketidakterpisahan, saling pengaruh, jaringan, interdependensi adalah kenyataan kehidupan dan hakikat dari alam semesta itu sendiri.

Karena itu, berbeda dengan paradigma mekanistis yang lebih memusatkan perhatiannya pada pertanyaan tentang materi, paradigma sistemis-organis-ekologis lebih memusatkan perhatian pada pertanyaan tentang pola hubungan dan interaksi di antara berbagai bagian dan komponen alam semesta serta organisme kehidupan di dalamnya, tanpa mengabaikan pentingnya pertanyaan tentang materi. Bagi paradigma sistemis-organis, tidak ada materi yang ada begitu saja tanpa ada bentuk, pola atau strukrur yang membentuknya menjadi sebagaimana adanya.[19]

Sikap dan perilaku manusia terhadap alam semesta dan kehidupan di dalamnya atau yang kita sebut sebagai lingkungan hidup sesungguhnya dipengaruhi oleh paradigma berpikir kita tentang hakikat alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Persoalan tentang hakikat alam semesta dan hakikat dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang sangat menarik sejalan dengan perkembangan, kemajuan, dan sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan itu sendiri.[20]

[19]A. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra,* (Jakarta, PT Kanisius, 2014) hlm, 12, 13

[20] A. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup:.....*hlm, 11

Dalam arah praktis untuk menjaga kemanfaatan dan kelestarian alam (fungsi manfaat dan reproduksi) misalnya, Rasulullah Muhammad Saw melarang memetik buah sebelum matang (*ripe*) dan siap dikonsumsi, dilarang memetik kembang sebelum mekar dan menyembelih hewan ternak yang masih kecil dan belum berumur.[21]

Sikap Nabi Muhammad Saw tersebut sebagai bentuk dari pencegahan eksploitasi alam yang dapat merusak ekosistem. Pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya alam yang berlebihan akan menguras sumber daya alam yang bersangkutan hingga habis tak tersisa. Akibatnya, hak-hak untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang terabaikan. Perbuatan ini sama halnya dengan merampas atau merampok hak-hak orang lain, yang berarti juga pelanggaran terhadap hukum atau ketetapan Tuhan.[22]

Imam Ar-Razi menafsirkan larangan merusak bumi pada surat Al-A'raf ayat 56 sebagai bentuk larangan agar manusia tidak melakukan tindakan yang dapat merusak sesuatu yang ada di bumi.

معناه اي معنى قوله تعالى «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها»[٢٣]

ولا تفسدوا شيئا في الأرض فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس وإفساد الأموال بالغضب و السرقة ووجوه الحيل[٢٤] وغير ذالك من الخمسة في باب المقاصد الشريعة

"Makna dari larangan merusak bumi adalah manusia dilarang untuk merusak apapun yang ada di muka bumi termasuk di dalamnya merusak diri, merusak harta benda sebab emosional, pencurian, dan bentuk-bentuk rekasaya yang dapat merusak bumi", Dan lain-lain sesuai acuan *maqashid syari'ah*".

Tidak ada logika yang mampu membenarkan tindakan yang dapat merusak bumi. Sebab bumi adalah tempat kaki berpijak, tempat manusia hidup, berkembang biak, bersosialisasi, beribadah dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah suatu kewajiban bagi manusia. Sebagai wakil Tuhan manusia diperintahkan untuk melindungi dan menjaga

[21] Tim, *Teologi Lingkungan:.....*hlm, 11
[22] Tim, *Teologi Lingkungan:.....*hlm, 12
[23] Surat Al-A'raf ayat 56
[24] Muhammad Ar-Razi, *Mafatih.....* Juz 14, hlm, 139

kelestarian bumi. Keserakahan manusia adalah faktor utama yang menjadikan ia melakukan eksploitasi atau pemakaian secara berlebihan (*israf*). *Israf* adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam, oleh karena itu jika manusia menggunakan fasilitas alam secara berlebihan berarti ia telah melakukan perbuatan yang dilarang Islam. Khalifah berarti beban tanggung jawab, bukan hanya bagaimana memanfaatkan alam untuk keperluan manusia, akan tetapi memakai sumber daya alam sesuai porsinya juga menjadi prioritas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Maraghi. Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi,* Juz 21, Mesir, 1946

Al-Qurthubi. Abi Abdillah, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an,* Lebanon, Muassisah Al-Resalah, 2006

Al-Razi. Muhammad, *Mafatih Al-Ghaib,* jild 2, Lebanon, Dar Al-Fikr, 1981

Amrullah. M. Arief, *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum,* Jakarta, Prenadamedia Group, 2018

Arsyad. Sitanala, Ernan Rustiadi, *Penyelamatan Tanah Air dan Lingkungan,* Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012

Baiquni. M, *Revolusi Industri, Ledakan Penduduk dan Masalah Lingkungan,* Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, 2009

Keraf. A. Sonny, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra,* Jakarta, PT Kanisius, 2014

MK. Indianto Mu'in, *Pengetahuan Sosial Geografi 2,* Jakarta, Grasindo

Purnomo. Agus, *Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut,* Jakarta, Gramesdia, 2012

Siahaan. N. H. T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,* Jakarta, Gelora Aksara Pratama, 2004

Tim, *Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam,* Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah dan Kementrian Lingkungan hidup, 2011

Tjandrawinata. Raimond R, *Industri 4.0: Revolusi Industri Abad Ini dan Pengaruhnya Pada Bidang Kesehatan dan Bioteknologi,* Jurnal Medicinus, 2016

Tirto.id

Konsep "Laudatosi" dalam Menjaga Lingkungan

Oleh: Mukhammad Ainul Yaqin

Abstrak

Perlindungan lingkungan adalah salah satu dari permasalahan mendesak yang dihadapi umat manusia hingga saat ini. Semua ilmuwan, ahli ekonomi, ahli filsafat, peneliti (melalui surat kabar, televisi, radio, dan lainnya) menunjukkan rasa kecemasan yang luar biasa. Mereka menunjukkan tanda-tanda serius dampak zat beracun yang kurang baik atas lingkungan hidup manusia, binatang,, dan tumbuh-tumbuhan. Ironisnya perilaku demikian belum menumbuhkan kesadaran bagi manusia untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan secara utuh. Resiko yang mengancam lingkungan merupakan pelajaran yang lengkap dan berharga bagi kehidupan manusia. Sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalkan polusi, pada skala lokal maupun nasional.

Ajaran Kristiani pada dasarnya menyuguhkan suatu keyakinan akan keterikatan antara Khalik, manusia dan makhluk lainnya. Sebab itu secara teologis tidak mungkin kita berpikir tentang lingkungan hidup, tentang sumber daya alam dan sebagainya terpisah dari ciptaan Tuhan. Karena, segala sesuatu itu adalah ciptaan-Nya dan pada dasarnya dimaksudkan untuk mencerminkan atau merefleksikan kemuliaan Tuhan. Seluruh ciptaan itu mempunyai nilai sendiri, manusia berkewajiban memelihara ekosistem yang ada. Peran dan posisi yang dipegang manusia ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kebenaran dalam ajaran

agama. Agama adalah sumber nilai-nilai kebenaran bagi penganutnya karena di dalamnya terdapat aturan, pedoman, serta perintah yang mengatur manusia dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan isi Alkitab.

Keynote: *Menjaga Lingkungan,Krisis Ekologi, dan Alkitab Sumber Kebenaran*

Pendahuluan

Lebih dari lima puluh tahun yang lalu, ketika dunia terhuyung di ambang krisis nuklir, Paus St. Yohanes XXIII menulis sebuah ensiklik yang tidak hanya menolak perang, tetapi menyampaikan suatu proposal perdamaian. Dia mengalamatkan pesannya *Pacem in Terris* kepada seluruh "dunia Katolik" dan juga "kepada semua manusia yang berkehendak baik". Kini, dihadapkan dengan kerusakan lingkungan global, Paus Fransiscus ingin menyapa setiap orang yang hidup di planet ini, dalam seruan *Apostolik Evangelli Gaudium.*

Pada tahun 1971, delapan tahun setelah *Pacem in Terris,* Paus Paulus VI berbicara tentang masalah ekologi sebagai "akibat tragis" dari aktivitas manusia yang tak terkendali: "Karena eksploitasi alam yang sembarangan, manusia mengambil resiko merusak alam dan pada gilirannya menjadi korban degradasi ini".[1] Ia telah berbicara juga kepada Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kemungkinan "bencana ekologis sebagi akibat peradaban industri", dan menekankan "kebutuhan mendesak akan perubahan radikal dalam perilaku umat manusia", karena "kemajuan ilmiah yang sangat luar biasa, kemampuan teknis yang sangat menakjubkan, pertumbuhan ekonomi yang sangat mencengangkan, bila tidak disertai dengan perkembangan sosial dan moral yang otentik, akhirnya akan berbalik melawan manusia".[2]

Paus St. Yohanes Paulus II menjadi semakin khawatir akan masalah ini. Dalam ensikliknya, yang *pertama*, ia memberi peringatan bahwa manusia

---

[1]Surat Apostolik *Octogesima Advenies* (HUT ke-80 *Rerum Novarum;* 14 Mei 1971), 21: AAS 63 (1971), hlm. 416-417

[2]Pidato kepada *FAO* pada HUT ke-25 Lembaga tersebut (16 November 1970), 4: AAS 62 (1970), 833.

tampaknya sering "tidak melihat makna lain dari lingkungan alam selain apa yang berguna untuk segera dipakai dan dikonsumsi".[3] Selanjutnya, ia menyerukan *pertobatan ekologis* global.[4] Pada saat yang sama, ia mencatat bahwa hampir tak ada usaha untuk "mengamankan kondisi-kondisi moril lingkungan manusiawi". Penghancuran lingkungan manusia merupakan perkara sangat berat, bukan hanya karena Allah telah mempercayakan dunia kepada manusia, tetapi karena hidup manusia itu sendiri merupakan hadiah yang harus dilindungi dari berbagai bentuk degradasi. Setiap upaya untuk melindung dan memperbaiki dunia kita memerlukan perubahan besar dalam gaya hidup, dalam pola produksi dan konsumsi, begitu juga dalam sistem manapun struktur pemerintahan yang sudah baku, yang sekarang ini menguasai masyarakat.[5] Pengembangan manusia yang otentik memiliki sifat moral ini mengandaikan penghormatan penuh terhadap pribadi manusia, tetapi juga harus peduli terhadap dunia di sekitar kita dan mempertimbangkan sifat setiap makhluk dan hubungan satu sama lain dalam suatu sistem yang tertata. Dengan demikian, kemampuan manusia untuk mengubah realitas harus dilakukan berdasarkan semua yang telah diberikan Allah sejak semula.[6]

Relasi Manusia degan Lingkungan

Sebenarnya ekologi sebagi ilmu, tepatnya sebagai cabang dari ilmu hayat, hanya menguraikan kondisi dari ekosistem belaka dan tak menyarankan apa-apa tetapi, semakin banyak informasi yang diberikan mengenai krisis ekologi, semakin diperingatkan kita akan suatu bahaya yang mengancam eksistensi kita. Peringatan dari ekologi disebut *ecological imperative*. Dari sinilah baru kita menyadari suatu kesadaran ekologis yang isinya, suatu keinginan untuk bertanggung jawab atas tingkah laku kita terhadap lingkungan. Maka terjadilah peralihan ke bidang etika lingkungan.[7]

[3]Ensiklik *Redemptor Hominis* (Penebus Manusia; 4 Maret 1979), 15: ASS 71 (1979), 287.

[4]Bdk. *Katekese* (17 Januari 2001), 4 *Insegnamenti* 41/1 (2001), 179.

[5]Ensiklik *Centesium Annus* (1 Mei 1991), 38: ASS 83 (1991), 841; (Ulang Tahun Keseratus), Jakarta: DokPen KWI, 1991, hlm. 52

[6] Yohannes Paulus II, Ensiklik *Sollicituudo Rei Socialis* (Keprihatinan Sosial; 30 Desember 19987), 34: AAS 80 (1988), 559

[7] J. De Graaf, *Ethische Consequenties Van De Echologische Imperative* dalam H.C.J Oomen, *Mens en Ecologie; Visies op de relatie tussen mens e leefmilieu*, Samson, Alphen a. D Rijn, 1973, hlm. 95-98

Etika lingkungan dalam bentuk-bentuknya yang sederhana kita saksikan pada aneka gerakan kecintaan alam. Di mana-mana sekarang kita melihat papan bertuliskan: "Nikmati keindahanku tanpa memetik!", "Biarkan aku tumbuh, berbunga dan layu!", "Aku pun makhluk sesama anda yang perlu anda cintai!". Itu semua yang bertalian dengan tanaman, khususnya bunga-bungaan yang menghiasi taman. Adapun yang untuk hewan, tanah dan hutan belum ada cara baru, kecuali aneka slogan, seperti: "Sayangilah binatang!", "Jangan menembak burung di sini!", "Hutan sumber kemakmuran bangsa!".

Dalam rangka mencari makna umum dari lingkungan alam bagi kita manusia, kita temukan tujuh motivasi dari gerakan pelestarian biostera sebagi ruang huni manusia, yang perinciannya sebagai berikut:[8] *Pertama,* manusia mempunyai ikatan dengan alam yang sifatnya dapat saja religius; *Kedua,* ada motivasi etis yang berdasarkan rasa keindahan; *Ketiga*, alam merupakan serikat bagi manusia di dalam ia bertahan terhadap berbagai bencana seperti banjir, badai, polusi udara, dan lainnya; *Keempat,* alam menghidupi manusia dengan menyediakan bahan pangan, sandang dan *panggon* (rumah); *Kelima,* alam penting artinya bagi ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengajaran; *Keenam,* alam menjadi sumber kesehatan, rekreasi serta kesenian. Perlu pula diketahui bagaimana sebenarnya ekologi memandang manusia. Ekologi melihat manusia sebagai "hewan tertinggi" yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Sebagai "homo sapiens" manusia sadar bahwa ia sedang menjalani suatu evolusi yang arahnya dapat ditentukannya sendiri melalui pemanfaatan segenap potensi intelektual, dan spiritual. Semakin manusia merasa dirinya diancam oleh rusaknya lingkungan sekitar karena perkembangan teknologi atau perkembangan penduduknya, semakin ia mengusahakan kelestarian lingkungan melalui berbagai organisasi kecintaan alam dan kegiatan kedinasan seperti reboisasi, pengawetan tanah, pencegahan erosi, pemeliharaan cagar alam dan sebaginya.[9]

[8] H.C.J Oomen, *De mens in de biosfeer, op.cit., hl. 10-14*

[9]Piere Tielhard de Chardin, *The Future of Man,* Collns/Fontana Book, York/london, 1973. Hlm. 303-311

Merenungkan Modernisasi Desa

Modernisasi desa bertalian erat dengan beberapa hal seperti komunikasi dan transportasi, energi dan tenaga manusia, hidup biologis manusia dan lingkungan biotis-fisik, integrasi sosial, serta urbanisasi. Modernisasi desa sebagi usaha manusia merupakan bagian dari modernisasi negara Indonesia yang menggunakan berbagai ilmu dan teknologi untuk merubah alam dan masyarakat manusia.

Pertanyaan bagi kita menurut pandangan iman Kristen: Modernisasi yang ada saat ini bersifat netral, negatif atau positifkah? Jawabannya dapat saja positif, asalkan modernisasi membawakan kebebasan bagi manusia. Kebebasan di sini dalam arti bebasnya manusia dari belenggu kekuasaan alam, kosmos, tradisi dan adat. Dalam usaha memperbaharui dunia Tuhan memakai manusia sebagai pertanyaan dan untuk ini manusia diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang ditelurkan oleh proses sekularisasi, sedang kaum muda terlalu membabibuta dalam menerimanya sehingga terjadilah sebuah ketimpangan terhadap sumber daya alam yang menjadikan ladang perkebunan dan sawah garapan yang produktif dirubah menjadi bangunan-bangunan mewah dan megah atas nama modernisasi desa. Sebenarnya kepercayaan bahwa dengan berbagai pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan agar manusia lebih dekat dengan Tuhannya. Ia bukanlah penentu keberhasilan dalam merubah dunia menjadi baru.

Teologi Ketatalayanan

Untunglah teologi dominasi masih sempat dikoreksi dengan pemahaman baru tentang sisi lain dari mandat yang diberikan kepada manusia yakni, tanggung jawab untuk memelihara alam. Hal ini dialasakan pada Kejadian 2: 15

“Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu”.

Berdasarkan pemahaan terhadap tugas “mengusahakan” dan “memelihara” ini berkembanglah Teologi Ketatalayanan (Teology of Stewardship). Namun karena pengaruh teologi dominasi yang cukup kuat, pemahaman ketatalayanan itu pun hanya dilihat dari segi manajerial terhadap lingkungan hidup;

tugas mengusahakan dan memelihara itu dilihat sebagai penggunaan dan bertanggungjawab atas alam dan sumber dayanya secara bijaksana. Padahal pandangan Alkitab tentang seluruh ciptaan itu jauh melebihi sikap sekedar pemakaian yang bertanggungjawab dan bijaksana.

Perkembangan teologis yang mutakhir berupaya melihat seluruh ciptaan ini bukan secara *theosentris;* artinya segala sesuatu dilihat dari segi Sang Pencipta. Bahwa Tuhan tak pernah menghendaki rusak dan musnahnya ciptaan-Nya. Setelah Tuhan menghukum bumi ini dengan banjir besar dan menyelamatkan Nuh dengan bahteranya yang memuat segala jenis makhluk hewani, maka Tuhan mengadakan perjanjian bukan hanya dengan Nuh tetapi dengan segala makhluk. Kejadian 9: 16-17 dijelaskan:

"Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjiann-Ku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang ada di bumi". Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan segala makhluk yang ada di bumi".

Tegasnya, seluruh ciptaan itu memiliki nilai justru karena hubungan perjanjian antara Khalik dengan segala makhluk. Alkitab sebenarnya tidak pernah menyaksikan bahwa Tuhan memberikan hadiah kepada manusia untuk menguasai dan mengusahakan alam dengan segala sumber dayanya secara eksploitatif, serampangan, seenaknya, tanpa kepekaan. Sebaliknya dituntut dari manusia itu bertanggungjawab untuk memelihara dan mengasihi segala ciptaan Tuhan.

Teologi Rekonsiliasi

Teologi yang berkembang saat ini merujuk pada pemahaman keselamatan yang dikerjakan Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang mencakup seluruh ciptaan. Jadi bukan hanya manusia saja yang diselamatkan, tetapi seluruh ciptaan. Kitab Perjanjian Baru mengumumkan bahwa Allah telah mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya oleh dan di dalam Yesus Kristus. Dalam Kolose 1: 19-20 dikatakan:

"Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang di bumi,

maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus".

Atas dasar ini terbukalah restorasi atau pemulihan hubungan antara kemanusiaan dengan sesama ciptaan, antara manusia dengan makhluk lainnya antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan Pencipta-Nya. Jika diistilahkan teologi ini bernama teologi rekonsiliasi.

Teologi rekonsiliasi inilah yang yang menurut hemat saya perlu kita kembangkan terus untuk menentukan sikap, kelakuan dan gaya hidup umat Kristen dalam proses pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Teologi rekonsiliasi akan menolong kita dari sikap superior yang angkuh dengan segala keserakahan yang tak terkendali untuk memperkosa sumber daya alam. Sebaliknya ia akan menolong kita mengambil sikap moral dan etis dalam memelihara, menata, dan melestarikan lingkungan hidup, bukan hanya demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia saja, tetapi juga keutuhan ciptaan. Dengan teologi rekonsiliasi ini kita dimungkinkan menemukan kembali pengertian keterikatan dan keterkaitan kita manusia dengan sesama makhluk dan mengembangkan mentalitas baru yang menggantikan mentalitas dominasi. Ini berarti mentalitas arogansi diganti dengan mentalitas pemeliharaan; mentalitas arogansi diganti dengan mentalitas solidaritas, sikap bersahabat dan bersetiakawan.

Secara praktis, maka sikap, kelakuan dan gaya hidup orang Kristen dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai berikut: *Pertama,* mengembalikan kepada alam apa yang telah kita rampas dari padanya. Contoh konkretnya adalah pohon yang ditebang diganti dengan menanam tanaman baru. *Kedua,* menghentikan, paling tidak menggunakan secara sangat hemat dan bertanggungjawab atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan tidak melampaui kemampuan kenaikan sumber-sumber lain yang dapat dihasilkan oleh teknologi. *Ketiga,* turut bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara agar kadar pencemaran tetap berada di bawah kemampuan daya serap ekosistem. *Keempat,* memelihara dan menjaga agar jumlah penduduk tidak melebihi kapasitas bumi yang dihuni. *Kelima,* menyadarkan diri sendiri

dan seluruh umat bahwa manusia hidup di bumi ini tidak sendiri. Kita hidup bersama-sama makhluk lainnya, seperti hewan, tumbuhan, dan lainnya. Tanpa makhluk lain manusia tidak bisa hidup. Konsekuensinya bahwa kita tidak hanya prihatin terhadap kehidupan yang berkemanusiaan, tetapi juga mengembangkan suatu sikap yang berkemakhlukan. *Keenam*, mengupayakan keserasian antara teknologi, kepentingan manusia dan integritas ekosistem.

Sebagai akibat dari kara perdamaian di dalam Yesus Kristus, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus itu dinyatakan sebagai "ciptaan baru":

"Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristustelah mendamaikan kita dengan diri-Nya yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami" (Korintus 5: 17-18).

Sebagai ciptaan baru, insan Kristen itu terpanggil untuk menggunakan setiap peluang, kesempatan dan kemungkinan untuk terlibat dalam proses penciptaan bersama (joint creation)yang terarah dan tertuju kepada pemulihan dan keutuhan ciptaan. Kita diminta untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dalam seluruh karya kita. Dan itu arus dimulai dari hal-hal yang kecil. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kita agar mampu setia dalam perkara-perkara yang keil agar mampu bertanggungjawab dalam hal-hal besar:

> *"Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar".* (Lucas 16: 10)

Teknologi, Teologi, dan Ekologi

Pertambahan penduduk akan mendorong eksploitasi berlebihan sehingga merugikan unsu-unsur habitat, bioma dalam ekosistem; kemudian stabilitas lingkungan terganggu, menjadi goncang dan pada akhirnya penduduk harus meninggalkan daerah yang bersangkutan.

Overeksploitasi itu mula-mula dimaksudkan untuk memeras sumber daya alam sebanyak-banyaknya untuk memperpanjang kehidupan. Sumber

daya alam sebenarnya tidak selalu berupa sarana untuk makan. Zelinsky mendefinisikan "sumber daya alam" sebagai setiap bahan dan setiap sifat-sifat fisis suatu tempatnya, bahkan setiap kemungkinan fisiologis dan biologis yang tersembunyi di dalam tanah, air dan udara serta hewan dan tumbuh-tumbuhan yang tersembunyi di suatu wilayah. Di samping itu masih dihitung *Resources* juga, nilai suatu daerah untuk transportasi, perniagaan, pariwisata, rekreasi dan strategi militer.[10]

Krisis ekologis dunia makin dirasakan setelah terbit buku Laporan Club Roma yang isisnya mengajak kerja sama mendorong untuk mengatasi bencana yang makin mencekik ini.[11] Konferensi lingkungan Hidup Manusia di Stockhholm, 1972 ikut menyadarkan bangsa-bangsa akan krisis tersebut. Kemudian juga disusul dengan diterbitkannya *Ensiklik Laudato Si'* sebagai ucapan syukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi, dan sebagai ungkapan rasa hormat pada Paus Franciskus yang mengundang semua manusia kepada suatu dialog tentang masa depan rumah kita bersama.[12]

Negara berkembang pun segera mengetahui masalah ekologis yang dekat karena kesalahan pengelolaan alam juga menentang berbagai usaha negara industri maju untuk membuang sampah industri secara sembarangan yang berdampak pada pencemaran lingkungan sekitar. Ahli sejarah budaya Prof. Lynn Whits dari Universitas California menuduh agama Kristen sebagai dalang bobroknya lingkungan karena perintah agama tersebut berupaya menaklukkan bumi yang kemudian menjadi praktek perampokan dan pengurasan sumber daya alam. [13]

Dr. Douglas King, tetikus di lingkungan Universitas Satya Wacana menulis sehubungan masalah ekologi dan teknologi, sebagai berikut; teknologi memandang dunia dalam bagian-bagiannya (berfikir Barat), sedang ekologi

[10]Wilbur Zelinsky, *Inleiding tot de bevolkingageografie,* Spectrum, Ultrecht/Antwerpen, 1969, dalam N. Daldjoeni dan A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan,* Bandung: Penerbit Alumni, 1979.

[11]Dennis Meadows. *The Limits to Growth: A Report for The Club Rome.* Universe Books, New York, 1972

[12]Paus Franciskus, *Ensiklik Laudoto Si' "Tentang Perawatan Rumah Kita Bersama",* terj. P. Martin Harun OFM, Jakarta: Obor Pustaka, 18 Juni 2015

[13] Lynn Whiten, *The Historical Roots Of Our Ecological Crisis,* dalam Garret de Bell, *The Inveromental Handbook,* Ballatine Book, Inc., New York, 1970, hlm. 12-26

memandang dunia sebagi keseluruhan (berfikir Timur). Teknologi melihat manusia sebagi penguasa alam, sedangkan ekologi mengejar 'harmoni alam' supaya ekosistem selamat.

Masing-masing tadi merupakan pandangan dunia yang mengandung sosial-religius; teknologi mementingkan panggilan manusia untuk menguasai dunia dan manusia dilihatnya sebagai makhluk tertinggi yang demi kepentingannya bumi harus dikelola. Ekologi pada satu sisi merendahkan manusia (hanya onderdil alam saja) tetapi segi lain menghargai keselarasannya dengan alam; ia melawan sikap eksploitatif manusia, dan sering bersikap monistis, pantheistis terhadap alam, bahkan menganggap seolah-olah alam itu setengah ilahi.[14]

Sebenarnya ekologi sebagi ilmu hanya menguraikan kondisi dan situasi dari ekosistem tetapi ia tak menyarankan apa-apa. Ekologi dan para pengabdinya memberikan informasi ekologis yang harus terus bertambah, sehingga kita yang menyaksikan 'krisis ekologis' di sekitar kita merasa diperingatkan oleh suatu 'imperatif ekologis'. Dari konstatasi[15] terhadap suatu ekologis yang serba pincang yaitu ahirnya terbitlah pada diri kita suatu kesadaran ekologis yang memuat keinginan untuk bertanggung jawab. Di sinilah terjadi suatu pemilihan etis.[16]

Untuk masa kini, membutuhkan suatu kebijaksanaan moril di dalam kita 'bergaul' dengan alam; campur tangan manusia ke dalam ekosistem pun dituntut untuk dimasukkan ke dalam etika yang sebelumnya kurang atau tidak diperhatikan. Di lingkungan Kristen pada tahun 1973 ada konferensi internasional bertempat di Bievres, Prancis, yang membicarakan krisis ekologis dengan sorotan iman Kristen; sebagai tema yang dipilihnya "Man: Gods Trustee In Creation" Dr. Pierre Ch. Marcel dalam kata pembukaannya berkata: "kanker ekologis di masa kini lahir dari spiral demografi, produksi/konsumsi, dan polusi,

[14]Lihat definisi-definisi yang kabur tentang agama dari Havelock Ellis (semacam keindahan dari kesatuan diri dengan alam dan Gilbert Murray (yang membawa manusia kepada kontak dengan kebesaran alam) sebagaimana dirilis oleh T.M Usman El Muhammady, *Kuliah Iman dan Islam,* Jakarta: Pustaka Agus Salim, 1962, hlm. 13

[15]Konstatasi menurut KBBI.online adalah perihal melihat aatu menetapkan gejala atau tanda dari suatu keadaan atau peristiwa.

[16] Daldjoeni, N dan A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan,* Bandung: Penerbit Alumni, 1979, hlm. 62

yang terasa membabibuta sedang merampok sumber daya alam. Terhadap ini ada sikap dari para sarjana yang optimistis.[17]

Optimisme biasanya berasal dari orang yang percaya bahwa manusia dapat mengendalikan polusi dan mampu menciptakan kegiatan-kegiatan penyembuhan. Krisis yang ada kini meliputi tiga bidang; krisis nilai-nilai, krisis *incoherence* (tanpa ujung pangkal; masyarakat yang impersonal mengakibatkan penghambatan pengaturan secara nasional dan internasional), dan krisis tanggungjawab. Katanya lanjut demikian: "Dalam menyadari krisis ekologis dan bergiat mengatasinya perlulah direnungkan, mandat apa dari Tuhan yang diterima manusia, serta respons apa yang diberikan manusia kepada kemanfaatan tadi. Manusia menurut Al-Kitab merupakan juru kuasa (*trustee*) terhadap ciptaan Tuhan. Mandat dari Tuhan berisikan mengisi dan memerintah bumi serta mengolahnya (perintah ke Bapa Adam yang kemudian diulang kepada Nabi Nuh sehabis bencana air bah).

Dr Jaues Ellul, sarjana Protestan Prancis melihat di dalam '*cultural mandate*' terdapat tiga hal: *menikmati, menaklukkan,* dan *mensucikan.* Dalam menguasai bumi dan seisinya, manusia wajib menikmati hasil-hasil ciptaan Tuhan. Artinya Tuhan yang menanam (menciptakan) sedang manusia yang mencicipi buah-buahannya (hasil ciptaan). Dari sanalah seharusnya manusia lewat penerapan ilmu dan teknologinya wajib menaklukkan bumi (alam raya) yang dalam hal ini menaklukkan sendiri diartikan sebagai memelihara dan mengelola demi kesejahteraannya. Maka dari itu manusia wajib mensucikan bumi dalam arti mengarahkan kepada kebaikan. Sedangkan dasar yang terakhir ini adalah pensucian hari *Sabbath*, oleh Allah sendiri setelah enam hari. Ia menciptakan bumi dengan segenap isisnya dan melihat bahwa semua itu baik adanya.

Di situlah letak perbedaan antara pandangan antropologi secara marxisme dan *alkitabiah*. Menurut Marx sendiri, esensi karya manusia adalah mentransformasikan alam, sedangkan menurut Alkitab lewat karyanya di bumi, manusia diberi keterbukaan ke arah Sang Pencipta, yakni relasi dengan Tuhannya.

[17] Pierre Ch. Marcel, "Opening adress", dalam *International Reformed Bulletin,* no. 5253 (winter-spring), Geneva, 1973, hlm. 2-3

Diperlukan Revolusi Perilaku atau Revolusi Ekologis?

Ketika jumlah manusia masih relatif sedikit, campur tangan manusia ke dalam ekosistem tak nampak merugikan. Karena lingkungan fisis dan biotis masing-masing mungkin memulihkan diri, yang disebut dengan melakukan daur ulang (*recycle).* Tetapi jika waktu daur ulang sempit, misalnya sawah dipaksa memberikan panen 4 kali setahun (bibit C4) tanpa jeda, hutan seluas 18 wilayah tropika atau sering disebut dengan hutan hujan tropis dituntut untuk menjamin keseimbangan hidrologis dan klimatologis Pulau Jawa, maka daya dukung (*carrying capasity)* dari lingkungan merosot dan manusia yang menghuninya menghadapi krisis ekologis.

Dunia kita yang dulunya hanya mengenal krisis di bidang politik, kemiskinan, dan pangan, kini mengenal krisis ekologis. Usaha penyembuhan krisis tersebut bukan hanya revolusi hijau, pengendalian jumlah manusia dan peningkatan teknologi pertanian, industri, kesehatan dan lainnya. Obat mujarabnya hanyalah revolusi perilaku manusia. Ini meliputi pembaharuan yang mendasar pada lembaga-lembaga politik dan ekonomi, dikombinasikan dengan penggunaan secara bijaksana, pengendalian jumlah penduduk yang etis dan persepsi baru tentang umat manusia di dalam alam.[18]

Karena revolusi perilaku ini harus merangkul semua relasi yang menyangkut manusia dengan sesama manusia dan lingkungan, maka revolusi tersebut dinamakan sebagai revolusi ekologis. Ada 3 unsur prinsipiil di dalam kita merespon masalah ekologi, yakni: *Pertama,* mengakui adanya ancaman dari bencana ekologis yang tak boleh dibiarkan; *Kedua,* merubah sikap dan nilai-nilai sebagai pendorong tindakan-tindakan yang drastis; *Ketiga,* menjabarkan konsensus baru itu ke dalam lembaga-lembaga dan program yang mampu dilaksanakan.

Kunci Etika Lingkungan

Untuk menjawab pertanyaan apakah yang dapat menjadi kunci dan etika lingkungan, terlebih dulu perlu menjawab pertanyaan lain yaitu: "Mandat apa

[18]John Holdren and Paul R. Ehrlich, *Global Ecology: Reading Towards a Rational Strategy for Man,* New Yor, 1971, page, 1-2

yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan Allah sejak dulu kala? Dan respons apa yang arus diberikan manusia terhadap mandat tersebut?

Sehubungan dengan hal di atas, patut kiranya diperhatikan apa yang dipidatokan oleh Dr. Ellul sarjana Prancis dalam konferensinya tentang iman dan lingkungan di Bievre pada tahun 1973, berikut isinya: "Mandat dari Tuhan kepada manusia supaya ia mengelola bumi telah diulang sehabis air bah melanda bumi dan ini diberikan kepada Nabi Nuh (Kejadian 9: 1-7). Mandat ini baik dinamakan mandat budaya (*cultural mandat*). Mandat tersebut berisikan tiga hal, *pertama*, menikmati bumi; *kedua,* menaklukkan bumi; dan *ketiga,* mensucikan bumi. Dalam menguasai bumi dan seisinya manusia wajib menikmati hasil ciptaan Tuhan. Tuhan yang menanam dan manusia yang diperkenankan mencicipi buah-buahannya. Manusia melalui penerapan aneka ilmu dan teknologinya wajib menaklukkan alam dalam arti memelihara dana mengelola, demi kesejahteraannya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk generasi yang akan datang. Akhirnya manusia wajib mensucikan bumi dalam arti mengarahkannya kepada kebaikan.

Bagaimanapun, alam perlu dipelihara oleh manusia entah sebagai wakil Tuhan, atau sebagai partner Tuhan, di dalam ia memelihara kelestarian hidup di bumi. Mengingat bahwa mandat budaya tadi mengandung tiga hal; menikmati, menaklukkan, dan mensucikan, maka etika lingkungan bertalian dengan itu pula dan ini haru nampak pada tingkah laku manusia dalam bidang-bidang yang erat hubungannya dengan masing-masing hal, yang secara berturut-turut adalah kesenian, ilmu pengetahuan dan tanggung jawab.[19]

Kesimpulan

Sebagai penutup, ingin kami kenalkan sikap Kristen yang ideal terhadap masalah ekologis sebagai berikut: Allah Sang Pencipta berdaulat di atas segala ciptaan-Nya dan segalanya mutlak tunduk kepada-Nya. Manusia yang istimewa diciptakan menurut citra-Nya sebagai pribadi yang mempunyai relasi ke atas

[19]Daldjoeni, N dan A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan,* Bandung: Penerbit Alumni, 1979, hlm. 46-47

terhadap Tuhan dan ke bawah dengan sesama ciptaan Tuhan lainnya (hewan dan tumbuh-tumbuhan). Setelah manusia jatuh dosa, perlakuannya terhadap alam memang menjadi jelek; atas dorongan nafsunya. Ia menempatkan dirinya sebagai pusat universum dan bernafsu mengeksploitasi ciptaan-ciptaan lain. Dengan penyelamatan oleh Sang Kristus, segalanya menjadi berubah, sikap manusia terhadap alam menjadi sejajar sebagaimana sikap pria terhadap wanita. Manusia Kristen pun wajib mendominasi alam semesta ini, akan tetapi dalam pengertian bahwa alam perlu dipelihara sebagai partner dalam rangka memelihara kelestarian hidup di bumi.

Ideal sekali apabila kita mengisi tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagai tahun kependudukan dengan mengintruksikan pendidikan kependudukan dan tidak melupakan masalah ekologis, yakni segala jenis bahaya polusi, sampah plastik, pembalakan liar, bahan bakar fosil, dan sebagainya dengan bahaya ledakan penduduk di tanah air kita.



DAFTAR PUSTAKA

Surat Apostolik Octogesima Advenies (HUT ke-80 Rerum Novarum; 14 Mei 1971), 21: AAS 63 (1971)

Pidato kepada FAO pada HUT ke-25 Lembaga tersebut (16 November 1970), 4: AAS 62 (1970)

Ensiklik Redemptor Hominis (Penebus Manusia; 4 Maret 1979), 15: ASS 71 (1979)

Ensiklik Centesium Annus (1 Mei 1991), 38: ASS 83 (1991), 841; (Ulang Tahun Keseratus), Jakarta: DokPen KWI, 1991

Yohannes Paulus II, Ensiklik Sollicituudo Rei Socialis (Keprihatinan Sosial; 30 Desember 19987), 34: AAS 80 (1988)

Piere Tielhard de Chardin, The Future of Man, Collins/Fontana Book, York/ london, 1973

Zelinsky, Wilbur, Inleiding tot de bevolkingageografie, Spectrum, Ultrecht/Antwerpen, 1969, dalam N. Daldjoeni dan A. Suyitno, Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan, Bandung: Penerbit Alumni, 1979.

Meadows, Dennis, The Limits to Growth: A Report for The Club Rome. Universe Books, New York, 1972

Paus Franciskus, Ensiklik Laudoto Si' "Tentang Perawatan Rumah Kita Bersama", terj. P. Martin Harun OFM, Jakarta: Obor Pustaka, 18 Juni 2015

Whiten, Lynn, The Historical Roots Of Our Ecological Crisis, dalam Garret de Bell, The Inveromental Handbook, Ballatine Book, Inc., New York, 1970

El Muhammady, Usman, Kuliah Iman dan Islam, Jakarta: Pustaka Agus Salim, 1962

Pierre Ch. Marcel, “Opening adress”, dalam International Reformed Bulletin, no. 5253 (winter-spring), Geneva, 1973

Holdren John and Paul R. Ehrlich, Global Ecology: Reading Towards a Rational Strategy for Man, New York, 1971



Ekologi dalam Kacamata Feminisme

Oleh: Salwa Nida

Abstrak

Tulisan ini berusaha memadukan antara ekologi dengan feminis. Ekologi sebagai kajian yang berorientasi pada alam, akan dipersatukan dengan feminis sebagai salah satu karakter yang cenderung tertanam dalam diri perempuan. Relasi keduanya sangatlah unik, dengan simbolisasi *Terra Matter,* yaitu bumi dalam wujud 'ibu yang agung', sedikit banyaknya akan memunculkan ideologi tersendiri bagi alam raya ini. Di samping itu, relasi antara keduanya telah memunculkan sebuah gerakan yang tanpa sadar telah memberi warna baru dalam kehidupan. Gerakan ekofeminisme ini merupakan bukti cinta kasih perempuan terhadap alamnya melalui tindakan yang keras dan tegas melawan kultur patriarki.

***Keynote**: Ekologi dan Feminisme*

Kajian ekologi pada hari ini terus menjadi perhatian khusus dalam menyikapi problematika lingkungan hidup. Ekologi merupakan ilmu antar disipliner (lintas ilmu) yang mempelajari tatanan kosmis di segala bidang dan taraf. Ekologi berusaha memberikan pengarahan bagi terintegrasinya manusia. Hal ini tak lain didasari dengan pemahaman struktur kosmos, khususnya di bumi kita.[1] Kosmos yang menjadi salah satu kajian ilmu dengan sebutan kosmologi, memiliki makna ilmu pengetahuan tentang

[1]Anton Bakker, 1995, *Kosmologi dan Ekologi*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 77.

alam atau dunia. Berangkat dari definisi tersebut, menurut Bakker terdapat keterkaitan antara kosmologi dan ekologi. Korelasi ini dilihat dari kandungan kajian ekologi yang mencakup banyak aspek. Menurut Bakker, ekologi tidak hanya mempelajari struktur alam dunia, ekologi juga turut menentukan norma-norma untuk memelihara dan mengembangkannya. Ekologi dengan kekutannya tidak mampu merealisasikan dan mengefektifkan norma-norma itu dalam tingkah laku manusia. Efektifitas norma tersebut hanya dapat dilakukan oleh para penguasa asalkan mereka meyakini adanya baik dan benar di dalamnya. Akan tetapi, ekologi dengan sendirinya berjuang mati-matian untuk meyakinkan individu dengan argumen-argumennya hingga muncullah keyakinan pribadi.

Bakker dalam bukunya kosmologi dan ekologi ini menjabarkan hubungan kosmologi dengan ekologi diawali dengan adanya arah ekologi dengan kosmologi filosofis yang sejalan. Arah yang sejalan ini dilihat dari kacamata normatif. Kosmologi mampu memberikan dukungan yang kuat bagi penentuan norma-norma untuk pelestarian dunia dilandasi dengan filsafat yang pada hakikatnya bersifat normatif. Selain itu, ekologi dalam arah tertentu dapat disebut kosmologi empiris. Namun demikian, kosmologi filosofi menjadi bagian dari suatu ekologi lengkap yang meliputi bagian empiris maupun filosofis.

Lain dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, alam dan manusia sebetulnya memiliki pola relasi saling merawat, penuh kasih sayang, saling mendukung, saling menunjang kehidupan untuk berkembang serta untuk hidup. Selain pola relasi juga terdapat pola mekanistik yang memiliki korelasi antara alam dan manusia dengan pola dominasi, penguasaan, penaklukan, eksploitasi, penuh persaingan untuk merebutnya dengan cara mengalahkan yang lain. Pola relasi yang terjalinpun bukan pola kompetisi *survival for the fittest*, yang mana pola yang kuat akan mengalahkan pola yang lemah. Begitupun pola destruktif menghancurkan, karena alam yang lain dianggap sebagai musuh maka sudah sepantasnya untuk dikuras nilai instrumental ekonomisnya. Pola seperti inilah yang disebut dengan anti ekologi dan anti lingkungan hidup.[2]

[2]A Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama F ricjof Capra,* 2014, Yogyakarta: PT Kanisius, hal 85

Pola ekologis pada hakikatnya memberi tempat bagi cara berfikir yang intuitis, holistis, nonlinear, sintesis. Cara pandang seperti ini akan memunculkan etika baru yaitu etika ekologi, *ecoethics* dengan nilai dan prinsip yang dijunjung tinggi semua manusia tanpa terkecuali, baik kepada sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya berupa rasa hormat terhadap keluhuran kehidupan itu sendiri. Memang pada awalnya manusia dikenal sebagai makhluk ekologis, makhluk alam. Karena manusia tidak dapat hidup tanpa ekosistem dan isi dari ekosistem tersebut. Dengan begitu manusia akan bergantung pada ekosistem dan isinya, sehingga akan menentukan kelangsungan, kehidupan, dan seluruh isinya.[3]

Manusia sebagai makhluk ekologis nyatanya juga berdampak pada identitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan alam, dan bahkan menyatu dengan alam serta tidak lebih. Kedekatan manusia dengan alam akan membentuk identitas manusia baik secara kultural maupun eksistensial. Dengan begitu menurut Paul Sephard dalam bahasanya, manusia mempunyai identitas yang sama bersama binatang. Identitas ekologis bersama ini kini sedang terancam karena globalisasi ataupun modernisasi. Oleh karena itu kita sedang diajak untuk merengkuh dan memulihkan kembali identitas ekologis yang hampir terancam oleh krisis ekologis global dewasa ini.[4]

Febriani mengutip dari bukunya Leenen yang berpendapat manusia merupakan bagian dari ekosistem dan manusialah yang mengelola dari sistem tersebut. Adapun kerusakan lingkungan merupakan pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan manusia yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan yang timbul juga termasuk akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupannya, tetapi manusia sendiri nyaris lupa bahwa ia bagian dari alam tersebut. Dengan begitu, manusia tidak hanya bertindak sebagai

[3]A Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama F ricjof Capra,* 2014, Yogyakarta: PT Kanisius, hal. 85-90

[4]Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama F Ricjof Capra*, 2014, Yogyakarta: PT Kanisius, hal. 92

penguasa, melainkan juga pengabdi. Melalui kekuasaan manusia atas alam, ia tidak bisa melepaskan ketergantungannya terhadap alam. [5]

Ungkapan Leenen ini tidak jauh dari apa yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an, yang mana mengkonsepkan sistem kekhalifahan di bumi. Penjelasan tersebut tercantum dalam surah Al-An'am [6]: 165 yang berbunyi[6]:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

> *Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Seperti halnya yang telah diungkapkan Leenen, Keraf pun berpandangan hampir sama. Seandainya manusia disebut makhluk sosial, ini berarti manusia hidup saling terpengaruh dan saling interaksi, saling terkait dengan makhluk hidup lainnya serta ekosistem yang ada di dalamnya. Manusia membutuhkan ekosistem yang lain untuk mempertahankan kelangsungan hidup serta eksistensinya sebagai manusia. Dengan kata lain eksistensi serta makna kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi ekosistem serta segala isinya, baik level biologis yang mendasar maupun level ekonomis dan kultural.[7]

Relasi Perempuan dan Alam sebagai Akar Gerakan Ekofeminisme

Dunia ketiga memberi pengertian baru bahwa perempuan dan alam memiliki hubungan erat melalui kreatifitasnya serta dalam memelihara kehidupan. Pada dasarnya bumi merupakan perwujudan dari "ibu pertiwi". Simbolisasi ini mengandaikan bumi sebagai sosok "ibu" yang penuh kasih sayang. Ia menjadi

---

[5]Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender: Dalam Perspektif Gender*, 2014, Bandung: PT. Mizan Pustaka, hal. 47-48

[6] Q.S al-An'am [6]:165

[7]A Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama F Ricjof Capra*, 2014, Yogyakarta: PT Kanisius, hal. 90-91

pelindung bagi apa saja yang ada di dalamnya termasuk manusia. Tak jauh dengan simbolisasi tersebut, berdasarkan pandangan kosmologi timur, bumi dipahami dengan prinsip feminin di mana terdapat hubungan dialektis dan *co-existence* yang saling melengkapi satu sama lainnya. Hubungan antara penyatuan dan perpecahan, penciptaan dan perusakan telah menjadi pergerakan dinamis serta siklus dari alam semesta.[8]

Istilah feminin yang telah dikenalkan oleh kosmologi timur ini juga memunculkan sebuah karakter feminin pula. Karakter feminin dipahami dengan karakter yang berhubungan dengan sifat keindahan. Karakter posistif dari karakter ini memiliki kriteria mengalah pada yang lebih tinggi yaitu akal dan ruh, maka karakter ini berhubungan dan berdasarkan pertimbangan hati (intuisi/emosi). Oleh karena itu, berbagai karakter manusia yang berhubungan dengan perasaan kasih sayang, submisif, keteraturan dan kreativitas masuk dalam kategori karakter feminin positif. Sedangkan karakter feminin yang mengandung karakter negatif adalah karakter mengalah pada yang lebih rendah, yaitu hawa nafsu. Maka, berbagai karakter yang mengarah pada emosi negatif seperti subyektif dan pasif masuk dalam kategori feminin negatif.[9]

Prinsip feminin menjadi kategori penentang terhadap penggunaan cara tanpa kekerasan untuk memandang dunia, dalam bertindak juga menjunjung tinggi cara memelihara keterkaitan dan keberagaman alam. Berpegang pada prinsip feminin ini memungkinkan peralihan ekologis dari kekerasan ke ekologi tanpa kekerasan, dari perusakan menuju kreatifitas, dari proses anti kehidupan ke proses yang memberi kehidupan, dari keseragaman menuju keanekaragaman, serta dari memilah-memilih dan reduksionisme ke keutuhan dan kompleksitas.[10]

Pembahasan tentang konsep feminin kali ini akan seimbang apabila dibarengi dengan konsep maskulin. Seperti halnya membahas gender, maka

---

[8]Annisa Innal Fitri, Idil Akbar, 2017, *Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen*, CosmoGov , Vol. 3, No. 1, hal. 83

[9]Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender: Dalam Perspektif Gender, 2014, Bandung: PT. Mizan Pustaka, hal. 167

[10]Vandana Shiva, 1997, Bebas dari Pembangunan, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 19-20

akan semakin komprehensif jika ditelaah dari dua sisi yaitu laki-laki dan perempuan. Dikutip oleh Febriani dari kamus Oxford, kata maskulin berasal dari bahasa latin *masculinus*, dari *masculus* yang bermakna laki-laki. Dijelaskan, kata *masculine* merupakan bentuk *noun* (kata benda) dan *adjective* (kata sifat). Dalam bentuk *noun* (kata benda), *masculine* bermakna jenis kelamin laki-laki atau gender, sedangkan dalam bentuk adjective, kata *masculine* memiliki makna kualitas atau penampilan yang secara tradisi dikaitkan dengan laki-laki: berkaitan dengan laki-laki: jantan, dan dalam *grammar* (tata bahasa) kata *masculine* dimaknai: yang menunjukkan jenis kelamin kata benda dan kata sifat, biasanya dianggap sebagai laki-laki. Sedangkan kata feminin juga berasal dari bahasa latin, yaitu *femininus*, dari kata *femina* yang bermakna perempuan, kata *feminin* dalam bentuk *adjective* dimaknai: memiliki kualitas atau penampilan yang yang biasanya secara tradisisonal dihubungkan dengan perempuan, terutama kelembutan dan kecantikan. Berkaitan dengan betina. Kemudian dalam bentuk *grammar*, kata *feminine* dimaknai: menunjukkan jenis kelamin kata benda dan kata sifat, biasanya secara tradisional dianggap sebagai perempuan.[11]

Febriani juga mengambil pendapat dari Sachiko Murata yang mengidentifikasi perbedaan karakter feminin dan maskulin. Menurutnya, dalam Al-Qur'an telah memberikan pernyataan terhadap perbedaan karakter maskulin dan feminin. Dalam Al-Qur'an karakter maskulin memiliki ciri khas yang aktif memberi, sedangkan karakter feminin bercirikan pasif, menerima, berserah diri. Menurut Murata, kedua karakter ini terdapat di dalam setiap diri manusia.[12]

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Murata, Shiva dan Harding menganggap maskulinitas dan feminitas sebagai dua hal yang kontradiktif. Feminitas merupakan ideologi yang bercirikan kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. Sedangkan maskulinitas berkarakter persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan. Prinsip maskulinitas tidak dapat dipatenkan

[11]Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender: Dalam Perspektif Gender, 2014, Bandung: PT. Mizan Pustaka, hal. 126

[12]Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender: Dalam Perspektif Gender*, 2014, Bandung: PT. Mizan Pustaka, hal. 126

kepada laki-laki. Begitupun feminitas yang tidak dapat dipatenkan kepada seorang perempuan.[13]

Selanjutnya Shiva dalam bukunya menjelaskan adanya hubungan erat antara perempuan dengan alam. Hal ini ia tunjukkan dengan mencontohkan perempuan di India. Perempuan India memiliki kedekatan yang erat dengan alam, dalam imajinasi maupun dalam praktiknya. Pada suatu sisi, alam disimbolkan sebagai pengejawantahan dari sisi feminin yang dimiliki perempuan, yang mana sifat feminin ini menuntut untuk menciptakan kehidupan dan menyediakan makanan.

Prinsip feminin menjadi kategori penentang terhadap penggunaan cara tanpa kekerasan untuk memandang dunia. Adapun dalam bertindak juga menjunjung tinggi cara memelihara keterkaitan dan keberagaman alam. Berpegang pada prinsip feminin ini memungkinkan peralihan ekologis dari kekerasan ke ekologi tanpa kekerasan, dari perusakan menuju kreatifitas, dari proses anti kehidupan ke proses yang memberi kehidupan, dari keseragaman menuju keanekaragaman, serta dari memilah-memilih dan reduksionisme ke keutuhan dan kompleksitas.[14]

Konsep Ekofeminisme dan Modernitas Berbasis Pembangunan

Perempuan digusur dari kegiatan produktifnya demi pembangunan yang makin meluas, proyek-proyek pembangunan menyita serta merusak sumber daya yang menjadi kebutuhan pokok bagi produksi pangan dan untuk kelangsungan hidup. Pembangunan telah menghancurkan produktivitas perempuan, mengambil alih pengelolaan dan pengendalian lahan, air, hutan dari tangan perempuan. Selain itu juga merusak ekologi sistem lahan, air, dan tumbuh-tumbuhan sehingga menurunkan produktivitas dan daya alam untuk memulihkan diri. Penindasan gender dan patriarki dianggap sebagai penindasan yang tertua, namun kolaborasi dari keduanya yang terbaru muncul dengan lebih kejam, yaitu melalui proyek pembangunan.[15]

[13]Trisakti Handayani & Sugiarti, 2008, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press, hal. 100

[14]Vandana shiva, 1997, *Bebas dari Pembangunan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 19-20

[15]Vandana Shiva, 1997, Bebas dari Pembangunan, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 4

Bagi Shiva pada dasarnya yang disebut pembangunan saat ini merupakan pembangunan yang timpang dan berlandaskan pada penerapan atau peningkatan dominasi laki-laki atas alam dan perempuan. Dalam pembangunan ini alam dan perempuan dipandang “yang lain” yaitu unsur non-jiwa yang pasif. Kegiatan produktivitas dan kreativitas yang menjadi ciri prinsip feminin, sebagai sifat alam dan perempuan diambil alih dan diubah dijadikan ciri-ciri milik laki-laki semata. Alam dan perempuan diubah menjadi makhluk pasif untuk digantikan dan tindas guna memenuhi nafsu yang tidak terkendali dan tidak dapat dikendalikan kaum laki-laki yang terasing dari alam. Dari pencipta dan penopang hidup, alam dan perempuan diubah, dalam pola pembangunan yang timpang, terpecah-pecah dan anti kehidupan, menjadi “sumber daya”.[16]

Ekofeminisme sebagai salah satu aliran feminis yang memiliki karakteristik sama dengan gerakan feminis lainnya yaitu, menentang segala bentuk penindasan terhadap perempuan akibat sistem patriarki. Berbeda dengan aliran feminisme lainnya, ekofeminisme menawarkan konsepsi yang paling luas dan paling menuntut atas hubungan diri (manusia) dengan lainnya. Maksudnya, aliran ini memahami hubungan ini bukan sekedar antar sesama manusia melainkan dengan dunia lainnya yakni, binatang bahkan tumbuhan.[17]

Ekofeminisme merupakan salah satu jenis gerakan dan pemikiran sosial yang mengaitkan masalah ekologi dengan perempuan. Francoide D’Eaubonne melalui bukunya yang berjudul *Le Feminism Ou La Mort* (feminisme dan kematian) yang terbit pertama kali tahun 1974 telah memperkenalkan eufeminisme. Buku tersebut menjelaskan adanya hubungan antara penindasan terhadap alam dengan penindasan terhadap perempuan.

Menurut Rosmerie Putnam Tong, ekofeminisme terbagi atas ekofeminisme alam, ekofeminisme spiritualis dan ekofenisme sosialis. Ekofeminisme alam sendiri dikembangkan oleh Mary Daly melalui bukunya dan Susan Griffit dengan judul *Woman and Nature*. Selanjutnya ekofeminisme spiritualis`

[16]Vandana Shiva, 1997, Bebas dari Pembangunan, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 8

[17]Wiyatmi Dkk, 2017, *Ekofeminisme: Kritik Sastra Berwawasan Ekologis dan Feminis*, Yogyakarta:Cantrik Pustaka, hal. 5

dikembangkan oleh Starhawk dan Charles Spretnak. Sedangkan ekofeminsme sosialis dikembangkan oleh Dorothy Dinnersaein, Karen J. Warren, Maria Mies dan Vandana Shiva.[18]

Beberapa argumen yang disampaikan oleh Shiva sebagai salah satu tokoh dari ekofeminisme sosialis ialah menentang keras adanya kapitalis barat. Bahkan dalam sebuah penelitian Shiva dan Maria Mies mengamati keadaan orang lain yang teralienasi dari segala sesuatu yaitu produk dari kerja mereka karena patriarki kapitalis. Menurut keduanya perempuan hendaknya memotivasi dan bekerja sama melawan patriarki kapitalis dan isme-isme lainnya. Perempuan juga harus memimpin perjuangan guna menyelamatkan dasar-dasar kehidupan dimanapun dan kapanpun kepentingan militer dan atau industrial mengancamnya. Keduanya juga berpendapat bahwa bioteknologi yang baru berupaya untuk mengontrol "alam" dan teknologi reproduksi yang baru berusaha untuk mengontrol kesuburan perempuan, dan ini mamiliki dampak sosial yang sangat buruk.[19]

Ekofeminis banyak mengkritik paradigma pembangunan barat, mereka menolak homogenisasi yang dihasilkan pasar dunia dan produksi kapitalis. Ekofeminisme yang berikutnya mengkritik dualisme antara suprastruktur atau kebudayaan dan ekonomi atau basis. Urgensi dalam mempertahankan hidup di alam ini diperlukan pemeliharaan bentuk kehidupan yang beragam dan kebudayaan manusia.[20]

Menurut Tong yang dikutip oleh Shinta menyatakan konteks penyelesaian permasalahan ekologi harus menyertakan perspektif feminis karena apabila karakter feminis luntur akan berbanding lurus dengan meningkatnya kerusakan alam. Oleh karena itu manakala karakter feminis tidak menjadi pisau untuk menebas kerusakan lingkungan maka alam akan semakin rusak.[21]

[18] Wiyatmi Dkk, 2017, *Ekofeminisme: Kritik Sastra Berwawasan Ekologis dan Feminis*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, hal. 8-9

[19] Wiyatmi dkk, 2017, *Ekofeminisme: Kritik Sastra Berwawasan Ekologis dan Feminis*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, hal. 10-11

[20] Ema Khotimah, *Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia,* Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume. XXII, No. 3 Juli – September, hal. 346

[21] Shinta Nurani, *Hermeneutika Qur'an Ekofeminis: Upaya Mewujudkan Etika Ekologi Al-Qur'an*

Shiva juga menambahkan, cara-cara ekologis untuk mengetahui alam haruslah bersifat partisipatif. Alam sendiri adalah eksperimen pengalaman dan perempuan sebagai ahli kehutanan, pertanian dan pengelola sumber air, serta ilmuwan alami tradisional. Pengetahuan mereka bersifat ekologis dan majemuk, mencerminkan keanekaragaman ekosistem alam dan budaya yang dikembangkan kehidupan berdasarkan alam.[22]

Perempuan dalam Lingkaran Prinsip Feminin

Gerakan-gerakan ekologi merupakan gerakan politik bagi tatanan dunia tanpa kekerasan, dimana pelestarian alam bertujuan untuk mempertahankan pilihan-pilihan bagi kelangsungan hidup. Gerakan-gerakan seperti ini kecil namun sedanag tumbuh. Gerakan ini juga bersifat lokal tetapi dampaknya non-lokal. Gerakan-gerakan ini menuntut hak atas kelangsungan hidup tapi tuntutan minimum ini berkaitan dengan kelangsungan hidup lingkup global. Jika dunia tidak mengalami restrukturisasi secara ekologis, maka dampak terhadap kelangsungan hidup manusia bisa terancam.[23]

1. Perempuan Chipko

   Shiva dalam bukunya "Bebas dari Pembangunan" menceritakan keberadaan gerakan Chipko. Gerakan Chipko merupakan salah satu gerakan perempuan berbasis aksi lingkungan yang telah ada sebelum dasawarsa perempuan PBB, juga konferensi lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1972. Sekitar tiga ratus tahun yang lalu, di Rajasthan, lebih dari 300 anggota masyarakat Binshoi yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Amrita Devi. Mereka semua mengorbankan kehidupan mereka untuk menyelamatkan pohon-pohon *khejri* yang dikeramatkan, dengan memeluk pohon-pohon tersebut. Kejadian ini yang mengawali pencatatan sejarah Chipko.

   Menurut sumber lain juga turut dijelaskan bahwa perempuan Chipko di India sendiri dilakukan komunitas masyarakat adat bernama Tehri Garhwa. Komunitas Garhwa menganggap hutan sebagai ibu, karena

yang Berwawasan Gender, RELIGIA, Vol. 20, No. 1, 2017 , hal. 21-22

[22]Vandana Shiva, 1997, *Bebas dari Pembangunan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 54

[23]Vandana Shiva, 1997, *Bebas dari Pembangunan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 48

hutan merupakan tempat menyediakan air, bercocok tanam, penyedia bahan bangunan, maupun penyedia sumber makanan bagi masyarakat sehingga harus dijaga kelestariannya supaya hutan terus bisa memberikan sumber penghidupan bagi komunitas masyarakat tersebut. Hutan di pegunungan Himalaya terkenal menjadi pengahsil kayu terbaik di pasar taraf Internasional, sehingga memicu India untuk melakukan deforestasi hutan tersebut. Komunitas masyarakat ini menentang praktik deforestasi hutan dengan cara memeluk pohon sebagai bentuk protes atas praktik pembalakan liar yang dilegalkan negara untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor kayu industri.

Perkembangan selanjutnya, gerakan resistensi Chipko tidak lagi situasional dan lokal seperti yang dilakukan gerakan masyarakat Garhwa di kaki Pegunungan Himalaya, negara bagian Uttar Pradesh. Chipko menyebar ke berbagai negara bagian India seperti halnya Himachal Pradesh di utara, Karnataka di selatan, Rajasthan di barat, Bihar di timur, dan Vindhyas di India Tengah. Banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh aktivis Chipko akibat tindakan represif dari aparatur negara yang menganggap Chipko sebagai gerakan yang berkedok komunis dan berseberangan dengan liberalisme. Kasus kekerasan aktivis Chipko ini diberitakan di berbagai media global, sehingga berhasil menekan pemerintah India untuk menghentikan kekerasan tersebut. Alhasil, resistensi Chipko berhasil mendapatkan pengakuan pemerintah India dengan melakukan moratorium deforestasi hutan yang dikelola masyarakat adat.[24]

2. Perempuan Navdanya

Shiva sendiri juga membantu gerakan perempuan yang disebut Navdanya. Gerakan ini fokus dalam mempromosikan pertanian organik yang membela hak-hak petani dan menjaga biodiversitas. Shiva ingin menunjukkan bahwa perempuan mampu hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya di alam tanpa harus mengadakan eksploitasi,

[24]https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4864/4412, diakses pada 12 Desember 2018 pukul 20.15

dominasi serta superioritas di atas alam seperti halnya yang ditunjukkan oleh manusia dengan kultur patriarki saat ini. Alam telah memenuhi segalanya untuk kebutuhan hidup manusia seperti air, dan makanan. Atas dasar pemahaman tersebut, Shiva ingin mengangkat gerakan Navdanya di dalam menjaga keberlanjutan alam dan mahkluk hidup dalam sebuah harmoni, sehingga tidak ada lagi komunitas tertentu yang lebih berkuasa atas pihak lain. Cara yang ditempuh Shiva berupa pemberdayaan terhadap komunitas dari seluruh religi, seks, kelompok, petani marginal, perempuan dan anak-anak terbelakang, dan siapapun yang membutuhkan, untuk memastikan bahwa mereka hidup dalam lingkungan yang sehat.[25]

Kesimpulan

Ekofeminisme telah memberikan corak baru dalam paradigma terhadap alam. Alam telah menyediakan segala kebutuhan bagi manusia, akan tetapi sikap yang semena-mena dari manusia tidak pernah menghiraukan alam, sehingga krisis ekologi itu muncul sebagai akibat dari tindakan manusia. Krisis ekologi ini juga disinyalir dari bangunan kultur patriarki yang menggeser perempuan serta alam. Padahal dalam konsep ekofeminis sendiri, perempuan memiliki ikatan batin dengan alam yang dapat ditunjukkan melalui tindakannya. Dengan demikian pembangunan yang diusung dengan kedok sebagai kemajuan, hanya berimbas terhadap tersakitinya alam. Perempuan dengan tindakan nyatanya mampu mengorganisir sebuah gerakan demi mempertahankan alam dan mempertahan kelangsungan hidup manusia selanjutnya.

[25]ib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57107-Devi Christiani Zega, diakses pada 12 Desember 2018 pukul 20.15

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Bakker, Anton. 1995. *Kosmologi dan Ekologi*, Yogyakarta: Kanisius

Keraf, A Sonny. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama F ricjof Capra,* Yogyakarta: PT Kanisius

Febriani, Nur Arfiyah. 2014. *Ekologi Berwawasan Gender: Dalam Perspektif Gender*, Bandung: PT. Mizan Pustaka

Shiva, Vandana. 1997. Bebas dari Pembangunan, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia

Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press

Wiyatmi, Dkk. 2017. *Ekofeminisme: Kritik Sastra Berwawasan Ekologis dan Feminis*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka

Referensi Jurnal:

Fitri, Annisa Innal, & Idil Akbar. 2017. *Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen*, CosmoGov , Vol. 3, No. 1

Khotimah, Ema. *Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia,* Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume. XXII, No. 3 Juli – September

Nurani, Shinta. 2017. *Hermeneutika Qur'an Ekofeminis: Upaya Mewujudkan Etika Ekologi Al-Qur'an yang Berwawasan Gender*, RELIGIA, Vol. 20, No. 1

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4864/4412, diakses pada 12 Desember 2018 pukul 20.15

ib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57107-Devi Christiani Zega, diakses pada 12 Desember 2018 pukul 20.15

Mahatma Gandhi: Ajaran Ahimsa dan Satyagraha dalam Menjaga Lingkungan

Oleh: Mukhammad Ainul Yaqin

Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Yang merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila hubungan timbal balik tersebut berjalan secara selaras dan menjadi satu kesatuan yang saling mmempengaruhi, maka terbentuklah suatu sistem ekologi yang lazim yang disebut ekosistem. Di antara komponen-komponen ekosistem, manusia adalah yang paling dominan dan menentukan. Manusia dengan segala kelebihannya mampu untuk mengubah atau mempengaruhi lingkungannya. Hanya saja lingkungan mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menerima perubahan-perubahan tersebut.

Ajaran agama sesungguhnya telah mensyiarkan tentang betapa pentingnya umat manusia menjaga lingkungannya. Hal ini tercermin melalui sikap Mahatma Gandhi dalam memperjuangkan lingkungannya melalui nilai religuisitas ajaran Hindu. Semua ajaran tersebut bermuara pada kosmis tri tunggal yang terpendam dalam jiwa seorang Gandhi. Terutama ajaran Satyagraha, dan Ahimsa (Cinta kasih dan anti kekerasan) yang menjadi pelopor Gandhi dan masyarakatnya merebut kembali kemerdekaan negara India.

***Keynote**: Lingkungan, Ajaran Hindu, Mahatma Gandhi dalam Ahimsa dan Satyagraha.*

Permasalahan lingkungan semakin hari kian bertambah kompleks dan memerlukan perhatian yang cukup serius. Secara global permasalahan lingkungan dihadapkan pada tiga permasalahan: *pertama,* degradasi terhadap sumber daya alam; *kedua,* pencemaran; *ketiga,* pemanasan global. Degradasi terhadap sumber daya alam, merupakan salah satu permasalahan pelik, karena manusia pasti memerlukan eksistensi sumber daya alam sebagai penunjang kehidupannya. Namun berdasarkan laporan ilmiah terakhir, eksistensi sumber daya alam tersebut apabila tidak rusak, maka semakin hari semakin bertambah menyusut dan menipis. *Millenium Ecosystem Assasement* (MEA 2005) menyimpulkan telah terjadi penurunan terhadap tingkat kualitas mauppun kuantitas ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai penyangga kehidupan. Laporan tersebut menyebutkan pula, dalam 50 tahun lagi kerusakan tersebut akan semakin meningkat. Penilaian status terakhir tentang keanekaragaman hayati yang mengacu pada komitmen Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), menyimpulkan pula kesan yang memprihatinkan. Bahwa pemerintah di seluruh dunia dinilai gagal memenuhi target penurunan dan pencegahan kepunahan keanekaragaman hayati tahun 2010.[1]

Sementara itu, kondisi lingkungan dibebani dengan banyaknya kasus pencemaran lingkungan, baik akibat eksploitasi maupun limbah produksi. Sedangkan pemanasan global, telah menjadi suatu keniscayaan setelah *Intergovermental Panel on Climate Change* (IPCC) memberikan laporan bahwa pemanasan global merupakan dampak dari perilaku manusia.[2]

Kompleksitas persoalan di atas, memicu berbagai pihak untuk turut serta aktif dalam melestarikan alam dan adanya upaya untuk memberikan sebuah penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya alam, pengurangan pencemaran, serta melakukan mitigasi[3] dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun banyak yang mengatakan upaya tersebut tidaklah cukup. Harus dibarengi dengan memasukkan doktrin-doktrin agama di

[1]Butchart *et al.* 2010. *Global Biodeversity:Indicators of Recent Declines.* Sciencer:328 (5982): 1164-1168.

[2] Intergovermental Panel on Climate Change (IPPC). 2007. *Summary for Climate Change: The Physical Science Basis.* New York: Cambridge University Press.

[3]Menurut KBBI Online arti mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi dampak bencana.

dalamnya. Karena hal demikian selaras dengan pandangan agama yang mana mengajarkan tentang pemahaman dan harapan agama tentang hidup damai bersandingan dengan alam, yang juga sama-sama ciptaan-Nya.

Menurut Tucker dan Grim, agama menjadi sebuah pandangan dunia yang dapat mempengaruhi sikap manusia terhadap alam dan menjadi suatu komponen penting yang memberikan petunjuk untuk bertindak. Sedang menurut White mengatakan bahwa pandangan manusia terhadap lingkungan ditentukan oleh agama. Selain itu agama menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan dalam diri manusia terhadap lingkungan selain tiga faktor yang lain: *pertama,* penegakan hukum; *kedua,* pendidikan; dan *ketiga,* kekuatan pasar faktor ekonomi.

Oleh karena itu sangat, sangat diperlukan pengetahuan tentang konsep-konsep bagaimana agama dapat mendorong pada pengaturan kehidupan manusia sehari-hari dalam upaya mengimplementasikan pengelolaan konservasi sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama.

Perjumpaan Agama dengan Lingkungan

Sudah ada upaya internasional dari berbagai agama besar di dunia dalam mengingatkan seluruh umat manusia agar melestarikan fungsi lingkungan. Dimulai pada tahun 1986, tatkala lima agama besar di dunia, yaitu Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Judaisme (agama Yahudi) berkumpul di Assisi Itali untuk merumuskan peranan agama dalam melestarikan alam. Pertemuan yang diprakarsai oleh Pangeran Phillip dari Inggris, sebagai Presiden Dana Dunia untuk Kehidupan Liar, *Word Wildlife Fund* (WWF) itu mengambil tempat di Assisi Itali. Tempat ini sengaja dipilih karena ini merupakan tempat lahir St. Francis, Santo Katholik yang merupakan pendukung dan praktisi ekologi. Para pemimpin dari kelima agama besar di dunia tersebut bertemu untuk mendiskusikan bagaimana agama dapat membantu meyelamatkan dunia alami.

Pertemuan tersebut berlanjut di Kastil Windsor Inggris pada awal tahun 1995, berupa pertemuan puncak pimimpin agama yang membahas Agama

dan Sistem Konservasi. Selanjutnya pertemuan ini dilanjutkan di Ohito Jepang pada bulan April 1995, kali ini yang berkumpul adalah wakil-wakil dari 9 (sembilan) agama besar di dunia. Dari pertemuan tersebut lahirlah apa yang disebut Deklarasi Ohito, suatu deklarasi hasil Konferensi Internasional tentang agama, lahan, dan konservasi. Deklarasi Ohito ini didahului oleh pengantar yang menggambarkan pernyataan keprihatinan atas kondisi alam dunia saat ini. Sistem kemanusiaan terus mengalami kerusakan dan pembusukan sebagai akibat dari tekanan militerisme, peperangan, terorisme, pergerakan pengungsi, kekerasan terhadap hak asasi, pemilik modal yang rakus, maupun karena nafsu untuk menguasai ekonomi maupun politik kekuasaan. Di samping itu sistem biologis dan sumber daya mengalami kerusakan karena menipisnya sumber daya, fragmentasi, dan pencemaran dari sistem alami. Sebagai orang-orang yang beriman, peserta konferensi merasa terpanggil untuk menanggapi masalah lingkungan ini.[4]

Mereka menyadari bahwa umat manusia secara bersama-sama harus menghadapi masalah tersebut. Rekomendasi hasil konferensi tersebut diklarifikasikan menjadi dua. *Pertama,* berupa prinsip-prinsip spiritual (*spiritual principles*) dalam mengelola alam semesta, sebagai berikut:

a.) Panggilan iman agama dan tradisi mewajibkan kita untuk memelihara alam.
b.) Bagi orang-orang yang beriman (*people of faith*), mempertahankan dan melanjutkan kehidupan sistem lingkungan adalah tanggung jawab religius.
c.) Pemahaman terhadap lingkungan akan meningkat bila manusia mau belajar dari teladan yang diberikan oleh para nabi dan dari alam itu sendiri.
d.) Orang-orang yang beriman harus memberikan penekanan teradap diwujudkannya kualitas hidup yang lebih tinggi dengan mengacu pada standar kehidupan yang lebih tinggi, dan menyadari bahwa kerakusan dan ketamakan adalah akar dari kerusakan lingkungan dan kehinaan manusia
e.) Orang-orang yang beriman harus terlibat dalam pelestarian lingkungan dan proses pembangunan.

[4] Ketut Prasetyo dan Hariyanto, 2018, *Pendidikan Lingkungan Hidup,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 74

Rekomendasi *kedua* terkait dengan program aksi yang direkomendasikan (*Recommended Courses of Action*) pada saat deklarasi Ohito memanggil para pemimpin agama dan masyarakat untuk melakukan hal-hal berikut:

a.) Menekankan isu-isu lingkungan dalam kuliah/khotbah agama: iman harus ditafsirkan dan dipraktikkan dengan landasan kesadaran bahwa alam semesta itu penting.

b.) Berkomitmen terhadap prkatik-praktik berkelanjutan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan mereka secara berkelanjutan.

c.) Mempromosikan pendidikan lingkungan, terutama di antara para remaja dan anak-anak.

d.) Mengejar terciptanya perdamaian sebagai komponen penting bagi tindakan konservasi/pelestarian.

e.) Mengambil tantangan untuk melembagakan perdagangan yang adil tanpa eksploitasi finansial, ekonomi, dan politik.[5]

Konstruksi Sosial Terhadap Pandangan Agama

Berbagai kasus kerusakan alam saat ini marak terjadi. Kerusakan alam terjadi karena faktor manusia yang menganggap ia sebagai *antroposentrisme* yaitu sebuah paham yang memandng manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta[6]. Kerusakan alam bisa melalui pencemaran lingkungan (baik air, udara, dan darat) kebakaran hutan, hingga penggundulan hutan. Dari kasus kerusakan alam dan krisis ekologis, sekitar tahun 1972 muncul etika lingkungan sebagai kekuatan mengatasi krisis ekologi.[7]

Nilai etika lingkungan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat, termasuk melalui kehidupan beragama. Weber mengatakan nilai ajaran agama digunakan sebagai pendorong tingkah laku manusia sehingga manusia melakukan pelestarian alam yang nantinya masuk dalam konteks ibadah yaitu dengan menjalankan ajaran agama dan dicatat sebagai sebuah pahala.

---

[5]William P. Cunningham and Cunningham, 2010, *Environmental Science, a Global Concern,* New York: McGraw-Hill International Edition, page. 74-76

[6]Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, hlm. 33

[7] Herimanto dan Winarno, 2010, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 175

Menurut Berger, konstruksi sosial dalam beragama sangatlah berperan penting dalam realitas sosial masyarakat. Dalam memahami dunia kehidupan terjadi proses dialektis, antara individu dan dunia sosio-kultur. Agama dalam perspektif Berger dijelaskan melalui proses pemaknaan yang dilakukan manusia terhadap lingkungannya yang mencakup tiga momentum atau langkah. Tiga momentum tersebut adalah eksternalisasi, obyektivasi, internalisasi.[8]

Produk aktivitas manusia terlahir dari adanya eksternalisasi manusia. Eksternalisasi menurut Berger adalah suatu pencerahan diri manusia secara terus-menerus ke dalam dunia baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya.[9] Objektivasi adalah disandangnya produk-produk aktivitas (dunia sosial) baik fisik maupun mental yang berhadapan dengan para produsennya (hubungan antara manusia) semula dalam bentuk suatu kefaktaan. Sedangkan internalisasi adalah peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentrasformasikan kembali dari struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif.[10]

Setelah kedua proses tersebut berjalan, maka dalam proses internalisasi ini suatu masyarakat atau kelompok mempengaruhi individu yang ada di dalamnya. Sehingga melalui internalisasi inilah individu-individu mengidentifikasi melalui lembaga sosial atau organisasi sosial tempat mereka berada.[11] Dari adanya momentum inilah menurut Berger muncul sebuah legitimasi di dalam masyarakat. Legitimasi ialah pengetahuan yang diobyektivasi secara sosial yang bertindak untuk menjelaskan dan membenarkan suatu tatanan sosial.[12]

Yaitu di mana jika realitas obyektif lebih menekankan pada realitas di luar individu, maka realitas subyektif akan berproses menjadi realitas obyektif, yaitu ketika menjadi sebuah pengetahuan bersama yang berasal dari kesadaran

[8] Berger, 1994, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj; Hartono, Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm. 4

[9] Kahmad, 2009, *Sosiologi Agama*, Bandung: Pustaka Rosdakarya, hlm. 97

10

[11]Berger, 1994, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj; Hartono, Jakarta: Pustaka LP3ES,hlm. 4

[12]Berger, 1994, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj; Hartono, Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm. 36

individu. Yang kemudian ia mendefinisikan dirinya sebagai nilai, norma, dan pengetahuan yang internalisasi. Dapat diambil contoh, dalam ajaran umat Hindu, mempunyai pengetahuan yang sama mengenai penjagaan dan pemeliharaan lingkungan alam, sehingga dari pengetahuan bersama ini akan menjadi sebuah kesadaran mereka untuk selalu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenal Konsep *Tri Hita Karana*

Pentingnya akan kesadaran lingkungan dapat kita lihat dalam ajaran umat Hindu, yakni *Tri Hita Karana.*[13] Ajaran ini dipakai oleh umat Hindu sebagai pedoman manusia agar terwujudnya sebuah keselamatan hidup yang bersumber pada sebuah keharmonisan hubungan. Sesuai dengan namanya, *Tri Hita Karana* terdiri tiga ajaran, *Parhayangan* (keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan). *Pelemahan* (keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya). Dan *Pawongan* (keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia).[14]

Konsep *Palemahan* pada ajaran Hindu berkaitan dengan sebuah paham etika lingkungan bernama *Ecosentrisme* yang muncul awal tahun 1973. *Ecosentrisme* merupakan sebuah paham yang menentang *Antroposentisme.*[15] *Antroposentrisme* merupakan sebuah paham menghormati alam karena kepentingan manusia yang bergantung pada kelestarian alam. Oleh karena itu alam hanya sebagai obyek, alat, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia.[16]

Dari perilaku yang mengancam bagi kelestarian alam tersebut, maka muncul gagasan yang menentang paham *antroposentrisme,* yakni *biosentrisme.* Bagi kalangan penganut paham *biosentrisme,* tidak benar jika dikatakan hanya manusia yang mempunyai nilai. Alam juga mempunyai nilai pada dirinya lepas dari kepentingan manusia, sehingga pantas mendapatkan pertimbangan dan

---

[13] Wardhana, dkk. 1998, *Buku Pelajaran Agama Hindu Tingkat SMU Kelas XII,* Jakarta: Hanuman Sakti, hlm. 121-124

[14] Wardhana, dkk. 1998, *Buku Pelajaran Agama Hindu Tingkat SMU Kelas XII,* Jakarta: Hanuman Sakti, hlm. 121-124

[15]Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, hlm. 78

[16]Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, hlm. 33

kepedulian moral.[17] Etika *biosentrisme* bersumber pada kesadaran bahwa kehidupan adalah suatu hal yang sakral. Dari kesadaran tersebut mendorong manusia untuk mempertahankan kehidupan dan memperlakukan lingkungan alam dengan sikap hormat. Salah satu versi teori etika *ecosentrisme* dikenal sebagai *Depp ecology* atau "ekologi dalam" yang dikenalkan oleh Arne Naess. *Deep ecology* menurut suatu etika baru yang tidak lagi berpusat pada manusia, akan tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan. [18]

Dari adanya etika lingkungan tersebut dapat dirumuskan beberapa prinsip moral demi terjaganya kelestarian alam. Prinsip tersebut bertumpu pada teori etika *biosentrisme* dan *ecosentrisme.* Adapun prinsip-prinsip moral etika lingkungan hidup antara lain: 1) sikap hormat terhadap alam; 2) prinsip tanggung jawab; 3) solidaritas kosmis; 4) prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam; 5) prinsip "*No Harm*"; 6) prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam; 7) prinsip keadilan; 8) prinsip demokrasi; dan 9) prinsip integritas moral.[19]

Menjaga Alam Melalui Sembahyang

Dalam kehidupan kesehariannya, umat Hindu sama dengan umat yang lainnya dalam melaksanakan ibadah. Mereka sebagai makhluk yang taat kepada Tuhan diwajibkan untuk menjalankan ibadah sebanyak tiga kali yang disebut dengan *Tri Sandya. Tri Sandya* sendiri dilaukan tiga kali dalam sehari yakni, pagi, siang, dan sore menjelang malam.

Dalam beribadah umat Hindu mendoakan alam dan menghaturkan rasa terima kasih kepada Tuhan dan alam (pepohonan). Masyarakat awam (di luar umat Hindu) banyak yang mengira, umat Hindu beribadah menyembah pepohonan. Padahal pada kenyataannya, umat Hindu berdoa kepada Tuhan agar pohon yang ditanamnya dapat tumbuh subur dan berbuah lebih lebat sehingga berguna bagi manusia. Dalam ajaran umat Hindu, ibadah di pagi hari bertujuan

[17]Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, hlm. 49
[18]Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, hlm. 76
[19] Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, hlm. 144

untuk menghaturkn terima kasih kepada Tuhan karena masih bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Do'a siang bertujuan untuk menghaturkan terima kasih karena dapat bekerja dalam keadaan selamt. Do'a malam bertujuan untuk menghaturkan terima kasih karena dalam seharian penuh dalam keadaan sehat dan bahagia. Selain sembahyang, dalam ajaran umat Hindu juga terdapat ajaran *Nawa Kartika* (penghijauan hutan) yang dilakukan setiap menjelang musim penghujan tiba.

Selain itu terdapat upacara *Butha Yadnya* dan *Dewa Yadnya.* Dalam lima persembahan suci yang tulus (*Panca Yadnya)* terdapat dua persembahan yang berhubungan dengan lingkungan alam yaitu *Butha Yadnya dan Dewa Yadnya.* Upacara Butha Yadnya, dibagi menjadi empat, yaitu: *Mesegeh* (upacara persembahan makanan sebelum dimakan), *Macaru* (upacara memberikan pengorbanan kepada makhluk halus agar tidak mengganggu keharmonisan duniawi), *Makelem* (upacara persembahan kepada Tuhan agar lingkungan berupa danau dan lautan menjadi damai), dan *Nangluk Merana* (permohonan pada Tuhan agar tumbuh-tumbuhan tidak diserang oleh hama penyakit).[20]

Kosmis *Tri Tunggal* Dalam Diri Gandhi

Secara umum pemikiran Mahatma Gandhi bersumber pada kehidupan tradisional masyarakat India dan ajaran Hidu. Dalam hal ini Gandhi menunjuk Tuhan sebagai ide utama dan unsur lainnya bersifat inferior. Tuhan yang dimengerti Gandhi bukanlah Tuhan sebagai personal karena kata itu menurut Gandhi menunjuk pada orang sebagai wujud konkrit. Meski impersonal, namun Tuhan yang memuaskan kebutuhan intelektual juga bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan sesungguhnya adalah yang memerintah hati dan mengubahnya ke arah kebaikan. Menurut Gandhi Tuhan itu serentak sebagai kebenaran, pengetahuan dan cita-cita atau tujuan (sat-cit-ananda). Harus diingat juga bahwa Gandhi tidak berpretensi untuk menunjukkan eksistensi Tuhan. Baginya, kehadiran Tuhan dapat dirasakan dan dilihat dari realitas di hadapan manusia, misalnya realitas alam yang teratur. Keteraturan alam bukanlah suatu hukum keteraturan yang buta sebab ia mempunyai arah. Hukum semacam ini oleh Gandhi dipahami sebagai Tuhan.

[20]Wadhana dkk. 1998, hlm. 123

Selanjutnya, jalan menemukan Tuhan bagi Gandhi, adalah dengan melihat seluruh ciptaan-Nya. Bahkan Gandhi menyebut dirinya sedang berusaha keras melihat Tuhan melalui pelayanan manusia kepada manusia atau manusia kepada ciptaan-Nya yang lain. Pendeknya, realitas manusia tidak semata-mata ordo alam tetapi juga ordo moral. Gandhi mengakui apa yang benar, yang berguna, dan yang menguntungkan bagi manusia itu tidak ada perbedaannya. Bagi Gandhi Tuhan itu tidak di surga ataupun neraka tetapi berada pada setiap orang dan inilah kebenaran.[21] Pemikiran ini memuat gagasan bahwa meskipun manusia tidak mengakui adanya Tuhan, tetapi ia harus mengakui kebenaran. Menolak kebenaran berarti menolak realitas dan eksistensi manusia itu sendiri.

Konsep Gandhi tentang alam yang berjiwa material dan immaterial sebenarnya hanya mengikuti konsepnya tentang Tuhan, meski tidak terformulasi secara sistematis pada suatu tempat, hanya pada kesempatan secara kausal. Sebagai ciptaan Tuhan, keberadaan alam merupakan arena manusia mewujudkan dirinya dengan bimbingan moral. Bagi Gandhi, manusia hidup dalam arti yang sebesar-besarnya apabila ia bersatu dengan alam. Alam merupakan mitra yang senantiasa berhadapan dengan manusia. Menurut keyakinan Gandhi, alam merupakan jembatan bagi kehidupan yang abadi, sejauh hal itu di mengerti secara sadar. Oleh karena itu manusia perlu menyelaraskan diri dengan alam. Hal ini juga akan mendekatkan manusia pada peletak hukum alam yakni Tuhan.

Keprihatinan Gandhi terhadap alam diartikan sebagai kebijaksanaan untuk kembali ke alam. Keyakinannya pada harmoni antara alam dan tubuh manusia di wujudkannya dalam kegemarannya pada naturopathy. Bagi Gandhi alam juga bukan merupakan manusia sehingga manusia tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap alam yang justru akan merugikan manusia sendiri.

Melawan Karena Benar

Gandhi adalah seorang yogi yang terjun dalam politik. Sebenarnya politik Gandhi tidak bisa dibedakan dari agamanya. Ia mengatakan bahwa

[21] M. K. Gandhi diterjemahkan Andi Tenri W. 2009, *Mahatma Gandhi; Sebuah Autobiografi,* Yogyakarta: Penerbit Narasi, Cet-I, hlm. 94-98

rasa patriotismenya adalah mengabdi kepada agamanya. Dalam politik ia berpegangan pada pertimbangan moral dan sebagai Mahatma ia berpendapat bahwa tempatnya bukanlah di dalam gua atau kuil, melainkan di tengah-tengah hirukpikuk perjuangan rakyat untuk hakhaknya dan demi kebenaran. Agama Gandhi membuat dirinya menjadi berpolitis dan politiknya beragama. Sebagai politikus yang berjiwa Mahatma, atau Mahatma yang berpolitik, serta segala kemampuan yang diperolehnya dari sikap penahanan diri, Gandhi tidaklah mungkin mencapai cita-citanya jika tidak mempunyai senjata yang khas. Senjata seperti ini tidak ada sebelumnya dan masih ditiru sampai saat ini. Gandhi menyebut nama dari senjata itu adalah satyagraha. *Satya* berarti kebenaran, *Agraha* adalah kekuatan. Jadi satyagraha dapat diterjemahkan menjadi kekuatan jiwa [22](I Gede Suwantana, 2007:17).

Istilah ini merupakan metode untuk meraih hak-hak melalui perjuangan dengan cara menanggung penderitaan; tentunya ini berkebalikan dengan perlawanan menggunakan senjata. Gandhi berkata "Ketika saya menolak untuk melakukan sesuatu yang menurut kesadaran dan hati nurani saya merupakan hal yang menjijikkan, maka saya harus menggunakan kekuatan-jiwa.

Sebagai contohnya saat itu, Pemerintah telah menetapkan sebuah undang-undang yang bisa diberlakukan kepada diri Gandhi. Tetapi Gandhi tidak menyukainya. Kemudian dia berkata "apabila menggunakan kekerasan, saya memaksa pemerintah untuk mencabut undang-undang tersebut, maka saya telah menggunakan apa yang telah saya sebut dengan kekuatan-jasmani. Begitu sebaliknya, apabila saya tidak mematuhi undang-undang tersebut dan menerima hukuman atas pelanggaran yang telah saya lakukan dalam perspektif undang-undang tersebut, itu berarti saya menggunakan kekuatan-jiwa (*soul force*). Hal ini mencakup pengorbanan diri. Lebih dari itu, apabila jenis kekuatan ini (kekuatan jiwa) digunakan dalam perkara yang tidak benar, hal tersebut hanya merupakan kepentingan orang yang bersangkutan dan hanya akan hanya berakibat pada penderitaan."[23]

[22]I Gede Suwantara, 2007, *Mahatma Gandhi*, Jakarta: Geneca Press, hlm. 17

[23]Mahatma Gandhi, 1977, Mahatma Gandhi and His Apostles, Penguin Books, New York. Terjemah Siti Farida, 2007, *Ajaran-ajaran Mahatma Gandhi; Kesaksian dari Pengikut dan Musuh-musuhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-IV, hlm. 244

Sejak diperkenalkan oleh Gandhi, ajaran ini mulai tersebar luas di Gujarat sebagi penetapan perjuangan. Keluarga Gandhi merupakan penganut setia paham Waisnawa, sebuah praktek beragama Hindu yang mengutamakan pemujaan terhadap Wisnu dan mengalami proses percampuran dengan Jainisme. Jainisme adalah aliran agama di India yang salah satu ajarannya adalah melarang keras praktek kekerasan dan pembunuhan terhadap segala jenis makhluk hidup. Keluarga Gandhi menganut kasta Bania. Kasta ini merupakan bagian dari kasta Waisya, dan kebanyakan mereka bekerja sebagai petani dan pedagang.[24]

Oleh sebab itu, maka tak heran jika Gandhi memimpin gerakan masyarakat India, ia lebih menekankan pada perkembangan agraria dari pada industrialisasi, untuk mencapai keberhasilan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput, melalui tindakan-tindakan sederhana, yang didasarkan pada kemampuan sendiri. Misalnya menanam kapas dan memintal benang. Ini adalah rumusan yang dibuat Gandhi dalam program kontruktifnya revolusi yang digerakkannya. Ribuan suka relawan program kontruktif, yang berada diseluruh pelosok negeri, mengabdikan diri mereka untuk negerinya, dengan cara masing-masing sesuai kemampuan mereka. [25]

Salah satu tokoh teologi pembebasan yakni Gustavo Guitterez. Istilah teologi pembebasan menurut Gustavo mengandung makna penyelamatan manusia dari ketidakadilan dalma bidang sosial, politik dan ekonomi. Agama bukan sebatas ritus, pemuas batin, upacara-upacara keagamaan, dan doa tetapi sebagai pembimbing, kontrol sosial dan agen perubahan untuk kemajuan masyarakat dan bangsa.[26]

Selain ajaran Satyagraha, mahatma Gandhi juga menerapka ajaran Ahimsa yang ditanamnkannya untuk memperjuangkan nilai-nilai perdamaian dan

[24]Francisis Allapatt, 2005, *Mahatma Gandhi Prinsip Hidup, Pemikiran Politik, dan Konsep Ekonomi,* Bandung: Nusamedia bekerjasama dengan Nuansa, hlm. 3

[25]Mahatma Gandhi, 1977, Mahatma Gandhi and His Apostles, Penguin Books, New York. Terjemah Siti Farida, 2007, *Ajaran-ajaran Mahatma Gandhi; Kesaksian dari Pengikut dan Musuh-musuhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-IV, hlm. 430

[26]A. Suryawarsita, 2001, *Teologi Pembebasan Gustavo Guitterz,* Yogyakarta: Jendela, hlm. 18

keadialan. Prinsip *ahimsa* dan *satyagraha* sendiri tidak sekedar strategi politik. Tetapi lebih mendasar, yaitu bahwa ahimsa merupakan satu pemikiran yang berakar, tumbuh, dan berpijak dalam spiritualitas.[27] *Ahimsa* adalah falsafah pantang kekerasan yang Gndhi kembangkan, sedangkan *satyagraha* adalah gerakan moral dan sosial tanpa kekerasan yang diluncurkan Gandhi. *Ahimsa* atau anti kekerasan adalah kekuatan paling ampuh yang tersedia bagi umat manusia. Syarat pertama bagi ahimsa adalah keadilan menyeluruh di setiap bidang kehidupan.[28]

Berlandaskan pada prinsip-prinsip ahimsa, konsep *satyagraha* muncul. Sebagai atribut dari *ahimsa, satyagaraha* memiliki segi-segi batiniah seperti damai, kesederhanaan, kesantunan, dan hasrat berbuat baik terhadap lawan, sehingga gerakan *satyagraha* tidak jatuh menjadi tindak kekerasan. Prinsip *satyagraha* banyak menjelasakn tentang bagaimana hidam kerukunan dan landasan moral menjadi bagian terpentingnya.

Kesimpulan

Memang dalam menyelesaikan masalah lingkungan adalah salah satu pekerjaan yang sangat sulit dilakukan. Salah satu cara untuk memperbaikinya adalah dengan mengendalikan perilaku manusia agar tidak menambah kerusakan lingkungan alam.

Alam mempunyai nilai justru karena ada kehidupan di dalamnya. Karena itu, sebagaimana dikatakan Taylor, terlepas dari apapun kewajiban dan tanggung jawab moral yang kita miliki terhadap sesama manusia, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup di bumi ini semata-mata didasarkan pada pertimbangan moral bahwa makhluk-makhluk di alam semesta mempunyai nilai atas dasar bahwa mereka mempunyai kehidupan sendiri yang bermartabat. Karena itu manusia harus melindungi dan melestarikannya.

---

[27] John Dear, 2007, *Intisari Ajaran Mahatma Gandhi: Spiritual, Sosio-Politik dan Cinta Universal,* terj. Siti Faridah, Bandung: Nusa Media, hlm. 8

[28]M. K. Gandhi, 2009, *Semua Manusia Bersaudara,* terj. Kustiniyati Mochtar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 105

Dalam proses internalisasi, nilai-nilai ajaran agama berguna sebagai pengetahuan umat Hindu untuk selalu menjaga, merawat dan melestarikan lingkungan alamnya. Dari pengetahuan tersebut muncul sebuah tindakan berupa kegiatan umat Hindu dalam pelestarian lingkungan alam disebut dengan "Wana kartika" yang bertujuan untuk mengantisipasi bencana.

Begitu pula yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi dalam menyebarkan ajaran *Ahimsa* dan *Satyagraha.* Karena bagi seorang Gandhi, semua agama itu benar, semua agama baginya sama berharganya dengan agamanya sendiri. Setiap agama mengajarkan cinta dan kasih sayang antar sesama makhluk juga, antara manusia dengan alam sekitarnya. Tidak ada agama manapun yang memperbolehkan umatnya untuk saling memusuhi dan merusak alam sekitarnya dengan semaunya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Butchart, *et al.* 2010. *Global Biodeversity: Indicators of Recent Declines.* Sciencer:328 (5982): 1164-1168.

Intergovermental Panel on Climate Change (IPPC). 2007. *Summary for Climate Change: The Physical Science Basis.* New York: Cambridge University Press.

Prasetyo, Ketut dan Hariyanto. 2018, *Pendidikan Lingkungan Hidup,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

P. Cunningham, William and Cunningham. 2010, *Environmental Science, a Global Concern,* New York: McGraw-Hill International Edition

Keraf. 2002, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas

Herimanto dan Winarno. 2010, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara

Berger, 1994, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj; Hartono, Jakarta: Pustaka LP3ES

Kahmad, 2009, *Sosiologi Agama*, Bandung: Pustaka Rosdakarya

Wardhana, dkk. 1998, *Buku Pelajaran Agama Hindu Tingkat SMU Kelas XII,* Jakarta: Hanuman Sakti

M. K. Gandhi diterjemahkan Andi Tenri W. 2009, *Mahatma Gandhi; Sebuah Autobiografi,*Yogyakarta: Penerbit Narasi, Cet-I

Suwantara, I Gede. 2007, *Mahatma Gandhi*, Jakarta: Geneca Press

Gandhi, Mahatma. 1977, Mahatma Gandhi and His Apostles, Penguin Books, New York. Terjemah Siti Farida, 2007, *Ajaran-ajaran Mahatma Gandhi; Kesaksian dari Pengikut dan Musuh-musuhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-IV

Allapatt, Francisis. 2005, *Mahatma Gandhi Prinsip Hidup, Pemikiran Politik, dan Konsep Ekonomi,* Bandung: Nusamedia bekerja sama dengan Nuansa

Suryawarsita, 2001, *Teologi Pembebasan Gustavo Guitterz,* Yogyakarta: Jendela.

Dear, John. 2007, *Intisari Ajaran Mahatma Gandhi,: Spiritual, Sosio-Politik dan*

Cinta Universal, terj. Siti Faridah, Bandung: Nusa Media.

Gandhi, M. K. 2009, *Semua Manusia Bersaudara,* terj. Kustiniyati Mochtar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



Peran Pesantren dalam Pengolahan Lingkungan

Oleh: Mukhammad Ainul Yaqin

Abstrak

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan masyarakat yang tumbuh bersama dinamika masyarakat. Lembaga pendidikan ini juga kerap dianggap sebagai agen perubahan dalam masyarakat, karena keberadaannya yang mampu memberikan fasilitas pendidikan, terutama dasar dan menengah, yang sangat diperlukan di tengah masyarakat.

Konsep ekopesantren adalah modifikasi dari pengelolaan lingkungan yang berada di lingkungan pesantren yang berbasis 3 R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dengan menambahkan unsur pendekatan teologi di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena yang terjadi serta mengidentifikasi permasalahan pengelolaan lingkungan di wilayah pesantren di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawi yang berada di Jl. Makam Habib Abdullah Bafaqih Kampung Malon, RT 01 RW 06, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Semarang.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada penafsiran sebuah fenomena yang muncul di pondok pesantren yang menjadi objek kemudian dianalisa dan diinterpretasikan. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah fenomenologi. Penekatan fenomenologi berusaha masuk dalam dunia konseptual subjek agar dapat memahami

bagaimana dan apa makna yang disusun subjek tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.

***Keynote**: Pondok Pesantren dan Pengelolaan Lingkungan*

Pengantar

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang meneruskan tradisi Walisongo, yang mampu berdialog dengan budaya lokal menggunakan media setempat yang diisi dengan substansi tauhid. Ada dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri dan pendapat kedua menyatakan bahwa sistem pendidikan model pesantren adalah asli Indonesia.[1] Model pendidikan pesantren yang berkembang di seluruh Indonesia mempunyai nama dan corak yang sangat bervariasi, di Jawa disebut *pondok* atau *pesantren,* di Aceh dikenal *rangkang* dan di Sumatra Barat disebut dengan *surau.* Nama yang sekarang lazim diterima oleh umum adalah pondok pesantren.

Lahirnya pondok pesantren bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya pendidikan, tetapi juga untuk mensyiarkan agama Islam. Menurut M. Dawam Raharjo, hal itu menjadi identitas pesantren pada awal pertumbuhannya, yaitu sebagai pusat penyebaran agama Islam, di samping sebagai sebuah pendidikan.[2] Pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yanng ada pada pertengahan abad ke-20 di Indonesia. Sistem pendidikan pesantren disediakan untuk para muslim pribumi yang memfokuskan pada pengajaran ilmu agama.[3] Lebih dari itu, pesantren merupakan institusi sosial yang mengalami dialektika.

Pesantren telah dianggap sebagai model institusi pendidikan yang memiliki keunggulan baik dari aspek tradisi keilmuannya yang merupakan salah satu

---

[1]DEPAG RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah,Pertumbuhan dan Perkembangannya (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia, 2003), 7.

[2]M. Dawam Raharjo, "Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren", Pengantar dalam M. Dawam Raharjo (ed), Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah (Jakarta: P3M, 1985), VII.

[3] Lathiful Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari (Yogyakarta: LkiS, 2000), 22.

tradisi agung maupun sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat Islam. Pesantren telah menjadi semacam *local genius.*[4] pesantren sebagai alternatif pendidikan baru di tengah-tengah kegagalan lembaga pendidikan lain dalam membina moral dan *life skill* (keterampilan hidup), mulai dilirik oleh banyak pihak. Bahkan diadopsi sebagai model pendidikan baru, seperti pesantren perguruan tinggi", atau pengasramaan siswa taruna, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa peran pesantren telah merambah ke segala bidang bahkan telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Maka sangat keliru bila ada anggapan peran pesantren sangat kecil dan rendah dalam menyukseskan program pendidikan dan pembangunan nasional.

Kehadiran pesantren dikatakan unik karena memiliki dua alasan. *Pertama,* pesantren hadir untuk merespon terhadap situasi dan kondisi suatu masyarakat yang dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral atau bisa disebut perubahan sosial. *Kedua,* didikannya pesantren adalah untuk menyebar luaskan ajaran universalitas Islam ke seluruh pelosok nusantara.[5] Kepemimpinan Kiai di pondok pesantren sangatlah unik, karena mereka memakai sistem kepemimpinan pra-modern. Relasi sosial antara Kiai dan santri dibangun atas dasar kepercayaan. Bukan karena patron-klien sebagaimana dilakukan masyarakat pada umumnya. Ketaatan santri kepada kiai lebih dikarenakan mengharapkan keberkahan (*grace*).[6]

Dalam kondisi moralitas masyarakat luas kurang baik seperti saat ini, banyak yang menoleh ke pesantren dengan harapan akan diperoleh lulusan yang dapat ikut memperbaiki moralitas bangsa. Di sisi lain, dinamika keilmuan pesantren dipahami Azyumardi Azra sebagai fungsi kelembagaan yang memiliki tiga peranan pokok. *Pertama,* transmisi ilmu pengetahuan Islam. *Kedua,* pemeliharaan tradisi Islam. *Ketiga,* pembinaan calon-calon ulama. Keilmuan pesantren lebih mengutamakan penanaman ilmu dari pada pengembangan ilmu. Hal ini terlihat pada tradisi pendidikan pesantren yang cenderung

[4]Malik Fajar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia /LP3NI;1998), 126.

[5] Said Aqil Siradj, Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), 202.

[6] Abdurrahman Wahid, Pesantren Masa Depan (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 14.

mengutamakan hafalan dalam transformasi keilmuan di pesantren.[7] Tradisi pesantren memiliki keterkaitan dan keakraban dengan masyarakat lingkungan diharapkan dapat menciptakan suatu proses pendidikan tinggi yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian terciptalah masyarakat belajar, sehingga ada hubungan timbal balik antar keduanya.[8]

Adapun tujuan utama didirikannya pesantren dalam pandangan agama Islam, adalah landasan perintah al-Qur'an, dalam memperdalam dan mengkaji ilmu pengetahuan dan mengembangkannya sehingga pesantren mampu menjawab tantangan zaman terutama dalam mengkader intelektual dan ulama (fukaha) yang *faqih* mampu menjawab tantangan dan keperluan manusia dan kaum Muslimin, sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an:

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya". (QS. At-Taubah (9):122).

Oleh karena itu, pesantren dalam hal ini merupakan lembaga pendidikan Islam swadaya masyarakat yang mandiri yang dalam perannya juga dan dapat memberikan kontribusi penting perawatan lingkungan, baik kini dan masa depan, karena lembaga ini merupakan tempat menggembleng kader santri yang diharapkan mampu menjawab tantangan keperluan pengetahuan agama (termasuk lingkungan). Di samping itu, pesantren telah menjadi perhatian masyarakat dunia karena dapat dianggap sebagai simpul perjumpaan budaya dan pialang budaya (*cultural broker)* bagi mengalirnya gagasan modernisasi dari kota (Abdurrahman 2006). Buku ekopesantren

Melihat potensi tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia, sejak tahun 2008 telah mencanangkan program Ekopesantren yang memberikan penghargaan kepada pesantren yang

[7]Azyumardi Azra, Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 89.

[8]Azyumardi Azra, Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 108.

mempunyai inisiatif dan inovatif dalam berperan serta untuk pelestarian lingkungan. Adapun definisi Ekopesantren ini mengacu pada dua unsur: *eco* atau eko–yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia–dengan konotasi erat berhubungan pada ilmu ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan (alam) sekitarnya (Burnie 2005). Sedangkan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam khas Indonesia yang mempunyai elemen pesantren yaitu: pondok, masjid, pengajaran kitab klasik, santri, dan kiai (Dofier 2011). Jadi dengan kata lain, Ekopesantren dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk memberikan label "ramah lingkungan" atau *Green* pada tahap di mana pesantren tersebut dapat menunjukkan kontribusi atau partisipasinya pada pelestarian atau konservasi lingkungan.

Upaya untuk penyelamatan lingkungan perlu dilakukan dengan memberdayakan pesantren dan masyarakat lingkungan pesantren untuk berpartisipasi aktif dalam program pelestarian fungsi lingkungan. Dalam kepentingan ini, pesantren menggali seluruh potensinya untuk mensukseskan program penyelamatan lingkungan global. Penggalian potensi ekologis antara lain berupa penggalian nilai-nilai spiritual religius yang dimiliki oleh masyarakat pesantren. (Mujiyono Abdillah, 2011)

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tidak bisa hanya didekati dengan pendekatan teknis parsial. Permasalahan lingkungan harus didekati secara holistik-komprehensif. (Keraf, 2010) oleh karena itu, perlu pendekatan interdisipliner untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan termasuk di sana adalah agama. Pola pendekatan pengelolaan lingkungan yang melibatkan unsur teologis juga telah dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini bisa dilihat terdapat beberapa buku-buku agama yang bernuansa lingkungan yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan beberapa Ormas Agama, beberapa buku yang sudah dipublikasikan adalah, Akhlak Lingkungan, Pandua berperilaku Ramah Lingkungan, kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam, kerja sama antara Kementerian Lingkungan

Hidup dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tingkatkan Taqwa Melalui Kepedulian Lingkungan (Peduli Lingkungan dalam Perspektif Islam), kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pengurus Besar Nahdlotul Ulama,Kerusakan Lingkungan.

Dari contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa nuansa teologi dalam penanganan lingkungan telah menjadi pendekatan baru untuk mengatasi masalah lingkungan dan termasuk di dalamnya adalah lembaga pesantren.

Rumusan Masalah

Sebagai lembaga tradisional yang tumbuh dari akar rumput, pondok pesantren pada umumnya asih terbatas dalam pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat umum termasuk lingkungan. Selain itu terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan dalam aspek pengelolaan lingkungan di kalangan pesantren, termasuk kelembagaan, manajemen, sumber daya, dan dana.

Karena itu dalam beberapa hal, kondisi pesantren dapat dikatakan masih jauh dari kondisi ideal sebagai model yang menjadi teladan terapan ajaran Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Dengan kata lain, masih ada kesenjangan antara teori (ajaran Islam yang ideal) dengan kenyataan praktis sehari-hari. Padahal, di lain pihak animo masyarakat untuk bersekolah di lingkungan pesantren tidak berkurang.

Alasan di atas yang menjadikan peneliti merumuskan beberapa pertanyaan untuk digali:

1. Bagaimana kondisi kelembagaan pesantren dan program-program lingkungan yang dilakukan?
2. Bagaimana tingkat kesadaran lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di kalangan santri?

Penelitian ini akan merumuskan dan mencari solusi rekayasa kelembagaan (desain) dan pendekatan yang setidaknya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam (pesantren) dalam kegiatan mereka bersinergi memelihara dan merawat lingkungan. Sebagai bagai komponen kelembagaan di masyarakat

yang dinamis, pesantren dapat memegang peranan penting dan berperan besar dalam pembangunan kesadaran akan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana Islam mengajarkan tentang konservasi lingkungan (*environmentalism),* kekuatan dan kelemahannya serta implementasi ke depan dalam memberikan sumbangan yang signifikan pada gerakan pelestarian alam (konservasi) dan lingkungan akan dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga akan mengkaji nilai-nilai etika dan moral agama (Islam) dalam memberikan respo terhadap krisis lingkungan yang kita hadapi bersama. Sebab, White (1967) mensinyalir bahwa agamalah yang menjadi akar persoalan historis adanya krisis lingkungan masa kini. Oleh sebab itu penelitian akan memberikan input tentang faktor-faktor intrinsik (keyakinan agama) yang menjadi pendorong manusia berdasarkan keimanannya untuk dapat memberikan perubahan atas perilaku bagi lingkungan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada penafsiran terhadap fenomena yang muncul di dalam masyarakat pesantren yang kaitannya mejadi objek penelitian, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan penegertian dari kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati. (Meleong, 2006)

Dalam penelitian kualitatif peneliti memulai penelitiannya dengan menggunakan pola pikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta dan fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya untuk melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, karena terkait langsung dengan perilaku, persepsi dan paradigma masyarakat pesantren sebagai objek kajian yang terorganisasi dalam pengelolaan lingkungan sekitar.

Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha memahami makna peristiwa secara interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu.

Paradigma definisi sosial akan memberikan peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan interpretasi sampai mendapatkan makna yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Penelitian kualitatif harus bersifat "perspektif emic" artinya memperoleh data bukan "sebagaimana mestinya". Bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana apa adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data (Sugiono, 2009).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawi yang berada di Jl. Makam Habib Abdullah Bafaqih Kampung Malon, RT 01 RW 06, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Semarang. Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup kecil, yang hanya mewakili wilayah administrasi Semarang saja. Adapun waktu pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2018.

Kebanyakan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari proses wawancara dengan narasumber yaitu KH. Muhammad Masroni, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawi, KH. Arja Imron, selaku mantan Sekretaris PWNU Jateng yang sekarang menjabat sebagai Wakil Katib Am' PWNU Jateng, Gus Roy Murtadho, selaku Koordinator Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Nasional, Abu Fadhol, selaku Lurah Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawi, Semarang.

Hasil dan Pembahasan

a. **Gambaran Umum Pesantren**

Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawi terletak di di Jl. Makam Habib Abdullah Bafaqih Kampung Malon, RT 01 RW 06, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Semarang. pesantren ini mulai dirintis pada 2008. Sebagaimana umumnya pesantren, Pesantren Sunan Gunung Jati ini bervisi misi mengembalikan Islam kepada ajaran ulama salaf, tanpa menolak hal-hal modern.

Pesantren ini juga berkomitmen membantu program pemerintah di bidang keamanan negara dan pertahanan pangan. Dalam menjalankan misinya di bidang keamanan negara, pesantren ini pernah menjadi tempat pertemuan 11 negara pasca serangan 11 September 2001 di Amerika pada 2012.

> "Sewaktu terjadi penyerangan teroris di Amerika, orang-orang Indonesia dicekal di sana. Untuk menanggulangi hal itu, kami berbicara dengan konsultan Amerika dan negara-negara yang lain, bahwa rakyat Indonesia tak seperti Amrozi," tutur kiai kelahiran Demak itu.

Sedangkan dalam bidang ketahanan pangan, pihak pesantren bekerja sama dengan pemerintah berupa penanaman pohon, pengolahan pertanian, dan lain-lain. pihaknya mengaku sudah memulai usaha tersebut salah satunya dengan berkoordinasi dengan kelompok ekonomi.

> "Sebagai negara yang semuanya ada, kita merasa malu, karena seakan kita tak punya apa-apa. Beras impor dari Vietnam, kedelai dari Amerika, daging dari Australia, padahal negara kita subur, agraris, setiap satu meter ditanami tumbuh," tutur KH Muhammad Masroni yang pernah menjadi dosen di IAIN Syarif Hidayatullah ini.

Pesantren Sunan Gunung Jati memiliki ciri penekanan dalam pembelajaran Al-Qur'an (hafalan) dan bertasawuf dengan mengikuti tarekat Syadziliyah di bawah bimbingan Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan. Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawi, menganut sistem pengajaran tradisional dan formal, yang ditandai dengan pengajaran kitab kuning dan pelajaran-pelajaran standar di pesantren yang diajarkan kepada santri yang tinggal di asrama, tetapi juga mewajibkan santri untuk mengenyam pendidikan formal yang dimiliki oleh pesantren tersebut. Namun, Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawi sendiri tidak membatasi mereka yang bersekolah harus menjadi santri. Mereka juga diakomodasi untuk hanya mengikuti sekolah formal saja. Hal ini untuk menyerap animo masyarakat sekitar pesantren yang hanya memerlukan sekolah formal, tanpa harus menjadi seorang santri.

Pondok Pesantren sendiri saat ini baru memiliki sekolah formal yakni SMK Sunan Gunung Jati Ba'alawy. Untuk SMK Sunan Gunung Jati Ba'alawy sendiri

dibuka pada tahun 2016. SMK Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang (SGJBS) merupakan lembaga pendidikan yang konsen mendidik siswa-siswinya dalam bidang pertanian dan peternakan.

Pondok Sunan Gunung Jati Ba'alawy, telah menjalin kerja dengan pihak Institut Pertanian Bogor (IPB) selama 6 tahun untuk melakukan riset soal pertanian dan peternakan. Pihak pondok sendiri memilih beerja sama dengan pihak IPB dengan alasan karena legalitasnya yang sudah tidak diragukan lagi. KH. Muhammad Masroni mengaku memang sejak berdirinya Ponpes Sunan Gunung Jati Ba'alawy sendiri, beliau berkeinginan untuk membangkitkan peternakan dan pertanian sekitar sesuai dengan alam sekitar pondok pesantren. Sehingga pondok bukan hanya mengajarkan ilmu agama semata, juga mempunyai keunggulan di bidang tersebut.

> "Karena orang-orang Islam sekarang sudah lupa, dikira belajar di pondok hanya seputar ngaji kitab-kitab saja. Padahal yang namanya agama itu *include*, termasuk di dalamnya mengajarkan tentang ekonomi, tanah, air, dan makanan yang harus kita kaji juga dalam agama. Contoh kalau kita wudhu kan harus dengan air atau debu, kenapa air atau debu ini bisa dibuat sesuci. Berarti kita harus tahu tentang tanah atau air. Tapi kenapa kalau kita berbicara air atau tanah tidak dimasukkan dalam agama? Wacana itu yang harus kita hidupkan kembali".[9]

Semua santri Ponpes Sunan Gunung Jati Ba'alawy terlibat dalam dunia pertanian dan peternakan. Selain itu, pihak pondok pesantren juga melibatkan masyarakat sekitar dalam setiap kegiatannya. Karena tujuan pesantren selain membangun masyarakat yang agamis, juga terlibat dan melibatkan masyarakat dalam setiap agendanya. Masyarakat sekitar juga diedukasi untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Doktrin-doktrin tersebut dimunculkan saat acara pengajian ataupun khutbah Jum'at. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ

[9] Wawancara dengan KH. Muhammad Masroni, selaku Pengasuh Pondok Sunan Gunung Jati Ba'alawy, Semarang pada hari Rabu (9/1/19).

نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖقَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah (2): 30)

Dari konsep yang sudah dijelaskan oleh al-Qur'an tadilah yang seharusnya menjadikan para pemimpin terutama para kiai untuk tanggap membuka wawasan baru dalam menyebarkan sebuah kebajikan dengan menyerukan pada santri dan masyarakat sekitar untuk tanggap dalam menjaga lingkungan.

Salah satu program sosial masyarakat Ponpes Sunan Gunung Jati Ba'alawy adalah program pasar murah hingga tingkat provinsi Jawa Tengah. Mereka menjual hasil panen dari program pertanian dan peternakan pondok sendiri dan beberapa produk olahan lainnya.

> "Jadi kalau kita bilang pertanian dan peternakan itu adalah sumber utama. Semuanya dimulai dari sana. Baik gula, beras, minyak, dan lainnya. Memang ada yang bisa diolah secara langsung dan ada yang melalui pabrikasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, program pondok ini fokus pada bidang pertanian dan peternakan".[10]

Untuk saat ini, total santri sebanyak 157 orang yang bermukim di pondok. Sedangkan pada hari Rabu dan Kamis jumlah santri akan meningkat menjadi 300-an lebih, sebab santri *kalong* berdatangan pada kedua hari tersebut.

> "Untuk kegiatan pesantren terkonsentrasi setelah shalat Ashar berjamaah hingga Shubuh. Sebab, sepanjang pukul 07.00–15.00, santriwan-santriwati menunaikan kewajiban sekolah formal".[11]

[10] Wawancara dengan KH. Muhammad Masroni, selaku Pengasuh Pondok Sunan Gunung Jati Ba'alawy, Semarang pada hari Rabu (9/1/19).

[11] Wawancara dengan Abu Fadhol selaku Lurah Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawi, Semarang pada hari Rabu (9/1/19).

b. **Identifikasi Paradigma Epistemologi Ekopesantren**

Pesantren menjadikan model pendidikan yang khas di Indonesia. Hal ini menjadikan nilai sosial kemasyarakatan yang lebih untuk identitas muslim di Indonesia khususnya yang wajib dipertahankan. Sebagai negara yang mayoritas muslim sebagian besar dari mereka memahami keberadaan pesantren yang lahir dari masyarakat mereka sendiri. Menjadikan pesantren mampu menggerakkan dalam upaya melakukan gerakan yang terlibat langsung dengan permasalahan lingkungan di mana pesantren tersebut berada.

Pemilihan pesantren sebagai tempat berangkat untuk turut serta, banyak berkontribusi dalam persoalan lingkungan tentu sangat strategis. Pesantren telah membentuk identitas dan ikatan masyarakat yang kuat. Pesantren memiliki dua posisi penting secara eksistensinya. *Pertama*, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang original lahir dari cita-cita membertahankan kultur kebudayaan masyarakat. *Kedua*, pesantren sebagai tempat pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini bisa dilihat bahwa pesantren secara aktif dan solutif untuk menjadi identitas masyarakat dalam membentuk gerakan masyarakat yang peduli terhadap konservasi lingkungan.

Houben (2003) menjelaskan bahwa Islam sendiri sebagai sebuah agama tidak berkutat pada persoalan teologis saja, melainkan mampu menjangkau hingga menjadi petunjuk cara berkehidupan (*way of life*) hingga persoalan praktis para pemeluknya. Kondisi ini menjadi dasar kenapa pesantren kemudian melakukan terobosan keluar dari pemahaman umum yang hanya fokus dalam pendidikan saja, namun juga pendidikan secara sosial.

Eksistensi pesantren sendiri melalui perdebatan dinamika yang cukup panjang. Bagaimana Ki Hadjar Dewantoro dengan Sultan Takdir Ali Syahbana saling kritik. Takdir menyebutkan Ki Hadjar dan beberapa intelektual lain yang menyerukan penguatan pendidikan khas pesantren, akan tetapi Taqdir justru beranggapan bahwa seruan itu lebih mendorong pada anti intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme. Premis ini berangkat dari budaya pesantren yang menurutnya sangat kolot dan terpaku pada wilayah keagamaan saja. Serta kedudukan kiai yang sangat tinggi sehingga tidak menimbulkan

semangat modernisasi yang diagungkan oleh Takdir (Pengantar Dawam Rahadjo dalam buku Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah).

Pendekatan lingkungan melalui keyakinan merupakan salah satu bagian penting dalam *mainstream* penyelamatan keanekaragaman hayati, melindungi kawasan konservasi juga aksi terhadap perubahan iklim (WWF & ARC 2006; ARC & UNDP; Palmer & Vinaly 2005).

Pendekatan melalui agama (keyakinan) dapat menyokong pilar yang mendorong pada kunci pembangunan berkelanjutan *economically* (*available*), *ecogically* (*viable*) dan *socially* (*acceptable*) dan *spiritually* (*respectable*). Pesantren dapat berkontribusi besar dalam memberikan sumbangan pada model pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan *education for sustainable development* (ESD).

Dalam menyusun desain program ekopesantren yang mencakup bagaimana prosesnya yang dilandasi kerangka pembangunan berkelanjutan yang memiliki beberapa dimensi; sosial, ekonomi, ekologi, spiritual (kelembagaan). Sehingga pesantren mampu berkontribusi dalam membantu perkembangan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dengan berbagai prosesnya.

Pertama, menganalisis keterkaitan kesadaran konservasi dan lingkungan melalui pendekatan agama Islam (*Islamic environmentalism*). *Kedua*, menganalisis ketangguhan kelembagaan dan program lingkungan di pesantren. *Ketiga*, menganalisis tingkat kesadaran santri terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. *Keempat*, menganalisis kebijakan yang terkait ESD dan ekopesantren. *Kelima*, membuat formulasi dan desain program untuk pesantren ramah lingkungan (ekopesantren). *Keenam*, kiai dan ustadz mempunyai peran penting dalam mendorong terwujudnya ekopesantren.

Dalam tawaran ekopesantren diharapkan akan dengan mudah segera diterima dan terealisasi secara meluas. Hal ini tidak terlepas dari tidak adanya resisten dalam kalangan ulama Islam (para pengasuh pondok pesantren) di Indonesia dalam membicarakan persoalan lingkungan. Padahal mereka semua telah menyaksikan secara jelas kerusakan yang begitu parah dan bencana yang terjadi karena kondisi alam yang kian rusak. Tentunya hal ini diharapkan

menimbulkan tindak lanjut dan kegiatan yang lebih luas yang melibatkan kalangan pesantren dan *stakeholder*s di sekitarnya untuk lebih perhatian terhadap lingkungan.

Desain model ekopesantren secara ideal merupakan bentuk institusi dan diiringi dengan program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat atau komunitas pesantren itu sendiri yang dalam kegiatannya harus mencakup keterlibatan banyak elemen pendukung. Pengasuh ponpes, sebagai lembaga tertinggi yang sangat dihormati dalam tradisi pesantren, yang bisa melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam bidang terkait, semisal KLHK. Semua itu dapat di*follow up* dengan menggerakkan kapasitas pesantren dan mendorongnya menjadi sebuah program ekopesantren.

Salah satu bentuk kegiatan yang lebih kontekstual dan tranformatif tersebut dapat terlihat dari munculnya gerakan ekologis yang didorong oleh pesantren sehingga mampu mendorong masyarakat melakukan upaya perbaikan dan konservasi lingkungan. Bentuk konservasi lingkungan yang dilakukan beberapa pesantren di Indonesia setidaknya terlihat ada pada yang dilakukan oleh Ponpes Pabelan, Ponpes An-Nuqyah, Ponpes Maslakhul Huda, Ponpes Cipasung, Ponpes Darunnajah, dan beberapa pesantren lainnya pada era 80-an. Beberapa pesantren yang disebutkan di depan pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa penghargaan Kalpataru sebagai apresiasi atas kepedulian mereka atas lingkungan.[12]

c. Kiai Sebagai Aspek Materil Kenusantaraan yang Hilang

Emil Salim ketika Menjadi Lingkungan Hidup (1980), pernah menceritakan pengalaman tentang kunjungannya kepada Buya Haji Abdul malik Karim Amrullah (Hamka), beliau seorang ulama besar yang menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan menanyakan tentang peran umat Islam dalam menjaga lingkungan. Emil menanyakan: “Apa yang bisa dilakukan umat Islam dalam menyelamatkan lingkungannya?”. Kata Buya seperti yang dituturkan Emil Salim, mengatakan: “Umat Islam akan tersentuh jika segala hal praktis dapat langsung dirasakan mereka. Misalnya umat Islam harus shalat lima waktu. Maka

[12]Pentar ekologi IPB, hlm 4

diperlukan air wudhu yang mensucikan. Dari mana umat mendapatkan air bersih? Dari sungai dari air tanah yang sah, yang memenuhi persyaratan untuk meghadapi khaliqnya. Dengan demikian umat Islam harus memelihara air serta sumber-sumbernya agar bisa beribadah kepada Allah. Jadi wajib hukumnya umat memelihara sumber-sumber air tersebut" (Mangunjaya, 2005).

KH Arja' Imroni seorang ahli tafsir yang juga wakil katib 'am PWNU Jateng membenarkan bahwa memulai proses kesadaran melestarikan lingkungan harus dipersiapkan secara akar para digmanya. *Ulumul fiqh* yang sudah melekat dan menjadi ciri khas pesantren mejadi pegangan hidup dan pandangan kaum muslimn secara luas. Namun fiqh belum banyak menyentuh untuk secara tegas bersikap dalam persoalan kerusakan alam.

> "Pesantren saya kira menjadi ujung tombak dalam hal penyemaian kehidupan yang lebih produktif terkait dengan pemeliharaan alam. Ketika pemikiran itu sudah muncul dari pesantren akan segera bisa disosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya menjaga alam ini", tutur KH Arja' Imoni.

Beliau juga menambahkan bahwa, secara pragmatis membicarakan persoalan ekopesantren harus dimulai dari kajian akademis yang kuat terlebih dahulu. Dalam *fiqh* maupun *ushul fiqh* sendiri sudah ada kemauan yang cukup pesat dalam pemikiran persoalan kehidupan masyarakat. Teapi kemaslahatan yang dibicarakan di dalam *ushul fiqh* masih hanya pada *al-kulliyatul khoms*,"[13]

Maqasid Syariah (tujuan Syariah) bersifat *dhoruri* artinya wajib adanya untuk kemaslahatan manusia. Namun perlu relevansi kembali karena *al-kulliyatul khoms* belum membicarakan atau memberikan porsi tersendiri dalam perlindungan terhadap alam (*khifdul biah*). Ijtihad *fiqh* karya para ulama klasik bukan berarti tidak mampu menjawab persoalan, namun perlu direlevansikan kembali (rerelevansi) dalam konteks permasalahan kehidupan hari ini.

Lingkungan terus menjadi isu penting dalam dinamika diskursus akademis. Maka perlu rekontruksi secara epistemologi yang akan berimplementasi dalam gerakan yang lebih *awareness* (kepedulian kepada lingkungan). Salah satunya

[13] Wawancara dengan KH Arja' Imroni mantan Sekretaris PWNU Jateng yang sekarang menjabat sebagai Wakil Katib Am PWNU Jateng, pada Kamis (3/1/19).

yakni dengan cara: *pertama*, memelihara lingkungan menjadi sangat penting karena manusia bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Manusia hidup dari alam dan kembali ke alam, sehingga alam menjadi bagian diri manusia. Manusia sebagai mikrokosmos dan alam disebut sebagai makrokosmos. Artinya, antara mikrokosmos dan makrokosmos harus selaras. Karena kerusakan makrokosmos juga akan mempengaruhi mikrokosmos.

Kedua, membuat landasan kuat secara epistemologi dan spiritual teologis dalam mendesain ekopesantren. Artinya bahwa manusia harus menyadari bahwa semua yang terjadi tidak terlepas dari tingkah laku manusia. Sehingga saat mengetahui bahwa lingkungan ini bagian dari amanat yang diberikan kepada manusia untuk dinikmati dan ditinggali, maka kita mempunyai kewajiban untuk memeliharanya.

> "Allah menciptakan manusia bukan hanya sebagai pemimpin manusia, tetapi Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin di bumi. Kata bumi ini di dalamnya mencakup tanah, air, hewan, dan semua mata rantai makanan yang ada di bumi. Salah besar jika ada manusia yang hidupnya hanya mengurus manusia saja. Semua tanggung jawab di bumi ini dipikul oleh manusia yang sudah diciptakan Allah. Lantas kenapa pohon tidak diurus? Lahan tidak diurus?[14]

Menurut Gus Roy Murtadho koordinator Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Nasional, bahwa untuk mengembalikan pesantren sebagai fungsi sosial yang menjawab problematika persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat luas harus melihat bagaimana akar pesantren itu berangkat. Pesantren yang cenderung lahir secara organik di tengah kultur masyarakat lokal memang mempunyai beberapa fungsi. Mereka (para kiai) yang mengajarkan mengaji kepada para santri dan masyarakat serta berdakwah secara ikhlas, mempunyai tujuan menyebarkan ilmu pengetahuan (*knowledge*) dalam aspek emansipatif. Yang bertujuan berjuang membela rakyat, bukan membebaskan belenggu dirinya semata.

[14] Wawancara dengan KH. Muhammad Masroni, selaku Pengasuh Pondok Sunan Gunung Jati Ba'alawy, Semarang pada hari Rabu (9/1/19).

"Kita harus menggali akar pesantren, misalkan pesantren punya ciri khas agraris. Pesantren sendiri secara akar kata 'pecangkrikan' tempat orang mendalami kebijaksanaan hidup. Aspek materil dari pesantren ada tanah, tempat mengolah sawah, selalu begitulah pesantren. Itu yang hilang saat ini. Aspek meterialnya dan kesan historis orang pesantren. Teologi (di pesantren) saat ini hanya sebagai penguat saja, bukan kesadaran tentang kehidupan," [15]

Peran kiai sebagai sentral yang dihormati secara keilmuan maupun status keilmuannya berbeda dengan kepala sekolah. Kepala sekolah tidak mempunyai preferensi untuk membela rakyatnya yang dilemahkan. Namun pesantren murni lahir secara organik, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, yang menggunakan tata kelola musyarokah (musyawarah).

"Namun kini ada beberapa yang hilang dari peran seorang kiai pengasuh pondok pesantren maupun kiai di kampung-kampung. Dahulu hampir semua problematika masyarakat akan ditanyakan kepada kiai, agar dicarikan solusinya (contohnya seperti hari-hari bagus). Seperti seorang petani yang akan mulai menanami sawahnya, mereka akan menanyakan kepada kiai terlebih dahulu, selain untuk meminta berkah dari seorang kiai. Namun kini seakan ada peran orisinil yang hilang, karena mereka (kiai) hanya menjawab problematika persoalan keagamaan saja".[16]

Peran besar kiai kembali dibutuhkan keberpihakannya dalam problematika permasalahan saat ini. Hal ini karena tak lain adalah berkah dari kealiman seorang kiai yang secara spiritual sudah sangat dekat dengan Allah SWT, dan ini menjadikan aspek material kenusantaraan sekarang yang hilang.

d. **Konservasi dan Kesadaran Lingkungan**

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan kekayaan hayati yang paling besar di dunia, sehingga diberikan julukan sebagi *Mega Diversity Country.* Kebijakan pembangunan Indonesia yang menitik beratkan pada kemajuan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam, menyebabkan tekanan yang berat pada keanekaragaman hayati dan lingkungan yang

[15] Wawancara dengan koordinator Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Nasional, Gus Roy Murtadho, Minggu (6/1/19).

[16]Wawancara dengan Direktur Ekskutif Sajogyo Institute, Amir Mahmud, Minggu (6/1/19)

dimilikinya. Penurunan kualitas lingkungan menyebabkan tumbuhnya lembaga non-pemerintah atau NGO (*Non-Govermental Organization)* dan juga beberapa sektor pemerintahan tersadarkan akan pentingnya memberikan pendekatan baru pada masalah-masalah lingkungan. Banyak LSM telah melakukan pendekatan untuk penyadaran lingkungan melalui aspek yang berbeda, misalnya, melalui sains dan penelitian, pendidikan , advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Tentunya LSM tersebut menggunakan penddekatan konvensional dan sekuler yang terkadang tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan lain yang digunakan adalah melalui agama, di mana masyarakat Indonesia sangat meyakini agama.[17]

Memburuknya kondisi lingkungan sesungguhnya adalah akibat tekanan dan ulah manusia yang tidak lagi bersahabat dengan alam. Hutan alam yang tadinya berfungsi sebagai pelindung dan stabilitas tahan di lereng-lereng bukit dan gunung, telah berubah menjadi perkampungan dan tempat tinggal. Cekungan aliran sungai dipotong dijadikan tempat tinggal dan ditanami ladang dan sawah. Maka terjadilah bencana tahunan yang tidak kunjung henti setiap musimnya.

Kementerian Lingkungan Hidup (2004) mencatat selama tahun 2003 sampai bulan September 2004, melaporkan terdapat 194 banjir dan tanah longsor di 24 provinsi, dengan korban 338 orang meninggal dunia, 144 orang hilang, dan 131.55 orang mengungsi. Prasarana yang tergenang meliputi 21.732 ha permukiman, 64.050 ha rumah, 540 ha fasilitas umum, 247 km jalan, 16 buah jembatan, 94.197 ha sawah, 3.655 ha perkebunan, serta 3.463 ha perikanan. Kerusakan terjadi pada 7.27 rumah, 686 fasilitas umum, 338 km jalan, 59 buah jembatan, 63 buah bendungan, 12.078 m saluran, 9592 m tanggul, dan 54 buah bangunan irigasi. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2004)

Maraknya pembalakan liar *(illegal logging)* semakin memperparah rusaknya lingkungan hidup Indonesia. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh pembalakan liar (*illegal logging)* menyebabkan kerusakan hutan 2,8 juta ha/tahun dan kerugian negara mencapai 35 triliun/taun, atau sebesar 82 miliar/hari. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara *supply and demand;* melemahnya penegakan hukum; besarnya pasar kayu luar negeri yang

[17] Mangunjaya, 2014, *Ekopesantren*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 87-88

menampung kayu illegal dan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan. (Purnama, 2006)

e. Kelembagaan Pesantren dan Program Lingkungan

Kelembagaan sebuah pesantren merupakan salah satu komponen penting yang dapat memberikan gambaran tentang status: kekuatan kelembagaan, kedewasaan serta kemampuan institusi tersebut untuk terus bergerak maju dan berkelanjutan. Dalam studi ketangguhan di Ponpes Sunan Gunung Jati Ba'alawy, Semarang, telah dilakukan uji deskripsi terkait dengan:

1.Sumber daya kelembagaan dan managemen

2.Sumber daya manusia

3.Sumber daya eksternal kelembagaan

4.Sumber daya keuangan

5.Program lingkungan (Agrofarm)

Menurut Azra (1997) secara fungsional, pondok pesantren menawarkan tiga fungsi, yaitu: *pertama,* transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam. *Kedua,* pemeliharaan tradisi Islam. *Ketiga,* reproduksi ulama. Sebagai sebuah lembaga Islam, maka kekhasanahan sebuah pesantren tentunya diwarnai dengan ruh tradisi dan upaya menularkan perilaku Islam termasuk kesalahan spiritual baik dalam bentuk sikap maupun perbuatan.

Secara evolutif sesungguhnya perkembangan pesantren dapat bervariasi di berbagai tempat. Noer (2001) mendeskripsikan lima bentuk perkembangan lembaga pesantren dari institusi asalnya dengan pola perkembangan sebagai berikut:

1. Pesantren yang terdiri dari hanya masjid dan rumah kiai. Pesantren ini sangat sederhana, di mana kiai menggunakan masjid atau ruahnya sendiri sebagai tempat mengajar. Adapun santri adalah mereka yang ikut terlibat mengaji berasal dari kawasan sekitar masjid dan rumah kiai tersebut.
2. Pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok atau asrama. Pola ini telah melengkapi pesantren dengan pondok (asrama) yang dapat menampung santri dari daerah lain.

3. Pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai pondok atau asrama, dan madrasah. Berbeda dengan yang pertama dan kedua, pola ini telah memakai sistem klasikal, santri mendapat pengajaran dari madrasah. Di samping itu belajar mengaji dan mengikuti pelajaran yang diberikan oleh kiai di pondok (asrama).
4. Pesantren yang tela berubah kelembagaannya yang terdiri dari rumah kiai, pondok, asrama, madrasah, dan tempat keterampilan. Pola ini dilengkapi dengan pekerjaan sesuai dengan sosial kemasyarakatannya seperti pertanian, peternakan, jahit-menjahit, dan sebagainya.
5. Pesantren dengan kelengkapan pola keempat ditambah dengan universitas, gedung pertemuan, tempat olah raga, dan sekolah umum. Pola ini bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang telah berkembang dan bisa dikatakan sebagi pesantren modern.

Penelitian pesantren ini, memiliki dua pola perkembangan kelembagaan 3 dan 4 dalam kategori di atas, yaitu: Ponpes Sunan Gunung Jati Ba'alawy, Semarang memiliki institusi dan fasilitas berupa rumah kiai, masjid, pondok, asrama, dan tempat keterampilan.

Mengintegrasikan nilai-nilai inheren dalam pembangunan berkelanjutan pada semua aspek pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dengan asumsi pada sebuah kewajiban untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Pondok pesantren merupakan lembaga Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Sebuah dasar yang kuat dalam kaidah *ushul fiqh* tentang lingkungan yang bersifat universal adalah termasuk menghindarkan keburukan dan mengambil jalan yang baik yang dimensinya bersifat etis (Duraseh, 2009).

Kelebihan pesantren sebagai lembaga berbasis agama (*faith base organization*) yang mempunyai karakter sebagai lembaga non formal dan foramal adalah kemudahan dalam mengambil keputusan lebih cepat, karena tidak terpengaruh oleh birokrasi, bahkan cepat dan mampu segera beradaptasi (UNISCO 2007). Sebagaimana upaya yang pararel mencapai maksud pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Program Sekolah Adiwiyata (KLH 2010) bertujuan menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat

pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga kemudian hari warga sekolah tersebut dapat bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini pesantren Ponpes Sunan Gunung Jati Ba'alawy, Semarang menunjukkan indikator program lingkungan dalam lingkup pesantren dan sekitar, namun masih dalam taraf berkembang. Belum menyentuh pada indikator penerapan program lingkungan secara masif dan sistematis. Pesantren ini telah menerapkan sekolah berbudaya lingkungan dengan menyelenggarakan ketertiban lingkungan hidup dan secara administratif yang membawahi berbagai seksi kegiatan lingkungan seperti: pertanian, peternakan, dan kebersihan lingkungan. Dan kadang hampir setiap tiga bulan sekali mengadakan seminar lingkungan hidup yang menyertakan masyarakat sekitar untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

f. **Kesadaran Lingkungan di Kalangan Santri**

Hal yang penting dalam pendidikan lingkungan adalah bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi manusia, baik secara individual maupun kolektif untuk beruah. McKenzie dan Smith (1999) mengatakan, untuk mempengaruhi agar seorang dapat berubah kita harus mengerti bahwa mereka akan menerima perubahan sebagai penghambat atau diuntungkan untuk sebuah aksi. Untuk itu ada tiga ide kunci untuk melihat aspek perubahan perilaku tersebut:

1. Seseorang akan secara alami tertarik untuk berbuat karena merasa ada keuntungan yang tinggi dengan sedikit hambatan (kerugian);
2. Perasaan terlambat (dirugikan) sangat bervariasi di tingkat individual, si mana keuntungan untuk seseorang barangkali merupakan kerugian untuk yang lain;
3. Perubahan perilaku akan berkompetisi dengan perilaku yang lain.

Oleh karena itu, seseorang harus membuat pilihan dalam perubahan perilaku. Mengubah satu perilaku misalnya, untuk mendaur ulang sampah

organik menjadi kompos, berarti mengubah kebiasaan untuk menempatkan sampah an-organik pada tempat sampah yang sama.[18]

Santri pada umumnya (tidak hanya di Ponpes Sunan Gunung Jati Ba'alawy, Semarang) sepakat bahwa Islam adalah agama yang menunjukkan pola hidup yang berwawasan lingkungan. agama sangat mendorong kegiatan dan aksi-aksi yang terkait dengan perawatan bumi yang berdampak positif pada kehidupan. Pemahaman ini dapat dijadikan acuan ataupun pintu masuk pada kegiatan praktis terkait dengan aksi menjaga lingkungan yang seharusnya lebih intensif dilakukan di kalangan santri dalam lingkungan pesantren.

Kesimpulan

Sejak Islam hadir sebagai pedoman hidup manusia, maka sejak saat itu juga Islam menjadi salah satu acuan berperilaku umat dalam melakukan pengelolaan alam dengan baik. Agama (Islam) yang berlandaskan kitab suci tidak pernah menyuruh dan membiarkan kerusakan terjadi di muka bumi. Dan tidak perah pula menyuruh umatnya melakukan suatu kerusakan di muka bumi. Islam telah mengatur bagaimana cara umatnya menjalani kehidupan di bumi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan alam di sekitarnya agar tidak terjadi kerusakan. Mungkin salah satunya lewat lembaga pesantren, sebagai pembawa syiar dan ajaran perdamaian.

Pondok pesantren merupakan lembaga yang penting dalam menjembatani kegiatan lingkungan di tingkat akar rumput, antar komunitas pesantren dan masyarakat sekitar. Selain itu, pada umumnya santri mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa pelajaran dan pengajaran yang diberikan oleh pihak pesantren (kiai dan ustadz) kepada santri baik melalui pengajian, khutbah jum'at, ataupun pelajaran di kelas tentang bagaimana pentingnya merawat lingkungan diterima dan dicerna dengan baik oleh para santri.

Kesigapan pesantren dalam menyuarakan aksi terhadap kepedulian lingkungan juga direspon baik oleh para santri dan masyarakat sekitar, dan mendapatkan dukungan yang kuat dari *stakeholder*, trutama pemangku

[18] Mangunjaya, 2014, *Ekopesasntren,* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 122

kebijakan. Hal ini dikarenakan bahwa desain ekopesantren secara ideal merupakan bentuk institusi yang kuat yang di dalamnya mencakup keterlibatan para kiai, santri, yang diikuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup, (KLH), perangkat pemerintah, dan para NGO Lingkungan yang sama-sama peduli dan memiliki tujuan yang sama, yakni program penyelamatan lingkungan. Kedepannya mungkin program ini akan dapat lebih berkembang pesat di kalangan lembaga pesantren jika program ini memiliki sentuhan program yang lebih sistematis.



DAFTAR PUSTAKA

DEPAG RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia, 2003).

Raharjo M. Dawam, "Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren", Pengantar dalam M. Dawam Raharjo (ed), Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah (Jakarta: P3M, 1985).

Khuluq Lathiful, Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari (Yogyakarta: LkiS, 2000).

Fajar Malik, Visi Pembaruan Pendidikan Islam (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia / LP3NI;1998).

Aqil Said Siradj, Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999).

Wahid Abdurrahman, Pesantren Masa Depan (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

Azra Azyumardi, Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999).

Wawancara dengan KH. Muhammad Masroni, selaku Pengasuh Pondok Sunan Gunung Jati Ba'alawy, Semarang pada hari Rabu (9/1/19).

Wawancara dengan Abu Fadhol selaku Lurah Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawi, Semarang pada hari Rabu (9/1/19).

Wawancara dengan KH Arja' Imroni mantan Sekretaris PWNU Jateng yang sekarang menjabat sebagai Wakil Katib Am PWNU Jateng, pada Kamis (3/1/19).

Wawancara dengan koordinator Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Nasional, Gus Roy Murtadho, Minggu (6/1/19).

Wawancara dengan Direktur Ekskutif Sajogyo Institute, Amir Mahmud, Minggu (6/1/19).

Mangunjaya, Ekopesantren, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA):

Mempertahankan Nilai Kultural Melalaui Penyelamatan Lingkungan

Oleh: M Mufti Muaddib

Abstrak:

Gerakan sosial perlawanan rakyat bukanlah tanpa sebuah alasan. Faktor ketidak adilan mendominasi sebagian besar dari akar semua permaslahan. Pasca Reformasi bentu-bentuk perlawanan (*resistance*) semakin subur dan berkembang. Masyarakat yang semakin terbuka melahirkan berbagai macam bentuk gerakan dengan ideologi yang tak kalah beragam. Kreativitas ini lah semakin mendorong dan membuat model-model gerakan perlawanan ini semakin variatif. Salah satu bentuk itu didasari atas rasa kesamaan nasib yang kemudian dikuatkan dalam semangat dan wadah yang sama. Tak jarang faktor teologis menjadi semangat yang terus menyemai perlawanan. Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) merupakan organisai masyarakat yang lahir atas dinamika intelektualitas terutama dari kalangan terpelajar muslim. Membawakan semangat kultutal yang selama ini menjadi identitas kultural keagamaan masyarakat nusantara (Nahdiyin). Atas dasar itu organisai yang lahir di dekade kedua abad ke 21 ini menaruhkan perhatian khususnya atas persoalan dan penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia dari

kejatahan perusahaan ekstraksi global maupun nasional. Semangat perlawanan dari sebagian besar mereka yang menjadi korban adalah masyarakat kecil pedesaan yang selama ini menjaga identitas kenusantaraan mereka dalam bentuk amaliyah kultural keagamaan yang akan hilang dalam gerusan kejatan perusakan alam sekitar.

Keyword: FNKSDA, Nahdliyin, Masyarakat, Kultural, Keagamaan.

Pendahuluan

"... Perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman, pengaruh, dan sisa-sasa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing..."[1]

Sekretaris Jenderal KPA (Konsorsium Pemharuan Agraria) Dewi Kartika mengatakan selama pemerintahan Jokowi-JK, KPA mencatatkan terdapat 41 orang tewas, 546 orang menjadi korban penganiayaan, 51 orang tertembak, 940 petani dan pejuang agrarian dikriminalisasi di berbagai wilayah konflik agraria.[2]

Hampir semua mereka yang menjadi korban atas konflik ini adalah masyarakat lemah terpinggirkan; petani, nelayan, buruh, masyarakat miskin kota, masyarakat adat, dan lainnya. Walaupun jumlah korban terus bertambah, tak lantas membuat pemerintah menanggalkan sejumlah program pembangunan berkelanjutan (*sustainable developmentalism*) dan perusahaan-perusahaan ekstraksi yang menyingkirkan banyak hak masyarakat dari tempat mereka.

Atas dasar ini, sedikit melatar belakangi lahirnya FNKSDA yang digerakkan oleh para kaum terpelajar muda dan masyarakat *grassroot* muslim yang memiliki keresahan yang sama. Terlebih masyarakat yang menjadi korban adalah mereka

[1]Sambutan Menteri Agraria Sadjarwo pada sambutan pembahasan rancangan UU yang mencerminkan politik hukum dari lahirnya UUPA. Dikutip dar buku "Kontitusionalisme Agraria" karya Yance Arizona, (2014: 62).

[2]https://www.google.com/amp/s/amp.katadata.co.id/berita/2019/01/03/selama-2018-konflik-agraria-paling-banyak-di-sektor-perkebunan diakses pada 9 November 2018.

yang selama ini menjaga identitas kultural kegamaam, yang menjadi kekuatan Nahdliyin di *grassroot* (akar rumput).

Kelahiran FNKSDA sebagaimana disampaikan Bosman Batubara[3] bahwa bermula dari perjumpaan-perjumpaan yang tak terduga (*unintended encounters*), namun Muhammad Al Fayyadl (biasa disapa Gus Fayyadl) menyebutnya sebagai *serendipity,* atau sesuatu yang berharga yang ditemukan tanpa sengaja.[4]

Semangat kaum muda berlatar belakang Nahdliyin dalam diskusi-diskusi yang dilanjutkan perumusan sebuah organisasi perjuangan. Karena semangat ini muncul kesadaran secara kolektif atas keresahan konflik di masyarakat. Terutama dalam hubungan hilangnya area produksi pangan karena dampak masifnya pembangunan dalam karena dampak keterbukaan pasar global kapitalistik yang sedang dijalankan oleh negara.

Dan dalam kasus-kasus ini, khususnya yang terjadi di Pulau Jawa, mayoritas para korban justru adalah warga Nahdliyin yang memang basisnya di pedesaan dan mayoritas sebagai petani. Sayangnya NU secara kelembagaan dirasa belum memberikan perhatian yang memadai terkait konflik-konflik agrarian ini.[5]

FNKSDA (Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam) resmi dideklarasikan pada 18 Desember 2013 di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, sebuah organisasi jaringan kaum santri untuk isu agraria dan sumber daya alam yang memiliki tujuan melawan kapitalisme ekstraktif di Indonesia, yang semakin berkembang akibat kebijakan neoliberal; pemerintah dalam memberi konsesi-konsesi bagi perusahaan perusak lingkungan dan sumber daya alam masyarakat.[6] Selanjutnya ditetapkan pada Musyawarah Nasional I pada tanggal 3 April 2015 di Kuningan.[7]

---

[3] Sebagai salah satu yang mengagas awal berdirinya FNKSDA yang merupakan alumnus program sarjana di Jurusan Teknik Geologi, Universitas Gajah Mada, dan master di Interuniversity Programme in Water Resources Enginering, Katholieke Univrsiteit Leuvren dan Vrije Universiteit Brussel Belgia.

[4]Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal.. 58

[5] Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal.. 60

[6] https://ala-nu.com/momen-momen-progresif-islam-di-indonesia/, diakses pada tgl 13/12/18

[7] AD/ART BAB I Pasal 2

Deklarasi ini dibarengi dengan rilisnya pernyataan sikap yang diberi judul "Resolusi Jihad Jilid II, Mempertahankan Tanah Air dari Rongrongan Kapitalisme Ekstraktif" yang merujuk pada resolusi jihad NU pada tahun 1946 di bawah pimpinan Hadrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, yang menyatakan bahwa mempertahankan tanah air dari rong-rongan penjajah adalah *Fardhu 'ain* (wajib) bagi muslim.[8]

Meski makna persoalan agraria tidak hanya berkutat pada tanah saja, melainkan juga berbicara ruang dan keadilan. Maka dari itu memperjuangkan sebuah keadilan yang dilakukan oleh FNKSDA sebagai organisasi perserikatan, perlu adanya kepedulian dan rasa kepemilikan kolektif atas dasar cita-cita yang sama dalam implikasi perubahan kehidupan. Dan mendorong kesadaran kolektif akan eksistensi kehidupan yang terancam atas ketidak seimbangan eksplotasi alam.[9]

Teori *Venn Agraria* menggambarkan cakupan yang cukup luas, yaitu 1) bumi mencakup benda di atas bumi, benda yang ditanam di bumi, benda ditubuh bumi; 2) air mencakup perairan lautan, perairan pedalaman, bumi di bawah perairan; 3) ruang angkasa mencakup angkasa di atas perairan dan angkasa di atas bumi. Pengertian inilah yang di atur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).[10]

Selain kultur-kultur yang dikembangkan dalam FNKSDA juga berusaha menjadi sintesa dari praktik-raktik tak baik yang selama ini ada di organisasi

---

[8]Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal.. 69

[9]Persoalam agraria memang secara general yang menjadi platform perjuangan. Sebutan Agraria tidak selalu dipakai dalam arti yang sama. Dalam bahasa Latin, *ager* berarti tanah atau sebidang tanah. *Agrarius* berarti perladangan, persawahan, pertanian. Agraria juga berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, urusan pemilikan tanah. Sebutan agaria dalam bahasa Inggris (agrarian) mengacu pada arti tanah yang hubungannya dengan usaha pertanian. Dari pengertian ini agrarian merujuak pada hal yang berkaitan dengan tanah dan segala aspeknya. Sebenarnya soal agararia tidak menyangkut soal tanah saja melainkan juga mencakup soal perairan, tanah di bawah perairan dan uadara serta kekayaan yang terkandung di dalamnya.

[10]Abu Rohmad, Pradigma Resolusi Konflik Agraria, Semarang: Walisongo Press, 2018, hlm .. 25

lain, termasuk NU sendiri. Seperti kultur patronase, feodalisme, dan senioritas. Ini semua hendak dikikis dalam front. Karenanya, misal di front sebisa mungkin dihindari stratifikasi sosial, seperti antara Gus (putra kiai) dan santri biasa. Karenanya di FNKSDA semua orang dipanggil Gus, tanpa memandang latar belakangnya.[11]

"Panggilan gus itu memang dulu kesepakatan waktu di Jogja. Karena di zaman pergerakan dulu, era pra-kemerdekaan itukan panggilannya Bung. Bung Karno, Bung Hatta dll. Makannya kita sebagai Nahdliyin harus punya panggilan akrab, dipilihlah panggilan adalah Gus. Itu sebenanya kalau di gerakan itu Bung. Nahdliyin kita artikan secara luas adalah orang-orang yang bangkit untuk berjuang. Jadi kalau di kita Gus itu bukan panggilan sekedar untuk anak kiai, tapi semua yang berjuang. Karena kita di front ini semua sedang berjuang, makannya dipanggil Gus semua,"[12]

Panggilan Gus harus bersifat emansipaitf, perlawanan. Awalnya panggilan ini adalah sebuah doa dan penghormatan untuk para putra kiai agar menjadi seperti ayahnya. Kiai beda dengan kapala sekolah, kepala sekolah tidak punya preferensi untuk membela masyarakat sekitarnya. Beda dengan pesantren, pesantren lahir secara organik, dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, tata kelolanya juga *musyarokah*.[13]

Menurut Gus Roy selain Gus yang berani melakukan bunuh diri identitas sebagaimana diungkapkan Al Fayyadl. *Pertama,* mengabdi kepada agama, *kedua*, mengamalkan ilmunya, *ketiga*, punya visi emansipatif membabaskan. Bukan membebaskan dirinya dari belenggu kemiskainan, tapi membabaskan masyarakat luas. Kini para Gus hanya menyisakan modal kultural yang tinggal dijalankan atas perjuanagn sesepuh mereka.

[11]Sebagaimana dijelaskan Fuad Faizi (Gus Faiz) pada Pesantren Agraria Cirebon Raya, pada 14-17 Oktober 2017 di Pesantren Babakan Ciwarigin, Cirebon.

[12]Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal.. 85

[13]Disarikan dari wawancara dengan Gus Roy Murtadho, Koordinator FNKSDA Nasinoal, dalam acara Pesantren Ekologi di Ponpes SGJB Semarang, 28 Desember 2018.

"Dulu kami di FNKSDA mempromosikan semua kader FNKSDA kalau mengabdi kepada agama dan membela masyarakat dia adalah Gus. Kita panggil Gus."[14]

Dalam pokok-pokok perjuangannya, dengan eksplisit juga disebutkan bahwa secara ekonomi-politik, FNKSDA akan menentang tatanan kapitalisme beserta akses-aksesnya, melibatkan diri secara aktif dalam perjuangan masyarakat yang menjadi korban konflik sumber daya alam untuk melawan kekuatan kapitalisme dan upaya perusakan alam. Frasa terakhir "upaya perusakan alam" secara tidak langsung menunjukan bahwa diantara sekian banyak sektor dalam kapitalisme, FNKSDA akan lebih terfokus pada isu kapitalisme ekstraktif, yang berdampak langsung pada sektor agraria."[15]

Semangat kedualatan sebagai tujuan besar FNKSDA untuk mendorong kemampuan kemandirian pangan yang sebenarnya mampu dilakukan masyarakat. NU yang identik dengan petani merupakan sebuah identitas Indonesia selama ini sebagai negara agraris. Kedaulatan atas pangan juga kedaulatan atas tempat produksi pangan. Maka dari itu FNKSDA berusaha mendorong secara regulasi maupun non-regulasi dalam hal pengakuan atas; tata milik, tata kelola, dan tata guna area produksi dan sumber daya alam yang ada dari ancaman kerusakan ekologis.

Selain itu kedaulatan pangan memprioritaskan produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi. Kedaulatan pangan mempromosikan perdagangan yang transparan dan menjamin keadilan pendapatan semua orang serta hak konsumen untuk mengontrol makanan dan nutrisi mereka. Juga menjamin bahwa hak untuk menggunakan dan mengelola lahan, wilayah, air, bibit, ternak dan keragaman yang mereka miliki tetap berada di tangan mereka yang memproduksi pangan. Kedaulatan pangan mengisyaratkan hubungan sosial yang baru yang bebas dari tekanan dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan antar orang,

---

[14] Disarikan dari wawancara dengan Gus Roy Murtadho, Koordinator FNKSDA Nasinoal, dalam acara Pesantren Ekologi di Ponpes SGJB Semarang, 28 Desember 2018.

[15] Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal.. 94 Lembar kerja FNKSDA hlm 7 dan teks "Resolusi Jihad Jilid II : Mmpertahankan Tanah Air dari Rombongan Kapitalisme Ekstraktif,"

kelompok ras, kelas sosial dan perbedaan generasi. (Bernstein & Bachriadi, 2014)[16]

Keinginan untuk membuat tata kelola SDA membuka keinginan merealisasikan apa yang menjadi obrolan melahirkan FNKSDA semakin menguat. Dalan diskusi-diskusi yang diselenggarakan muncul kesadaran akan kebutuhan adanya suatu gerakan yang menaruh perhatian terhadap konflik tata kelola SDA, khususnya yang berwujud konflik agraria. Terlebih jika itu berkaitan langsung dengan warga Nahdliyin yang menjadi korbannya. Alih-alih membatasi diri hanya berfokus di isu konflik agraria Urutsewu Kebumen, diskusi-diskusi ini menghasilkan keputusan untuk mengadakan forum diskusi yang lebih luas, yang melibatkan aktivis sosial diberbagai daerah, utamanya yang sudah saling terkoneksi sebelumnya dalam jaringan pertemuan generasi muda NU guna membahas isu tata kalola SDA dan konflik agraria secara lebih luas.[17]

Menyelamatkan Nilai Materil Kenusantaraan

NU mampu bertahan dalam tantangan perubahan dinamika, menjadikannya sebagai organisai masyarakat terbesar di Indonesia, namun belum mampu memastikan keadilan saat masyarakatnya menjadi korban atas ketidak adilan. Semestinya NU tidak hanya sebagai organisasi keagamaan semata. Nanum juga harus mempu memberikan fungsi sosial mereka, dalam menyampaikan aspirasi ketidakadilan yang dialami masyarakat. Melihat konflik tata kelola SDA saat objek yang dipersengketakan merupakan tempat menopang hajat hidup orang banyak.

Kemapanan kehidupan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan atas akses SDA sebagai tempat produksi berdampak pada stabilitas sosial keagamaan masyarakat sendiri. Sebaliknya, konflik yang berkepanjangan membuat kondisi dan psikologi masyarakat tidak stabil. Dengan demikian NU sendiri yang akan

[16]Sityi Maesaroh Qoriah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan di Pesantren Ekologi At-Thariq Garut, Jurnal Yin Yang Vol. 13 No. 2 th 2018, hlm .. 4

[17] Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal.. 61

dirugikan. Tergerusnya kultur budaya keagamaan masyarakat yang selama ini menjadi identitas dan kekuatan besar NU; tahlilan, dziba'an, dan semua yang identik dengan NU akan hilang, karena kondisi yang tidak stabil. Namun NU belum menyadari ini sebagai ancaman yang serius, melihat kurangnya perhatian NU pada persoalan ekonomi-politik selama ini sebagai persoalan dasar.

Ada suatu yang hilang, dulu budaya di kampong, orang mau panen hasil garapan ladang (memetik) mereka menyempatkan untuk sowan ke kiai terlebih dahulu. Menanyakan hari yang bagus. Hal tersebut menandakan bahwa kiai menjadi tempat berpulangnya segala persoalan, tetapi sekarang hanya persoalan agama saja yang disowankan, tidak persoalan hidup lagi. Hari ini ada peran yang hilang dari kiai.[18]

Karena adanya hal-hal yang hilang demikian menurut Gus Roy, FNKSDA hadir untuk menjadi jembatan antara dunia pesantren dan dunia yang lebih luas di kehidupan riil kemasyarakatan. Dikarenakan ada aspek lokalitas material dari kenusantaraan kita yang hilang.

"Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan di bidang ekonomi untuk 'mengusahakan pemerataan kesempatan menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat' sudah sepatutnya memiliki sikap terhadap persoalan ini. Terlebih-lebih, dalam banyak kasus konflik SDA di Indonesia warga NU banyak menjadi korban secara langsung. Misalnya kasus Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo, penanaman dinamit untuk melakukan *survei seismic* oleh Exon di Jombang, konflik warga dengan perusahaan migas di Sumenep, konflik air antara warga dengan PT. Aqua Danone di Klaten, konflik warga dengan tantara dan perusahaan tambang di Kebumen, tambang emas Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi, Bandara Kulon Progo, kasus perampasan lahan oleh perhutani di Surokonto Wetan, dan lainnya"

Kedua, dalam banyak kasus, kelompok masyarakat semacam ini masih kurang mendapat perhatian dari NU secara struktural, baik di tingkat pengurus

[18]Waancara dengan direktur Sajogyo Institute, Amir Mahmud yang juga kader FNKSDA saat mengisi acara Pesantren Ekologis di Ponpes SGJB Semarang, 28/12/2018.

besar maupun tingkat di bawahnya. Bahkan dalam diskusi tersebut terungkap, dalam beberapa kasus konflik antara koorporasi dan warga, seperti di Pati dan Banyuwangi, pengurus NU justru memihak perusahaan yang akan didirikan. Oleh karena itulah, para inisiator FNKSDA merasa gerakana ini memang diperlukan.[19]

"Sejauh ini PBNU kurang memberikan perhatian terhadap permasalahan ini. Hal ini misalnya dibuktikan dengan tidak adanya badan yang secara terus menerus mengurusi permasalahan ini di dalam struktur PBNU. Di sisi lain konflik SDA dengan pola yang hampir sama sudah sangat banyak terjadi dan memerlukan solusi terpadu. Karena itu diskusi tentang NU dan Konflik Tata Kelola SDA yang telah dilaksanakan di Yogyakarta pada 4 Juli 2013 adalah langkah awal untuk merumuskan agenda NU di bidang ini. Baik ia akan masuk di struktur NU ataupun sama sekali di luar.[20]

"Sebenanya persoalan seperti ini pernah diperbincangkan di lingkungan NU. Pada tahun 2012, melalui Konferensi Banser (Konbes) di Cirebon, PBNU dibidang ekonomi merekomendasikan renegosiasi kontrak-kontrak karya pertambangan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi pemasukan Indonesia dan kesejahteraan warga. Elemen lain yang dekat dengan NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) malah memiliki tuntutan yang lebih tinggi. Pada tahun 2012, PMII menuntut dilakukannya nasionalisasi terhadap aset pertambangan dan energi. Sementara Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menyatakan bahwa tujuan akhir dari tata kelola energi adalah kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Akan tetapi secara organisatoris, hampir tidak ada gelombang advokasi yang masif dari kelompok NU terhadap warga yang mengalami persoalan konflik SDA. PBNU sendiri lebih banyak bermain di level regulasi sepeti *judicial riview* UU Migas, tetapi tidak banyak mendorong pengurus untuk turun ke bawah.[21]

---

[19]Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal.. 64

[20]Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal.. 64

[21]Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal.. 66

Penggunaan istilah ‘Nahdliyin’ disini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menunjukan bahwa FNKSDA bukan Banom (Badan Otonom) NU, tetapi mempunyai ikatan kultural dengan NU. *Kedua*, alih-alih berfokus pada NU sebagai *jam’iyah* (organisasi struktural). FNKSDA akan lebih menaruh perhatian pada problem tata kelola SDA yang menyangkut Nahdliyin sebagai warga/jama’ah NU dan korban. *Ketiga*, untuk menggambarkan bahwa FNKSDA digerakkan oleh pegiat-pegiat, terutama generasi muda yang berasal dari kultur Nahdliyin, sehingga secara strategis, hal ini akan memudahkan pendekatan terhadap komunitas Nahdliyin yang terdampak konflik tata kelolola SDA. *Keempat*, bukannya mengikatkan diri dengan NU secara kelembagaan, FNKSDA mengambil spirit pendirian NU sendiri, “*Nahdlah* yaitu kebangkitan”. Nahdliyin disini dimaknai sebagai “orang-orang yang bangkit” khususnya juga sebagai penyemangat bagi rakyat yang sedang mempertahankan kedaulatan alamnya. *Kelima*, karena Nahdliyin dimaknai tidak secara sempit dan eksklusif sebagai “warga NU” semata, maka penggunaan kata Nahdliyin juga menutup ruang kemungkinan orang-orang yang tidak datang dari kultur Islam Tradisional ala-NU untuk tetap bisa bergabung dan bergiat dalam FNKSDA. *Keenam*, meskipun tidak hendak mengikatkan dengan NU secara struktural, namun harus diakui bahwa sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, hal ini cukup strategis dan dengan menautkan diri pada NU, meskipun secara kultural, makna FNKSDA mempunyai legitimasi sosial politik tersendiri, yang sangat bermanfaat dalam gerakan FNKSDA, utamanya dalam menghadapi dan menolak koorporasi ekstrakstif yang akan menjadikan rakyat sebagai korbannya.[22]

Mengaitkan isu-isu lingkungan dengan Teologis, seperti sedekah laut di masyarakat pesisir sebagaimana memaknai alam, yang sebenarnya. Menggabungkan peristiwa-peristiwa alam dengan konsep kehidupan manusia. Teologi tanah, jika kita berbicara kedaulatan tersebut, erat kaitannya dengan pengakuan jika semua orang memiliki hubungan yang dekat dengan alam sebagai ciptaan Tuhan dan harus dirawat bersama-sama, kedaulatan dari sisi milik, pengelolaan, dan pemanfaatan. Itulah konsep berdaulat.[23]

[22]Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal.. 67, hasil pemaparan ke FNKSDA an oleh gus Syatori saat PA ciebon 14 Oktober 2017

[23]Disarikan dari wawancara dengan Gus Syatori, 23 Oktober 2018.

"Nahdliyin itu artinya bangkit, (bukan NU) sebenarnya kalau dari sisi itu kemudian ada orang-orang yang tersingkir dari alamnya padahal mereka memiliki hubungan yang sangat dekat, orang-orang yang bangkit, orang-orang yang dilemahkan tertindas lalu bangkit, kita ini yang Nahdliyin. Jadi orang-orang yang tersingkir ini, jadi gerakan front Nahdliyin ini adalah gerakan kebangkitan orang-orang yang tersingkir dari alamnya,"[24]

Sebagaimana organisasi persyerikatan yang independen FNKSDA mempunyai keunikan tersediri. Menerapkan ekonomi berjamaah yang disokong secara mandiri oleh seluruh kadernya. Dengan seperti ini, FNKSDA terhindar dari penerimaan bantuan dari pihak luar, sehingga membuat kerja-kerja mereka tidak ada tendensi kepentingan, yang membuat mereka murni berjuang.

Menurut Gus Fayyadl, kemandirian dari ikatan ketergantungan dengan pihak lain inilah yang membuat FNKSDA *nothing to lose* dan total dalam perjuangannya. "Dari segi kemandirian, saya melihat ada kebebasan kita dalam memihak, dalam membela kasus dan seterusnya. Itu karena kita tidak punya ketergantungan dengan siapapun. Tidak ada patron senior-yunior dalam front."[25]

Dari banyak kegiatan PA (Pesantren Agraria)[26] yang sudah dilakukan untuk menyukseskan acara tersebut, biaya akomodasi sepenuhnya ditanggung swadaya bersama dari para peserta dan panitia. Karena dalam sistem pembiyayaan organisasi maupun kegiatan FNKSDA menghindari adanya sumbangan dana dari pihak luar. Juga karena tidak adanya kemandirian ekonomi yang seringkali menghambat semangat perjuangan yang berakibat terjeratnya sebuah kepentingan. Maka dari itu, konsep ekonomi koperasilah yang sedang diupayakan. Salah satu bentuk usaha front untuk mencari sumber dana secara pribadi yang sudah berjalan yaitu adanya *wedus merdiko* yang dikelola oleh masyarakat Urut Sewu.

---

[24]Wawancara dengan Gus Syatori yang merupakan salah satu komite nasional saat Munas II FNKSDA 23-25 Oktober 2018.

[25]Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal..76

[26] Pesantren Agraria merupakan Pendidikan awal sebagai jenjang pengkaderan, maka untuk mnjadi kader harus mengikuti PA terlebih dahulu, sebagaimana Pasal 14

Hal ini, menurut Gus Syatori, mengingatkannya akan cerita muktamar NU yang pertama pada pertengahan dekade 1920-an, ketika NU belum menjadi rebutan partai-partai dan pihak-pihak yang berkepentingan dan menggelontorkan dana. Kala itu, warga Nahdliyin sampai merelakan menjual ternak mereka untuk sekedar menghadiri muktamar dan bertemu dengan para kiai, walaupun bahkan mereka tak berperan apa-apa dalam muktamar itu.[27]

Terlebih yang menjadikannya semakin menarik karena FNKSDA ini digerakan oleh orang-orang yang lahir dari tradisi keislaman yang kuat dan memiliki afiliasi ideologis kultural dengan NU sebagai ormas keagamaan Islam terbesar, dimana isu agraria dan taat kelola SDA biasanya tak menjadi perhatian utama. Dan sekarang ada sekelompok santri yang bergiat di isu ini, padahal tidak sedikit pula diantara mereka yang merupakan keluarga pesantren dan putra kiai (Gus) yang selama ini menempati posisi luhur dalam stratifikasi sosial masyarakat santri. Tetapi mereka tak segan untuk "Bunuh diri identitas" dan betul-betul mengurus umat, yang selama ini cenderung diabaikan oleh NU struktural.[28]

"FNKSDA itu berbentuk progresif, religious, terbuka, militan, demokratis, dan independen. Keorganisasian FNKSDA berbentuk persyarikatan"[29]. Perjuangan FNKSDA berprinsip pada nilai-nilai *Ahlussunah Wal Jamaah* dengan cita-cita pembebasan kaum *Mustadh'afin* dalam bingkai sosialisme. Penggunaan istilah front sebagai konotasi sifat militan, demokratis, dan independen secara berjejaring dan tidak terpusat namun terdesentralisir.

"Jama'ah front ini artinya orang yang tertarik dengan isu-isu yang diangkat oleh front, tetapi tidak bisa aktif disitu. Dari basis seperti inilah Nahdliyin. Karena banyak orang-orang, misalnya petani-petani yang tertarik sekali, bahkan mengaku saya sudah front Nahdliyin katanya, padahal mau ikut diskusi saja. Itu terjadi di Kebumen, di Urutsewu. Sempat ketika kita tanya, mereka merasa lebih NU dengan front Nahdliyin dibanding dengan NU itu sendiri,"[30]

[27]Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal.. 77

[28]Wawancara dengan Gus Fayyadl, sebagaimana dikutip dari Skripsi Nashir, hlm .. 79

[29] AD/ART BAB1 Pasal 3, hasil Munas II Semarang pada tanggal 23-25 Oktober 2018.

[30]Disamaikan oleh Gus Fayadl dalam Rapat Nasional FNKSDA di Babakan Cirebon 16 Oktober

Semangat Teologis dalam Menyelamatkan Ekologis

Sebagaimana cita-cita FNKSDA yang membebaskan dari penjajahan dalam bentuk kapitalisme ekstraktif, seluruh perjuangannya tidak terlepas dari nilai keimanan yang menjadi identitas para santri kader FNKSDA. "Bagian ini berisi penjelasan teologis dari korpus keislaman untuk memperkuat keimanan peserta berjuang di jalan penyelamatan ruang hidup dan tanah air. Islam sebagai Teologi Pembebasan di sini diformulasikan sebagai alat bergerak untuk membawa kaum Nahdliyin keluar dari ketertindasan dalam konteks tata kelola SDA,"[31]

Dalam perjalanannya, FNKSDA juga menyentuh dalam tataran amaliyah. Terutama membekali mereka masyarakat Nahdliyin yang terdampak dan menjadi korban yang rata-rata seorang petani dengan amalan-amalan dan doa, yang senantiasa dipanjatkan untuk mengiringi selama perjuangan mereka. Selain memalui amalan, sebagaimana dengan latar belakang kultur Nahdliyin juga diciptakan Sholawat Bumi oleh Gus Fayyadl yang menyatakan dengan berkah shalawat ini diharapkan 1) yang mengamalkan terhindar dari golongan orang yang terlibat dalam perusakan alam *'mufsidun'* 2) yang mengamalkan akan termasuk orang yang berjihad memperbaiki alam dan kehidupan di dalamya '*muslihun'* 3) dengan ditujukan pada tempat yang gersang, kekeringan, atau terkena penggusuran, maka tempat-tempat itu akan di pulihkan. Selain shalawat bumi ada juga Shalawat Marhaen yang merepresentasikan kaum yang termarjinalkan (*mustadh'afin*).

Dalam mempertahankan area kehidupan yang akan terampas, mereka dengan perlawanan yang ikonik. Identitas mereka sebagai warga Nahdliyin akrab dengan amaliyah-amaliyah NU juga menjadi senjata perjuangan. Mereka melakukan sholat dhuha secara berjamaah saat sebelum menghadapi proses penggusuran dan perampasan. Maulidan, sholawatan, tahlilan, istighosah, dan kenduren masih mereka percayai melalui panjatan-panjatan doa dengan harapan mendapat ridho Allah SWT atas perjuangan mereka. Jalan perjuangan

2017.

[31] Muhammad Nashirulhaq, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal.. 111, Pedoman Pegkaderan FNKSDA "Menegakan Kedaulatan, Menyelam Ruang Hidup dan Tanah Air" hlm 4

FNKSDA selalu mengangkat semangat lokalitas atas dasar nilai dan hak. Disebut juga sebagai *traditional action* yakni berupa tingkah laku berdasarkan kebiasaan yang muncul dari dari praktik-praktik yang mapan dan menghormati otoritas yang ada.[32]

Selain itu, hal lain yang menggenapi kebuntuan penyelesaian konflik agraria ialah diabaikannya pendekatan budaya dalam memandang, menangani, mencegah, dan mengantisipasi konflik agraria. Kompleksitas aspek ruang lingkup konflik itu mejalin pendekatan litigasi yang selama ini menjadi pendekatan yang sangat dominan dalam penyelesaian tanah banyak mengalami kebuntuan. Meskipun berhasil, pendekatan itu kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.[33]

Estetika bagi kami adalah estetika masyarakat, terutama mereka yang mengalami penindasan. Estetitka kelas mapan dan berkuasa bukanlah estetika kami. Dengan demikian kami akan berusaha terus membongkar semua bentuk hegemoni dan kooptasi estetika yang dilakukan oleh kelompok mapan dan berkuasa terhadap kelompok masyarakat miskin dan tertindas. Kami membedakan proses dengan hasil. Kami lebih menekankan estetika pada wilayah proses penciptaan sebagai wadah yang juga berfungsi menjadi alat penyadaran bagi semua bentuk ketidakadilan sosial yang berlangsung.[34]

"Sebagai bagian dari konsolidasi, saya kemudian diajak oleh Ubaidillah ke kebumen. Sekitar Agustus 2013, berbekal lembar kerja yang dihasilkan melalui pertemuan di LKiS, kami berangkat ke Kebumen. Dalam pertemuan di rumah Pak Seniman Martodikromo, kordinator Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS). Saya berkenalan dengan berbagai macam kelompok, terutama pada waktu itu hadir pula kawan-kawan dari Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA), yang segaran di Kebumen juga menjadi bagiannya. Pada kesempatan itu saya memperkenalkan FNKSDA dan mengajak mendiskusikan apa saja kira-kira yan bisa dilaksanakan." [35]

---

[32]Abu Rohmad, Pradigma Resolisu Konflik Agraria, Semarang: Walisongo Press, 2018, hlm .. 23

[33]Prof Abdul Jamil MA, dalam penagntar Pradigma Resolisu Konflik Agraria, Karya Abu Rohmad, Semarang: Walisongo Press, 2018

[34]Bosman Batubara, Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Urut Sewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen, Yogyakarta: Literasi Press, 2015, hlm.. 3

[35]Awal kisah Bosman Batubara pada awal-awal perintisan FNKSDA, dalam buku, Seni dan Sas-

Rumusan estetika Augusto Boal, sutradara teater, penulis, dan politisi dari Brasil sangatlah menarik. Dalam karya yang berjudul *The Aesthetics of the Oppresed* (2006: 18), Boal membedakan 'penciptaan' dan 'hasil yang sudah selesai'. Yang pertama adalah 'proses' dan kedua 'hasil/produk'. Berdasarkan ketagorisasi itu, Boal merumuskan bahwa yang paling estetika bagi Kaum Tertindas adalah "*The aesthetic proses which develops the perpections of the person who ractices it, though it may be very dedirable that it culminates in an artixtic product – the finished work of art for its amplificatory social power*" proses estetika yang mengembangkan persepsi orang yang berpraktik (kesenian), meski sangat disarankan ia tertuangkan menjadi produk artistik karya seni untuk menggalakan kekuatan sosialnya.[36]

Kiai Imam Zuhdi yang terakhir menjelaskan memberikan landasan bahwa semua perjuangan yang rakyat lakukan tidak terlepas dari panjatan doa kepada sang Maha Kuasa. Dari beberapa kali rapat keikutsertaan saya dalam rapat-rapat hampir semua rapat biasanya ditutup dengan doa yang di pimpim oleh kiai Imam Zuhdi.[37]

"Itu adalah masjid perjuangan," Pak imam Zuhdi menjunjuk masjid yang terletak persis di depan rumahnya ketika kami mengawali perbincangan. Perjuangan disini maknanya bahwa masjid inilah yang menjadi basis penolakan terhadap klaim tanah yang dilakukan oleh TNI AD di Urutsewu.[38]

Siang itu, Pak Kiai mengajak kami menonton video acara mujahadah peringatan 16 April pada 2012 dan 2013. Dalam peringatan tahun 2012 saya melihat sebuah keranda diarak. "Ada maksudnya pak Imam?" tanya salah seorang dari kami. "Siapa pun yang berkuasa pada akhirnya akan masuk ke keranda," demikian penjelasan Pak Imam tentang simbolisasi pemakaian keranda sebagai atribut dalam acara mujahadah tersebut. Video itu salah salah

---

tra untuk Kedaulatan Urut Sewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen, Yogyakarta: Literasi Press, 2015, hlm.. 6

[36]Bosman Batubara, Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Urut Sewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen, Yogyakarta: Literasi Press, 2015, hlm.. 10

[37]Bosman Batubara, Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Urut Sewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen, Yogyakarta: Literasi Press, 2015, hlm.. 23

[38]Bosman Batubara, Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Urut Sewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen, Yogyakarta: Literasi Press, 2015, hlm.. 27

satunya berisi nukilan orasi Sunu[39] yang berpesan kepada warga dengan hanya dua kata “Jangan takut!”.[40]

Masalah tanah adalah masalah hak asasi manusia (HAM), persoalan penghidupan dan pangan manusia. Siapa yang menguasai dan mengelola tanah akan menguasai pangan, atau ia dapat menguasai dan mengelola tanah akan menguasai pangan. Terpenuhinya pangan negeri memiliki arti tegaknya daya tahan negara, dan itulah arti pertahanan negara sesungguhnya. Sebeb tanpa ketersediaan lahan dan kemampuan memproduksi pangan masyarakat dan negara akan bergantung dengan pihak lain, didekte bahkan kehilangan kemerdekaan sejatinya.[41]

Istilah ‘tingkah laku kolektif’ pertama kali dimunculkan oleh Robert Park. tulisan Park bersama Burgers memperlihatkan pengaruh Gistave Le Bob dalam penggunaan sejumlah konsep seperti sugestibilitas, ketularan (*kontagion*), dan kepatuhan (*crowd)* kepada seorang pemimpin. Mereka juga memperlihatkan bahwa tingkah laku kolektif (*colektive behavior*) merupakan kekuatan yang dapat membawa perubahan. Kesimpulan Park akhirnya mengemukakan bahwa kerumunan (*crowd*) dan publik atau kelompok atau perkumpulan masa (*mass society*) mengakhiri ikatan-ikatan lama dan membawa individu ke dalam jalinan hubungan-hubungan baru (Turner dan Killian, 1978).[42]

Kekuatan-kekuatan kultural menjadi riil dan dapat diteliti secara empiris tatkala mereka dialih bantukan ke dalam motivasi, predisposisi, dan kecenderungan pribadi. Konsep mengenai kepribadian, merupakan cara yang bermanfaat dan sahih guna memperlihatkan konsistentsi di dalam motivasi, perilaku, keyakinan, dan predisposisi individu. Konsistensi ini kemudian tetap terus bertahan lintas waktu dan lintas peran-peran sosial.[43]

[39]Widodo Sunu Nugroho, kepala desa Wiromartan Mirit, merupakan salah satu lurah yang cukup vocal, dan selalu Bersama petani turun aksi dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

[40]Bosman Batubara, Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Urut Sewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen, Yogyakarta: Literasi Press, 2015, hlm.. 28

[41] M Nashih Lutfi, Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Urut Sewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen, Yogyakarta: Literasi Press, 2015, hlm.. 81

[42]Joni Rusmanto, Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Anatara Kekuatan dan Kelemahannya, Surabaya: Zifatama Publising, 2012 hlm 6

[43]Joni Rusmanto, Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Anatara Kekuatan dan Kelemah-

KH. Arja' Imroni[44] mengatakan bahwa NU sebagai organisasi masyarakat keagamaan yang besar harus mulai menyentuh pada persoalan yang dihadapi jamaahnya menjadi agenda yang penting. Sebagaimana NU yang lekat dengan tradisi fiqh (hukum Islam) harus mampu melahirkan legitimasi dan kepastian hukum dalam pandangan Islam terkait persoalan lingkungan. Selain itu budaya fiqh yang ada dalam kalangan NU syarat kaitanya dengan persoalan ibadah, yang tersemat dalam nilai-nilai spirit teologi untuk mencapai nilai kesempurnaan dalam ibadah. Meski dalam ibadah kita mengenal tidak semata terhadap Allah SWT melainkan juga ibadah secara sosial terhadap manusia dan seluruh ciptaan-Nya.

Secara epistimologi bagaimana (*ushul fiqh*) mengkontruksi terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dalam ushul fiqh kita mengenal teori *maslahat*. Maslahat itu menjadi *Maqashid Syariah,* (tujuan syariat) adalah mencapai kemaslahatan. Implementasi maslahat ada dua hal (1) *jalbil masholih* (menciptakan kemaslahatan) (2) *darul mafasid* (menghindari kerusakan).

Perjuangan perlawanan dengan semangat teologi keagamaan yang digaungkan FNKSDA sebagaimana yang waktu itu dilakukan SI (Sarikat Islam) yang menyatukan seluruh kekuatan kultural di zaman pergerakan nasional dengan gerakan perlawanan pemogokan kepada perusahaan. Faktor tidak adanya keadilan menjadi alasan kuat untuk bergerak bersama dalam memperjuangkannya.

Pada Juli 1912 SI yang sebelumnya SDI (Sarekat Dagang Islam) mulai meluas ke daerah pedesaan, adanya kekuatan dan solidaritas di kalangan anggota SI menggerakan tindakan 'yang tidak patut' diantara mereka terhadap para pegawai. Di perkebunan tebu Ceper dan beberapa perkebunan lainnya, petani mulai mogok dan menolak kerja paksa di perkebunan.[45]

Ekspansi SI ini terjadi ketika kebijakan kolonial dan statuta hukum SI belum diterapkan dan saat *Indische Partij* (IP) muncul dan menghilang seperti kilat

annya, Surabaya: Zifatama Publising, 2 012 hlm 9

[44]Akademisi UIN Walisongo Semarang dan Mantan sekretaris PWNU Jawa Tengah yang sekarang menjabat sebagai wakil Katib 'am PWNU Jawa Tengah

[45] Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Jakarta, PT:Pustaka Utama Grafiti 1997, hal.. 64

sebagai partai politik pertama di Hindia yang menyarakan 'Hindia Untuk orang Hindia' . Dalam keadaan seperti inilah dunia pergerakan lahir.[46]

Soewardi menentang pemimpin pusat dan mengusulkan agar persyaratan muslim dihapus dari syarat anggota. Judul jurnal SI Bandung Hindia Sarekat memperlihatkan pandangannya bahwa yang penting adalah solidaritas bukan hanya sesama muslim, tetapi sesama orang Hindia. Soewardi juga mengatakan bahwa orang Bumi Putra adalah manusia yang sederajat dengan orang Belanda, dan dengan begitu menantang dominasi Kolonial Belanda secara frontal. [47]

Atas saran Tirto Adhi Soerjo bahasa yang digunakan untuk menggerakan bangsa adalah bahasa tulisan. Para pemimpin SI selanjutnya memimpin SI baik melalui Bahasa tulisan mapun lisan, dan berhasil memobilisasi pengikut dari kalangan yang dapat membaca dan juga yang buta huruf.[48]

Semangat SI untuk menyelamatkan harga diri bangsa dari kolonialisme hingga perjuangan kreatif Tirto Adhi Soerjo di jalan literasi yang mencerdaskan kembali bisa kita saksikan saat ini. Bentuk-bentuk perjuangan semakin kreatif, dengan munculnya narasi-narasi lama yang akan kembali menumbuhkan rasa nasionalisme untuk sadar akan keterancaman ini.

Mendorong Ekonomi-Politik Kerakyatan

Sebagaimana FNKSDA berusaha memenuhi kebutuhan keuangan organisasinya dalam pengelolaan *wedus merdiko* (kambing merdeka). Diadakan dengan dana organisasi yang dibelikan kambing selanjutnya dikelola secara mandiri oleh petani di Urut Sewu secara *musyarokah* (bagi hasil) atau dalam bahasa Jawanya sistem *"paron".*

Persoalan SDA dan tanah menjadi pusat persoalan yang urgen di masyarakat, bukan persoalan yang lain, karena menyangkut pada hajat hidup mereka. Tanah, air, udara sekarang memang masih bebas, tetapi sekarang lagi dirongrong, khususnya tanah dan air. Di mana-mana ketika berbicara negara tidak akan pernah terlepas dari kata tanah dan air, lalu tanah itu air apa?. Terkadang kita

[46] Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Jakarta, PT:Pustaka Utama Grafiti 1997, hal.. 65
[47]Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Jakarta, PT:Pustaka Utama Grafiti 1997, hal.. 80
[48] Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Jakarta, PT:Pustaka Utama Grafiti 1997, hal.. 81

lupa akan tanah dan air. Tanah air sekarang sekedar simbolis saja di negara kita, kita tidak berbicara betul-betul terkait tanah dan air.[49]

Konsep ekonomi kerakyatan yang menjadi semangat perjuangan FNKSDA tidak luput dari semakin hilangnya tanah-tanah pertanian karena kebijakan pembangunan berkelanjutan. Menguatkan ekonomi rakyat dengan memulainya dari kemampuan untuk memproduksi pangan dan sebagai kebutuhannya secara mandiri. Rong-rongan ekonomi kapitalistik tidak dipungkiri akan menghilangkan ciri otentik kemampuan bertransaksi secara adil dan seimbang yang dimiliki masyarakat saat ini. Ekonomi neo-liberal dengan kapitalisme estraktifnya telah menghilangkan kemampuan secara besar petani Indonesia dalam menyediakan pangan. Membuat masyarakat dan negara ini secara umum tidak pernah berdaulat atas pangannya.

Perbedaan kepentingan antara penguasa dan rakyat atas konsep ekonomi politik tidak pernah menemui titik temu kesepahaman. Penguasa melalui pemerintah menganggap bahwa tanah merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan. Sebaliknya rakyat (terutama para petani) memiliki presepsi bahwa tanah adalah segala sesuatu yang diusahakan untuk kehidupan mereka yang ditentukan oleh tanah, demikian pula masa depan generasi mereka tergantung pada tanah yang dimilikinya (Scoot, 1976).[50]

Melahirkan Gerakan Sosial

Perbedaan persepsi dalam memahami ekonomi dan pembangunan antara keinginan rakyat dengan penguasa “pemerintah” menimbulkan kekecewaan. Hal ini dikarenakana rasa ketidakadilan yang dialami masyarakat, sehingga mereka merasa perlu tergerak untuk berbuat sesuatu untuk mendorong segala bentuk kebijakan yang mengembalikan hak mereka dalam bentuk gerakan sosial.

Betapapun maju dan canggihnya teknologi modern masa kini, belum ada yang bisa memproduksi lahan (*land*) dan tanah (*soil*). Tanah, air, udara,

[49]Salah satu materi Gus Syatori yang disampaikan pada PA Cirebon Raya, pada 14-17 Oktober 2017 di Pesantren Babakan Ciwarigin Cirebon.

[50]Ahmadin, Masalah Agraria di Indonesia masa colonial, Jurnal ATTORIOLONG, Vol. IV, No. 1 Januari -Juni 2007, hlm 56

semuanya adalah cipataan Tuhan. Karena itu, tidak sepantasnya bisa manusia memperjual belikannya sebagai komoditas ekonomi dengan motif utama mencari keuntungan finansial. Nenek moyang kita dari Jawa mengatakan, "Sadumuk Bathuk, Sanyari bumi, ditohi pati", artinya untuk mempertahankan sejengkal tanahnya miliknya, mereka siap mengorbankan nyawanya. (Eko Budihardjo 2014: 141)[51]

Tarrow (1998) menempatkan gerakan sosial di dalam politik perlawanan *(contentious politics)* yang mencakup gerakan sosial, siklus penentangan (*cyclus of contention*) dan revolusi. Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa, sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh, menggalang kekuatan untuk melawan para elit pemegang otoritas. Ketika perlawanan didorong oleh jaringan sosial yang kuat, dan digunakan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak laan, dan hasilnya adalah gerakan sosial.[52]

Menurut Tarrow konsep gerakan sosial harus mencakup empat elemen dasar; *Pertama*, tantangan kolektif (*collective challenge*), titik fokus dari poin ini adalah karakteristik paling umum dari gerakan sosial melihat kenyataan bahwa biasanya kurang memiliki sumber daya yang stabil (dana, organisasi, dan akses terhadap negara). Saat menghampiri konstituen baru menegaskan klaim-klaim mereka terhadap penentangan. *Kedua*, tujuan bersama (*common purpose*) ini menjadi hal dan apa yang dicita-citakan dalam kesadaran kolektif gerakan. Berjalan dengan arah tujuan yang sama dalam hal pertentangan terhadap akses yang tidak terpenuhi yang diperjuangkan secara bersama. *Ketiga*, solidaritas dan identitas kolektif (*identity collective solidarity*) pertimbangan partisan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantar perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. *Keempat*, memelihara politik. Dari keseluruhan aspek apa yang menjadi titik berangkat perlawanan adalah adanya rasa keterampasan (*deprivation*) atas hak yang semestinya mereka nikmati.

[51]Eko Budihrdjo, Reformasi Perkotaan: Mencegah Wilayah Urban Menjadi Human Zoo, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014, hlm .. 33

[52]Suharko, Gerakan Sosial Baru di Indonesia" Reptoar Gerakan Perani, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 1, Juli 2006 hlm 4

Perampasan memicu munculnya resistensi, yang terjadi jika orang merasa sesuatu yang di hargainya dan lebih bermanfaat baginya dirampas. Perasaan terampas itulah yang disebut *relative deprivation*. Yang berarti suatu presespsi perihal; kesenjangan antara nilai yang di harapkan (*value expectation*) dengan kapabilitas untuk meraih nilai (*value capabilities*) yang diperlukan.[53]

Sebuah kesatuan yang memunculkan kekuatan besar antara gerakan sosial di masyarakat dan keterpaduan dengan FNKSDA dalam aksi praksisnya sudah lengkap dan utuh sebagai gebrakan terutama kepada elit pemerintahan (*government*) sebagai pemangku kebijakan. Dalam hal penanganan isu terkait tata-kelola SDA, FNKSDA sebagai organisasi baru dengan gebrakan akan isu besar yang disuarakannya menjadi subuah hal yang dipertimbangkan. Selain berusaha mengakomodasi korban-korban di masyarakat bawah juga berusaha mendorong untuk perubahan kebijakan yang lebih pro-rakyat, dan membawa isu agraria sebagai opsi kebijakan (*option policy*) yang sebelumnya tidak pernah ada. Sebagai gerakan sosial baru FNKSDA berusaha tampil ke depan publik yang menawarkan banyak hal-hal baru yang lebih kreatif, revolusioner, dan melahirkan optimisme yang tinggi.

Bentuk-bentuk, model, tipe dan karakteristik gerakan sosial baru semakin diorganisasikan secara lebih formal, terancang secara sistematis, didesain secara optimal dan kreatif. Termasuk fenomena-fenomena perilaku kolektif dalam bentuk (kerumunan/*crowd*).[54] Protes petani terhadap kaum kaya dan pemerintah berskala besar maupun kecil sebagai bukti nyata ketidak puasan yang bersifat konfliktual. Menurut Scott seni perlawanan petani, modus-modus protes secara diam-diam di pedesaan yang berlangsung secara luas melawan pihak musuh, entah itu kelas dominan yang berkuasa atau kaum kaya non penguasa (pedesaan) sebagai wujud penggabungan aksi yang nampak bersifat invidu, diskursif dan terorganisir.

Perspektif moral ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak pendekatan (ekopol dan historis) dalam mengkaji gerakan perlawanan petani,

[53] Joni Rusmanto, Sosiologi Politik Gerakan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Studi Perlawanan, edisi II, Surabaya; Pustaka Saga, 2017, hlm .. 24

[54] Joni Rusmanto, Sosiologi Politik Gerakan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Studi Perlawanan, edisi II, Surabaya; Pustaka Saga, 2017, hlm .. 30

Scott (1970). Atau dengan kata lain bahwa wajah sistem politik ekonomi dan sosial benar-benar telah bergeser terlalu jauh dari konsepsi kesempatan pembagian modal ideal terhadap SDA. Dapat disebut pula sebagai gagasan keadilan moral ekonomi petani (Scott, 1976).[55]

Ini sebagai kesadaran dasar terhadap jaminan subsistensi dan distribusi yang lebih dari hanya sekedar klaim tanah sebagai aset pribadi setiap manusia sebagai aspek produski yang menopang proses kehidupan. Karena reforma agraria pada kenyataannya tidak berkutat pada tanah semata, namun mampu menjangkau dalam persoalan ruang dan keadilan.

Secara politik ekonomi bahwa perspektif moral ekonomi melihat gerakan petani sebagai reaksi defensive terhadap penetrasi kapitalis untuk melindungi struktur sosial ekonomi para kapitalis yang mereka miliki. Secara nyata struktur kehidupan demikian memberikan iklim kehidupan kesejahteraan kepada para petani. Masuknya sistem kapitalis dalam komunitas petani ditentang keras, karena dianggap akan mengancam pranata-pranata sosial budaya yang selama ini dibangun dalam kehidupan petani.[56]

Prinsip utama dalam perlawanan petani inilah disebut moralitas ekonomi petani dimana perlawanan petani bertujuan mencoba mengikis prinsip-prinsip mendasar dominasi, marginalisasi struktur nilai-nilai yang mengancam dan merugikan eksistensi dan subsistensi mereka sebagai lapisan sosial yang semakin dimarginalkan oleh perubahan struktur ekonomi yang tidak memihak kepentingan-kepentingan tradisional mereka di desa.[57] Ekonomi petani mengakar pada sebuah gagasan tentang moral dan keadilan ekonomi. Moral ekonomi menyiratkan persepsi khusus yang datang digambarkan sebagai tuntutan yang tidak dapat diterima dan ditoleransi terhadap tindakan elit kekuasaan.[58]

[55] Joni Rusmanto, Sosiologi Politik Gerakan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Studi Perlawanan, edisi II, Surabaya; Pustaka Saga, 2017, hlm .. 99

[56] Joni Rusmanto, Sosiologi Politik Gerakan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Studi Perlawanan, edisi II, Surabaya; Pustaka Saga, 2017, hlm .. 111

[57] Joni Rusmanto, Sosiologi Politik Gerakan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Studi Perlawanan, edisi II, Surabaya; Pustaka Saga, 2017, hlm .. 102

[58] Joni Rusmanto, Sosiologi Politik Gerakan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Studi Perlawanan, edisi II, Surabaya; Pustaka Saga, 2017, hlm .. 102

Kita harus melihat fakta yang sentral bahwa petani dilahirkan di dalam satu masyarakat dan kebudayaan yang memberikan kepadanya sejumlah nilai moral, seperangkat tata hubungan sosial yang kongkrit, segala perilaku dan pemahaman tentang bagaimana orang lain di dalam kebudayaannya telah berbuat dalam tujuan-tujuannya.[59] Inti dari gerakan-gerakan protes rakyat miskin di daerah perkotaan dan pedesaan di Eropa abad kesembilan belas bukanlah pertama-tama suatu faham yang radikal tentang persamaan dalam hal kekayaan dan pemilikan tanah, melainkan tuntutan yang lebih bersahaja tentang "hak subsistensi" suatu tuntutan semakin sadar akan dirinya dan bersamaan dengan itu semakin terancam.[60]

Kebanyakan defininsi mengenai petani mencakup sedikit-sedikitnya dua hal pokok. *Pertama*, ia seorang pencocok tanam di pedesaan yang produksinya terutama diajukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, ini mendefinisikan tujuan ekonominya yang sentral. *Kedua*, merupakan bagian dari suatu masyarakat yang lebih luas (termasuk golongan elit bukan petani dan negara).[61] Segala bentuk hal yang lahir dari sosial petani pedesaan dan semua bentuk tindakannya selalu terkandung nilai-nilai dan bentuk kebudayaan otentik.

Kesadaran masyarakat atas dasar persamaan rasa ketidak adilan seperti dalam kasus eksploitasi yang mereka semua alami, khususnya masyarakat petani. Karena melihat eksploitasi merupakan sebuah hubungan besar yang berkait. Perorangan, kelompok, dan lembaga, serta ada pihak yang di eksploitasi.

FNKSDA dengan macam ragan penerimaannya mengingatkan sebagaimana Surakarta sebagai tempat pusat pergerakan nasional di Jawa. Surakarta sebagai arena tetap saja strategis bagi tujuan kita, karena kota itu adalah satu-satunya pusat pergerakan dimana semua kekuatan sosial pangeran dan bangsawan Jawa, pegawai bumi putra, yang berpendidikan barat, orang-orang Islam dengan pendidikan pesantren, tukang buruh tani, orang-orang Indo-Cina, pegawai administrasi Belanda dan pengeola perkebunan Belanda bergabung dengan

[59]James C Scott, Moral Ekonomi Petani, Jakarta: LP3ES, 1981, hal.. 253
[60] James C Scott, Moral Ekonomi Petani, Jakarta: LP3ES, 1981, hal.. 50
[61]James C Scott, Moral Ekonomi Petani, Jakarta: LP3ES, 1981, hal.. 238

pergerakan atau menjadi musuhnya, dan karena tiga tokoh yang melenyapkan klasifikasi nasionalisme, Islam dan komunisme Tjipto Mangoen Koesumo, Marco Kartodikromo, dan Haji Mohammad Misbach.[62]

Ghirah perlawanan seperti di Surakarta terus menjadi pembakar semangat perjuangan. Tak lain untuk sebuah tujuan yang lebih baik, dengan membongkar struktur kekuasaan yang selama ini ada karena kedunguan oligarkis para elitnya.

Kesimpulan

Kelahiran FNKSDA kembali mengingatkan momen progresif NU sebagai ormas sosial keagamaan kemasyarakatan yang mempunyai fungsi sosial masyarakat. Artinya persoalan-persoala yang ada dalam masyarakat juga mampu diakomodasi secara baik oleh organisasi mereka. Organisasi kegamaan tidak selalu fokus pada masalah ibadah keumatan semata, namun juga menjadi tempat pengaduan dimana persoalan tata kelola SDA yang menjadi persoalan terbesar masyarakat saat ini diperhatikan untuk diselesaikan. Semangat kembali membangkitkan harmoni resolusi jihad NU pertama oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari untuk melawan imperialisasi, penjajahan, dan penjarahan atas kekeayaan SDA yang kita miliki untuk dilawan.

Dengan membawa semangat baru yang kembali dirumuskan NU sebenarnya mempunyai narasi dalam mempertahankan kehidupan dan kekayaan SDA agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaulat atas pangan dan akses mereka terhadap area produksi. Selain menjaga kedaulatan tata kelola SDA, FNKSDA juga berusaha merawat nilai-nilai materil kenusantaraan yang selama ini menjadi identitas kekayaan nusantara. Rong-rongan ekonomi neo-liberal, dan kapitalisme ekstraktif harus diberhentikan karena kita tidak ingin kebudayaan besar yang selama ini kita banggakan hilang secara perlahan, karena hilangnya nilai, norma, dan relasi sosial yang terabaikan.

[62]Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Jakarta, PT:Pustaka Utama Grafiti 1997 ,, XVI

DAFTAR PUSTAKA

_______ Shiraishi, Takashi, Zaman Bergerak, Jakarta, PT:Pustaka Utama Grafiti 1997

_______ Nashirulhaq, Muhammad, Perjuangan Ekonomi-Politik Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU), Skripsi Fisip UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2017,

———Rohmad, Abu, Pradigma Resolisu Konflik Agraria, Karya Abu Rohmad, Semarang: Walisongo Press, 2018

——— Jamil, Abdul, dalam penagntar Pradigma Resolisu Konflik Agraria, Karya Abu Rohmad, Semarang: Walisongo Press, 2018

——— Batubara, Bosman Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Urut Sewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen, Yogyakarta: Literasi Press, 2015

——— Lutfi, M Nashih, Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Urut Sewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen, Yogyakarta: Literasi Press, 2015

________ Rusmanto, Joni Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Anatara Kekuatan dan Kelemahannya, Surabaya: Zifatama Publising, 2012

________Ahmadin, Masalah Agraria di Indonesia masa colonial, Jurnal ATTORIOLONG, Vol. IV, No. 1 Januari -Juni 2007

_________Qoriah, Sityi Maesaroh, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan di Pesantren Ekologi At-Thariq Garut, Jurnal Yin Yang Vol. 13 No. 2 th 2018

_________ Scott, James, Moral Ekonomi Petani, Jakarta: LP3ES, 1981

_________Budihrdjo, Eko, Reformasi Perkotaan: Mencegah Wilayah Urban Menjadi Human Zoo, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014

_________Cahyati, Devy Dhian, Konflik Agraria Urut Sewu Pendekatan Ekologi Politik, Yogyakarta: STPN Press, 2014

Arizona, Yance, Kontitusionalisme Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2014,

_________https://www.google.com/amp/s/amp.katadata.co.id/

berita/2019/01/03/selama-2018-konflik-agraria-paling-banyak-di-sektor-perkebunan, diakses pada 9 Novemer 2018.

________https://ala-nu.com/momen-momen-progresif-islam-di-indonesia/, diakses pada tgl 13/12/18

________AD/ART Hasil Munas II FNKSDA di Ponpes Al-Itqan Semarang, 23-25 Oktober 2018

________Notulensi hasil Munas II FNKSDA di Ponpes Al-Itqan Semarang, 23-25 Oktober 2018

Wawancara

Wawancara dengan Direktur Sajogyo Institute, Amir Mahmud yang juga kader FNKSDA saat mengisi acara Pesantren Ekologis di Ponpes SGJB Semarang, 28/12/2018.

Wawancara dengan Koordinator Nasional FNKSDA, Gus Roy Murtadho, saat mengisi acara Pesantren Ekologis di Ponpes SGJB Semarang, 28/12/2018.

Wawancara dengan mantan Sekretaris PWNU Jawa Tengah, yang kini menjabat sebaga Wakil Katib 'Am PWNU Jawa Tengah, KH. Arja' Imroni M.Ag, saat mengisi acara Pesantren Ekologis di Ponpes SGJB Semarang, 28/12/2018.

Wawancara dengan Koordinator FNKSDA Gus Syatori, saat acara Munas II FNKSDA di Ponpes Al-Itqan Semarang, 24-26 Oktober 2018.



Dapatkah Agama Menyelamatkan Lingkungan?

Oleh: Dr. Fachruddin M. Mangunjaya, MSi.

Ditengah kontroversi fatwa dan kekisruhan antar agama, saya baru saja menjalankan kegiatan positif dalam konteks sebuah penyadaran untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat, bahwa kita memerlukan alam, lingkungan dan ekosistem yang baik. Kegiatan lingkungan ini bukan dengan pendekatan biasa, melainkan melalui agama. Kami mengumpulkan pemuka agama Islam di daerah, mereka adalah imam masjid, aktifis NGO, tokoh masyarakat dan *stakeholder* terkait dengan spiritual dan budaya masyarakat setempat.

Fokus kegiatan kami adalah di Taman Nasional Wakatobi, tujuh jam perjalanan dari kota Baubau, Buton Sulawesi Tenggara. Taman Nasional Wakatobi diresmikan pada tahun 2002. Dengan luas kawasan 1.390.000 hektar ha. Setelah tiga tahun berjalan sejak Surat Keputusan Menteri Kehutanan ditanda tangani, karena ada pemekaran wilayah Taman Nasional Wakatobi yang terdiri dari empat pulau besar: Wanci, Keledupa, Tomiya dan Binongko, kini menjadi bagian sebuah kabupaten baru.

Rencana sebuah taman nasional yang diharapkan menjadi aset kawasan konservasi dengan perlakuan khusus dan pemanfaatan yang terbatas, sepertinya terhambat dengan adanya gagasan baru–pendirian kabupaten. Para konservasionis tentu sangat khawatir bahkan kecewa dengan kondisi seperti ini. Sebab, kawasan konservasi, bagaimana pun juga, merupakan kawasan khusus yang harus dikelola

secara hati-hati untuk menjaga aset alamnya agar tidak rusak.

Kekhawatiran sebagian ahli konservasi cukup berdasar: *Pertama*, ketika pemerintah daerah, yang diberikan kewenangan untuk mengembangkan daerah, sudah tentu akan melirik sumber daya alam yang ada untuk diekplorasi sebagai sumber utama pendapatan asli daerah (DAU). Artinya akan ada tekanan baru terhadap sumber daya alam yang ada di kawasan taman nasional, dan ini menimbulkan ancaman bagi kelestarian kawasan itu. *Kedua*, pihak taman nasional harus menata ulang zonasi yang ada di taman nasional ini untuk menyelaraskan konsep pelestarian dengan kehendak pemerintah daerah dalam menata ruang pemanfaatan di daerahnya.

Ketiga, diperlukan investasi besar untuk menetapkan di mana saja penataan kawasan penting dan pemanfaatan yang tidak merusak di kawasan tersebut. Karena biasanya penetapan kawasan harus disertai alasan saintifik yang memerlukan penelitian para ahli.

Sebaliknya, bagi masyarakat di daerah, pengembangan kabupaten ini direspon dengan antusias, sebab, mereka bisa menyelesaikan perkara daerah mereka sendiri secara cepat, karena pengambilan kebijakan terkadang terkendala dengan jarak antar pulau yang jauh.

Birokrasi perizinan dapat diperpendek, masyarakat dapat mengembankan perekonomian. Selain itu, pembagian hasil pendapatan di daerah masing-masing dapat menjadi subsidi berkembangnya proyek-proyek baru pengembangan infrastruktur di kabupaten. Peluang kerja sektor pembangunan fisik berkembang di daerah. Jalan-jalan langsung dibangun begitu pula fasilitas publik yang lain.

Di samping itu, telah lama diketahui, kemiskinan rakyat di pesisir telah pula memicu pengurasan sumber daya alam yang luar biasa akibat pengaruh budaya konsumerisme dan informasi, menyebabkan masyarakat berpikir instan: menggunakan pemancingan ilegal dengan cara bom, menambang batu karang untuk bahan bangunan, membubuhkan *potassium* untuk menangkap ikan. Membom ikan, di beberapa tempat di kawasan Wakatobi, menjadi perkara yang lumrah sejak beberapa tahun terakhir, sebab, masyarakat yang sadar

tidak mempunyai keupayaan mengontrol dan prasarana *law enforcement* sama tidak berdayanya untuk menghentikan perilaku masyarakat karena jarak yang tidak terjangkau. Selain itu, kemiskinan tampaknya mendorong mereka untuk melakukan pengurasan sumber daya secara instan.

Dalam berbagai kasus, memang ternyata ilmu pengetahuan, penegakan hukum (law enforcement) tidaklah cukup untuk menanggulangi persoalan lingkungan dan kerusakan ekosistem. Buktinya, persoalan lingkungan semakin bertambah kompleks sejalan dengan beratnya persoalan hidup yang harus dihadapi oleh masyarakat: pertambahan penduduk, terbatasnya lowongan kerja, bertambah sempitnya lahan sehingga tidak mudah untuk mengurus lahan pertanian yang mampu menghasilkan makanan dan uang untuk bertahan hidup.

Di kawasan Wakatobi, masyarakat Bajau yang biasanya hidup subsisten di laut dan menetap di perahu, pada akhirnya menginginkan menetap secara permanen di pulau tetapi tidak berkecukupan untuk mendapatkan tanah atau membeli lahan di daratan yang telah dikuasai oleh penduduk asli pulau. Akhirnya secara “kreatif” orang-orang Bajau menggali batu karang dari laut dan memindahkan pasir membuat perkampungan mereka sendiri dengan mereklamasi pantai yang kosong, menyulapnya menjadi lahan yang dapat di huni dengan luas puluhan *hectare*.

Persoalan baru tentunya timbul dengan intensifnya penambangan batu yang dikhawatirkan akan merusak tempat tinggal ikan-ikan karang yang menjadi sumber pencarian mereka sendiri. Kerusakan ekosistem ini tentu berdampak pada pencarian mereka dengan menurunnya hasil tangkapan dan kesulitan mendapatkan ikan dengan kualitas yang diinginkan.

Alasan strategi ini dilakukan adalah karena penanggulangan masalah lingkungan memerlukan kesadaran kolektif warga negara. Sedangkan di kawasan dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah, pada umumnya mempunyai akar kuat pada tradisi dan sudah tentu tidak dapat didekati dengan pendekatan yang terlalu ilmiah—seperti halnya, penyadaran lingkungan yang dilakukan di negara maju—tetapi hendaknya menggunakan pendekatan spiritual atau agama.

Alasannya, bahasa-bahasa yang digunakan agama –selain memiliki pesan moral yang kuat juga memberikan peringatan yang keras dan menimbulkan konsekuensi apabila ajaran tersebut diabaikan. Manusia boleh saja melanggar peraturan yang mereka buat, tetapi dalam persoalan lingkungan, Tuhan telah memberikan rumus bahwa bumi berjalan di atas sunnatullah (secara ilmu di katakan: hukum alam). Konsekuensinya adalah siapa saja yang melanggar hukum Tuhan akan merasakan akibatnya. Sebagai contoh, (1) keserakahan manusia yang menebang hutan, sebagai ganjaran–akibatnya adalah: banjir, kekeringan dan pemanasan global. (2) kecerobohan menangkap ikan dengan menggunakan *potassium*, racun sianida, dan bom, mengakibatkan terumbu karang–tempat ikan tinggal—mati dan hasil tangkapan berkurang. Dengan demikian rizki yang diperoleh sebagai tangkapan nelayan akan berkurang.

Menguraikan kebijakan tersebut, para ilmuwan (scientist) hendaknya bersatu dengan ahli-ahli agama, untuk menjabarkan dan memberikan peringatan kepada warga negara dengan memberikan alasan-alasan sains mengapa manusia dilarang membuat kerusakan dan mengelola lingkungan di bumi. Selain itu, tentunya, harus ada alasan saintifik pengambilan kebijakan pembangunan lingkungan dengan memberikan kesempatan ahli agama memberikan masukan, sehingga dalam taraf sosialisasi, masyarakat mendapatkan jaminan bahwa pembangunan tersebut mempunyai manfaat (maslahat) dalam kehidupan mereka dan kehidupan agama yang mereka jalankan.

Spiritualitas agama kembali dipertimbangkan oleh para ahli lingkungan untuk mengingatkan manusia. Dalam dua dekade terakhir setidaknya ada upaya para ilmuwan dan ahli agama untuk bersatu untuk menyikapi situasi lingkungan kita. *Pertama*, dalam sebuah pertemuan pemimpin agama dan sains yang disebut: *"Join Apppeal by Religion and Science for the Environment,"* yang diadakan bulan Mai 1992 di Washington, D.C. Para ilmuwan dan pemimpin agama salah satunya menyatakan: "Kami yakin bahwa sains dan agama dapat bekerjasama untuk mengurangi dampak yang berarti dan membuat resolusi atas krisis lingkungan yang terjadi di bumi.

Tetapi kami yakin bahwa dimensi krisis ini sebenarnya tidak sepenuhnya diambil hati oleh para pemimpin kita yang memimpin lembaga-lembaga penting

dan juga pemimpin industri. Namun demikian kita menerima kewajiban kita untuk membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap jutaan orang yang kita layani dan ajarkan mengenai konsekuensinya apabila terjadi krisis lingkungan dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini" (Calvin B. DeWitt, The Good in Nature and Humanity in Stephen R, Kellert dan Timothy J Farnham, 2002).

Kedua, pertemuan pemimpin agama-agama di Assisi, Italia. Pertemuan yang diadakan oleh World Wildlife Fund (WWF) tahun 1986 ini bergiat mengumpulkan seluruh pemuka agama guna menghadapi krisis lingkungan dan konservasi alam yang terjadi di bumi, dan menghasilkan: "Deklarasi Assisi" dimana masing-masing agama memberikan pernyataan tentang peran mereka dalam melestarikan alam:

"Kerusakan lingkungan hidup merupakan akibat dari ketidaktaatan, keserakahan dan ketidak peduliaan (manusia) terhadap karunia besar kehidupan." (Budha).

"Kita harus mendeklarasikan sikap kita untuk menghentikan kerusakan, menghidupkan kembali dan menghormati tradisi lama kita (Hindu)."

"Kami melawan segala terhadap segala bentuk eksploitasi yang menyebabkan kerusakan alam yang kemudian mengancam kerusakannya," (Kristiani)

"Manusia adalah pengemban amanah,"berkewajiban untuk memelihara keutuhan CiptaanNya, integritas bumi, serta flora dan faunanya, baik hidupan liar maupun keadaan alam asli," (Muslim)

Ketiga, di tingkat regional, Indonesia menyelenggarakan hal yang sama yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan *The World Bank* mengundang pemuka-pemuka agama mengadakan *Conference on Religion and Conservation* pada 18 Desember 2002, yang menghasilkan 'Kebun Raya Charter' yang intinya melibatkan peran para pemuka agama dan ulama dalam menanggulangi permasalahan konservasi alam dan lingkungan hidup.

Walhasil, sikap dan keteladanan pemimpin Agama dalam memelihara lingkungan dan kelestarian alam perlu kembali dilihat, misalnya dalam Islam banyak sekali *wisdom* (kearifan) Rasulullah SAW, dalam menghormati makhluk hidup: sebagaimana diriwayatkan, bahwa Nabi SAW mengutus sahabatnya yang dalam saat perjalanan mereka menangkap anak burung yang berada di sarangnya. Ketika merasa kehilangan anak, induk burung itu pun mengiringi—terbang di atas rombongan–Rasulullah. Ketika menyaksikan hal itu nabi bersabda: "Siapakah yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikan anak-anaknya padanya." (Hadits Riwayat Abu Daud).

Dalam umat Kristiani (Katholik) dikenal Santo Francis Assisi, atas sikap beliau yang menghormat pada setiap makhluk hidup. Dengan menyaksikan setiap makhluk yang ditemuinya, maka dia melihat ada keberadaan Tuhan. Diriwayatkan pula, St. Francis, dalam sebuah perjalanannya, melihat sekelompok burung, kemudian beliau meninggalkan rombongan, mendatangi kelompok burung tersebut lalu membacakan firman Tuhan dan berdoa:" Saudara-saudaraku para burung, seharusnya kalian bersyukur kepada Sang Penciptamu, dan mencintaiNya, Dia memberimu bulu yang indah sebagai pakaian, serta sayap yang membuatmu dapat terbang kemanapun yang kau mau. Tuhan telah memberikan kekuasaannya atas mu dibandingkan ciptaanNya yang lain, memberimu ruang gerak di udara segar, sehingga saat terbang kamu tidak pernah tertubruk atau tidak pernah pula terjatuh. Dialah yang melindungi mu dari mara bahaya dan mengatur hidupmu tanpa kamu merasakannya.

Konservasi Alam dan Lingkungan Dalam Perspektif Islam

"Telah diketahui bahwa dalam makhluk-makhluk ini Allah menunjukkan maksud-maksud yang lain dari melayani manusia, dan lebih besar dari melayani manusia: Dia hanya menjelaskan kepada anak-cucu Adam apa manfaat yang ada padanya dan apa anugerah yang Allah berikan kepada ummat manusia." (*Taqi ad-Din Ahmad ibn Taimiyah*)

Secara sistematik, para pakar Islam terdahulu sesungguhnya telah mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup dan konservasi

alam, sebagaimana tercermin dari kata-kata Ibnu Taimiyah di atas Oleh sebab Islam membawa kemaslahatan dan perbaikan (*ishlah*) terhadap bumi. Bagaimana dengan konservasi? Sebagaimana disepakati oleh para fuqaha, jika ingin melihat praktik mendasar tentang penerapan syariat yang absah, adalah dengan melihat bagaimana praktik Rasulullah SAW beserta para sahabat beliau dalam menerapkan ajaran Islam. Sedapatnya dalam mengkaji perihal konservasi ini, tensi kita tidaklah bersifat apologia terhadap ajaran Islam. Tapi setidaknya, dalam kondisi kekinian, kita menemukan Islam memberikan ajaran yang spesifik dalam persoalan perlindungan terhadap alam.

Dalam sejarah kemanusiaan konservasi alam bukanlah hal yang baru, misalnya pada 252 SM. Raja Asoka dari India secara resmi mengumumkan perlindungan satwa, ikan dan hutan. Peristiwa ini mungkin merupakan contoh terawal yang tercatat dari apa yang sekarang kita sebut kawasan yang dilindungi. Pada sekitar 624-634 Masehi, Nabi Muhammad SAW juga membuat kawasan konservasi yang dikenal dengan hima' di Madinah. Lalu pada tahun 1084 Masehi, Raja William I dari Inggris mememerintahkan penyiapan *The Doomesday Book*, yaitu suatu inventarisasi tanah, hutan, daerah penangkapan ikan, areal pertanian, taman buru dan sumber daya produktif milik kerajaan yang digunakan sebagai daerah untuk membuat perencanaan nasional bagi pengelolaan pembangunan negaranya. Jadi jelaslah, konservasi sebenarnya merupakan kepentingan fitrah manusia di bumi yang dari masa ke masa terus mengalami perkembangan disebabkan kesadaran kita guna mendapatkan kehidupan yang layak dan mampu memikirkan kelangsungan hidup generasi kini maupun yang akan datang. Maka tidak heran jika praktik konservasi telah ada dalam ajaran Islam.

Ekologi Itu Politis; Dari Laku Keseharian ke Rezim Pengetahuan

Oleh : Muhammad Nasihudin

Mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga, dan Pegiat Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Yogyakarta.

Kebutuhan manusia atas air, makanan, dan tempat tinggal (tanah) adalah utama. Saat bangun tidur, biasanya kita akan mencari air untuk minum, wudlu (bagi umat muslim), dan mandi. Inilah perjumpaan aktivitas pertama manusia dengan persoalan ekologi. Setelah bersentuhan dengan air, manusia kemudian bersentuhan dengan makanan yang menjadi bahan bakar dari aktivitas hariannya seperti berangkat sekolah atau kerja. Inilah perjumpaan aktivitas kedua dengan persoalan ekologi. Pada perjumpaan-perjumpaan ini, kita tidak pernah menghitung berapa liter air atau berapa banyak makanan yang kita konsumsi untuk mengerjakan rutinitas tersebut. Untuk minum saja, misalnya, sebagian besar mahasiswa dan dosen di lingkungan penulis, konsumsi air mineral sudah menjadi kebiasaan sehari-hari.

Tidak berhenti di situ, persinggungan manusia dengan masalah ekologi juga bisa dirasakan dalam aktivitas pulang-pergi dari rumah ke tempat kerja atau sekolah. Misalnya dalam aktivitas harian saya. Seperti pagi-pagi di kota lain, saya menyaksikan orang-orang bertebaran di jalanan sekitar Berbah-Kota yogyakarta. Mereka saling beradu kecepatan memacu kendaraan mengejar waktu. Ada yang berangkat kerja, sekolah, atau ke pasar membeli beberapa sayuran

atau lainnya. Tidak mau terlambat masuk kelas, saya pun menerobos disela-sela pengendara lain. Tujuannya satu, cepat sampai di kampus. Biasanya, lama perjalanan ke kampus dapat ditempuh dalam waktu 15 menit, pada jam 06.00 pagi, dan 20 menit pada jam 06.30-07.00 pagi.

Rumah kontrakan saya terletak di Berbah, Sleman. Daerah itu berjarak 6 kilometer dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Persis di depan rumah berdiri gedung Paskhas AU Yogya. Sekitar 200 meter tak jauh dari rumah tinggal saya terdapat sungai yang sering didatangi pemancing ketika malam tiba. Setelah melewati jembatan, terdapat Sekolah Tinggi Teknik Angkasa (STTA). Mendekati lampu merah Blok O, beberapa pengendara lain berhenti sesaat. Baru saja sampai di depan minimarket, semua kendaraan harus mengantri untuk melewati lampu merah. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk bisa keluar dari antrian lampu merah itu.

Setelah lampu merah Blok O, terlihat dari kejauhan gedung Grahatama Pustaka, perpustakaan pemerintah yang dikelola pemerintah daerah. Gedung yang dibuka beberapa tahun lalu itu terlihat sepi, mirip Sekolah Dasar saat hari libur. Tak jauh di sebelahnya berdiri bangunan Jogja Expo Center (JEC), pusat konvensi yang biasa disewakan untuk bermacam event, seperti pameran mobil, elektronik, juga disewa beberapa kampus untuk menggelar wisuda. Persis di depannya berdiri megah hotel Grand Dafam Rohan. Bangunan ini dibuat sekitar tahun 2017 dengan memunggungi areal pesawahan di belakangnya.

Ke barat setelah dua bangunan besar itu, tempat biasanya para pengendara memutar balik kendaraannya, terdapat kampus kecil bernama Institut Teknologi Yogyakarat (ITY). Kampus ini memiliki beberapa jurusan keilmuan, seperti teknik pertambangan, dan ilmu lingkungan. Melewati jalan sorowajan, warung-warung kopi berderet sepanjang jalan. Sebuah tempat yang biasa dijadikan mahasiswa untuk menghabiskan waktunya.

Guna menghindari kemacetan lalu-lintas di jalan Solo, penulis biasanya memotong jalan ke arah bantaran rel kereta api melewati deretan rumah-rumah warga yang sewaktu-waktu bisa digusur oleh PT. Kereta Api Indonesia. Perjalanan inipun berakhir di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Semula, perjalanan singkat dari rumah kontrakan ke kampus UIN Sunan Kalijaga hanya mengantarkan saya pada pemahaman tentang perubahan spasial Yogya dari kota dengan bangunan rendah menjadi kota yang dipenuhi bangunan tinggi menjulang. Tidak pernah terlintas di benak saya kalau ketinggian bangunan itu akan berkorelasi dengan persoalan akses warga atas air. Tidak pula terlintas di benak saya bahwa ketimpangan akses atas air antara warga pemilik rumah biasa dengan gedung-gedung yang tinggi menjulang itu suatu saat akan menjadi ledakan persoalan yang besar di Yogya.

Di kampus UIN, selama kurang lebih 7 tahun, penulis tidak mendapatkan pengetahuan yang secara serius mengkaji persolan ekologi secara politis. Bahkan banyak mahasiwa yang menganggap hal-hal remeh temeh di sekelilingnya terjadi begitu saja, dan wajar saja. Atau dalam bahasa kami sebagai anak UIN disebut *Sunnatullah.*

Seiring keikutsertaan penulis dalam kajian *Ekologi Politis (*EP) yang diselenggarakan *Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam* (FNKSDA) Yogyakarta, peristiwa ekologis yang ditemui sehari-hari dan semula dianggap *Sunnatullah* jadi tidak tepat dan naif.

Kenaifan ini dilatari dari pandangan yang memisahkan perjumpaan aktivitas keseharian seperti konsumsi air mineral, lingkungan yang macet, banyaknya gedung-gedung besar dari sirkulasi modal sebagai ujung tombak terciptanya perubahan sosial. Dari kajian ekologi politis inilah masalah lingkungan di tingkat lokal bisa dianalisis hubungannya dengan sistem ekonomi-politik nasional, regional, bahkan global.

Di Yogyakarta, misalnya, maraknya keberlangsungan pembangunan properti di wilayah perkotaan berbanding lurus dengan ekploitasi air tanah yang berlebih. Film dokumenter *Belakang Hotel* (watchdoc 2014) menggambarkan bagaimana warga kampung Miliran dan Gowongan, Kota Yogyakarta, harus mencari air ke tetangga atau pasar terdekat untuk keperluan rumah tangga sehari-hari seperti masak dan mandi karena sumur mereka mengering setelah dibuka hotel di sekitar perumahan mereka. (Astuti 2017).

Lebih lanjut, Astuti memaparkan 60% warga menggantungkan kebutuhan air mereka pada air sumur rumahan mereka untuk keperluan air minum, sementara 40% sisanya berlangganan air PAM atau membeli air minum kemasan yang harganya jauh lebih mahal dari air sumur.

Cara pandang yang menyederhanakan persoalan air hanya sebatas kebutuhan alamiah gugur setidaknya karena dua relasi keterhubungan manusia dan alam. Pertama, air yang dibayangkan alamiah pada dasarnya melibatkan proses produksi dalam "penciptaannya". Misalnya, proses-proses konversi lahan di sebuah daerah tangkapan air dan anyaman teknologi pemipaan air berkontribusi pada seperti apa air yang muncul. Kedua, 55%-78% tubuh manusia tersusun atas air. Selain itu, dalam studi aliran air perkotaan, kota sendiri adalah sistem. Sebagai sebuah sistem, analisis terhadap kota meniru peredaran ganda (sirkulasi dan metabolisme) darah dalam tubuh manusia (Swyngedouw 2006). Air mengalir dalam jaringan pipa-pipa (sirkulasi) , lalu pada titik tertentu dikonsumsi oleh manusia (metabolisme). (lihat Batubara 2017).

Di sini kita dapat melihat bahwa pembangunan gedung-gedung perhotelan, apartemen di Yogyakarta tidaklah berangkat dari ruang kosong. Hotel-hotel tersebut muncul sebagai ruang akumulasi kapital yang menjadi bagian dari sistem produksi kapitalisme bernama "Kota Pariwisata". Perubahan sosial dan alamiah pun berlangsung secara bersamaan dan saling mempengaruhi. Hotel-hotel dan gedung apartemen berdiri, masyarakat sekitar perkotaan mengalami krisis air. Akibatnya warga tidak mendapatkan akses terhadap air dan terhalang untuk mendapatkan keuntungan dari air.

Menggugat Watak Apolitis Rezim Pengetahuan Kampus

Pertautan antara aktivitas keseharian penulis sepanjang perjalanan menuju kampus dengan kajian ekologi politis menimbulkan pertanyaan gugatan: Apakah institusi pendidikan sudah menempatkan kajian ekologi secara politis?

Di kampus, penulis dan mahasiswa lain berkenalan dengan kata lingkungan melalui mata kuliah Hukum Lingkungan. Awalnya, penulis sangat antusias

mengikuti perkuliahan dengan harapan narasi hukum yang dibangun adalah kritis. Kritis yang dimaksud adalah menggali sumber-sumber hukum dalam hubungannya dengan persoalan material dan motif ekonomi-politik yang mendasarinya.

Pada pertemuan kedua, misalnya, dosen mengajak mahasiswa untuk secara spesifik membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA) yang penuh muatan swastanisasi dan komodifikasi pengelolaan air. Sayangnya, pemaparan dosen tidak sepolitis persoalan air itu sendiri. Ia hanya menjelaskan aspek legal-formil dalam kaitannya dengan sumberdaya air.

Penulis menangkap ada dua hal yang menyebabkan tidak politisnya dosen dalam memaparkan kajian ekologi dalam hukum lingkungan, khususnya air. Pertama, dosen seringkali mengabaikan dimensi politik-ekonomi dalam kaitannya menjelaskan persoalan air. Kedua, kesan kebanggaan yang berpusat pada keberhasilan Muhammadiyah dalam pengujian UU SDA, secara langsung menutup pembahasan bagaimana praktik pelaksanaan setelah diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada praktiknya deligitimasi UU SDA justru tidak mengelaborasi persamaan secara fundamental ajaran Islam dan norma konstitusi berkaitan dengan sumberdaya air. Yang lebih parah, delegitimasi UU SDA itu tetap tak bisa menghentikan proses eksploitasi air oleh korporasi air baik atas nama Negara (PDAM) maupun swasta seperti PT. Palyja.

Dua hal di atas penulis lihat ketika dosen memberikan contoh program “Airku” di Kulonprogo. Dalam paparannya, dosen mengatakan bahwa program “Airku” dalam kebijakan Bela-Beli adalah keberhasilan pemerintah daerah sebagai bentuk kedaulatan dalam mengelola air. Dalam penjelasannya, Sang Dosen tidak masuk ke dalam analisa ekonomi-politik dalam melihat siapa yang diuntungkan dan dirugikan.

Kebijakan Bela-Beli Kulonprogo pertama kali dideklarasikan oleh Bupati Hasto Wardoyo pada tanggal 25 Maret 2013 di Alun-alun Wates. Kebijakan ini digunakan oleh Bupati Kulonprogo sebagai alat untuk mendorong agar masyarakat mau membela daerahnya sendiri dengan cara membeli ‘produk’ yang ‘diproduksi ‘oleh’ masyarakat kulonprogo. Dengan demikian, masyarakat

bisa menguasai pasarnya sendiri dan tidak menyerahkan pada pasar asing.

Penulis memberi tanda kutip dalam kata 'produk', 'diproduksi', dan 'oleh' untuk memudahkan kita melihat apakah tepat kebijakan "Airku" yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo disebut sebagai keberhasilan. Airku merupakan "produk" air minum yang "diproduksi" oleh PDAM yang setiap bulannya mampu mengahsilkan 100 karton AirKU dan menyumbang pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai RP. 300 juta.

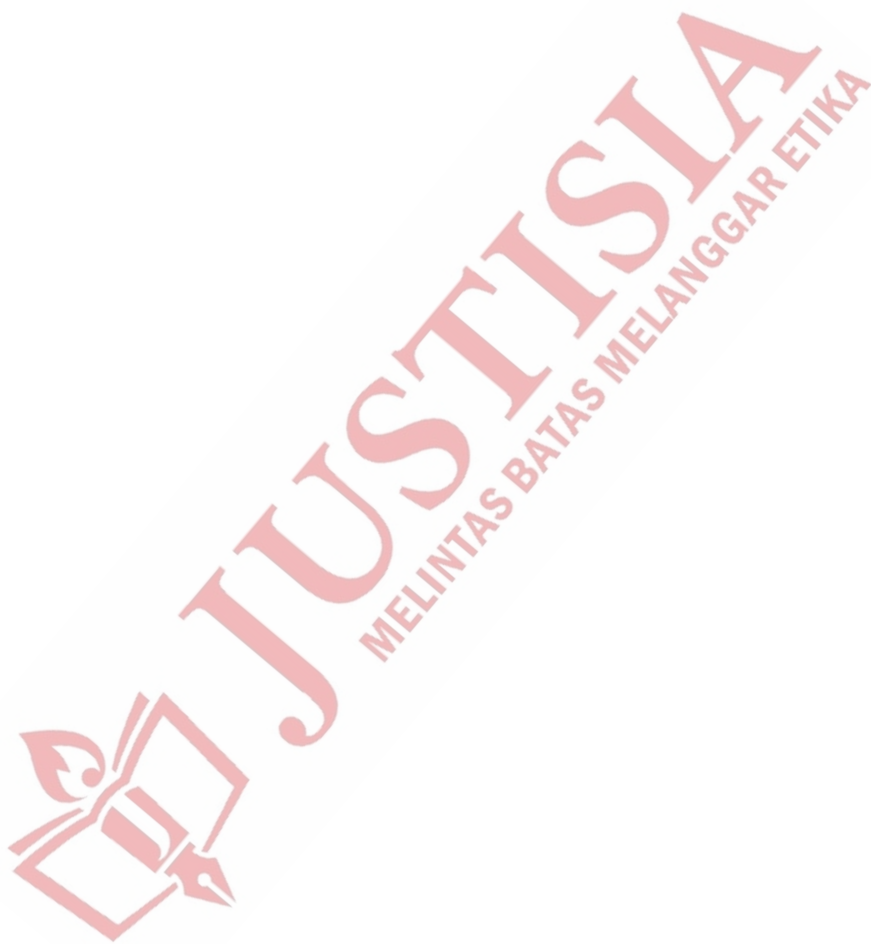
Dalam rantai produksi ini, peran masyarakat yang dikatakan Hasto sebagai 'oleh masyarakat' adalah bahasa lain dari buruh. Masyarakat menjadi buruh dengan bekerja di perusahaan air minum milik pemerintah daerah. dan masyarakat juga yang dipaksa membeli produk tersebut. Akses masyarakat terhadap air sebagai bagian dari kehidpannya tereksklusi oleh keberadaan PDAM.

Melalui Batubara (2017), eksklusi dalam pengertian ini dipinjam dari Hall, Hirsch, dan Li (2011:7) ketika memaparkan eksklusi orang dari Asia Tenggara. Eksklusi, dalam pemaknaan yang mereka bangun, ialah cara yang menyebabkan orang terhalang mendapatkan keuntungan dari sesuatu. Selain itu, mereka mengidentifikasi berbagai bentuk relasi kuasa yang mengatur proses eksklusi orang dari tanah yang berlangsung di Asia Tenggara. Beberapa relasi kuasa yang mengaturnya adalah peraturan, pasar, pemaksaan, dan legitimasi moral.

Konteks AirKU merupakan produk yang berkait erat dengan peraturan Bupati Kulonprogo (Hasto wardoyo) melalui Kebijakan Bela-Beli. Kemunculan produk AirKU dicitrakan sebagai persaingan pasar terhadap produk minuman kemasan lain. Sementara itu, masyarakat Kulonprogo sebagian dijadikan buruh, dan semuanya menjadi mangsa pasar dari AirKU. Sementara itu, praktek pemaksaan dan legitimasi moral bisa dilihat dari pernyataan Hasto yang mengatakan bahwa membeli produk lokal adalah bentuk membela daerah yang paling nyata.

Di titik ini pernyatan dosen yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut pro-masyarakat ternyata tidak tepat. Kenaifan cara pandang seperti dosen yang menjelaskan tentang kebijakan AirKU muncul karena sebagian besar

pengajar di Perguruan Tinggi tidak mau naik level ke tahap yang lebih kritis dan politis menyangkut persoalan ekologis. Atau bisa jadi keengganan menautkan persoalan Hukum Lingkungan dengan ekonomi politik adalah bentuk politis dalam keberpihakannya terhadap rezim pengetahuan.



Kontestasi Pemilu 2019 yang Kental akan Kepentingan Bisnis Tambang

Oleh: Merah Johansyah

Debat calon presiden putaran kedua tentang Energi, Pangan, Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam pada 17 Februari 2019 lalu, menyisahkan sejumlah pertanyaan penting soal kadar pengetahuan dan komitmen pasangan calon bagi keselamatan rakyat dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kedua pasangan sama sekali tidak menyinggung, apalagi untuk berdebat terkait persoalan krisis dan masalah di pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal, krisis dan masalah di pesisir dan pulau-pulau kecil itu begitu nyata, mulai ekspansi pertambangan dan migas, perkebunan sawit dan tebu, hutan tanaman industri (HTI), reklamasi pantai, dan pengembangan pariwisata berbasis industri.

Dalam konteks tambang, misalnya, terdapat 55 pulau kecil yang digempur industri pertambangan, mulai dari Pulau Bangka di Sulawesi Utara; Pulau Romang , Pulau Damar, dan Pulau Wetar di Maluku; Pulau Gebe, Pulau Gee, Pulau Pakal, dan Pulau Obi di Maluku Utara; Pulau Bunyu di Kalimantan Utara, Pulau Flores, Sumba, dan Timor, juga Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur, serta pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia.

Selain pulau kecil, wilayah pesisir juga mengalami nasib serupa, mulai dari Donggala, Morowali, Morowali Utara, dan Banggai di Sulawesi Tengah; Halmahera Tengah, Halmahera Timur di Maluku Utara; pantai pulau merah di Banyuwangi, dan beberapa pesisir lainnya di Indonesia.

Selain tambang, pulau-pulau kecil juga sedang dikepung perkebunan monokultur skala besar, seperti perkebunan sawit di Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah, Maluku Utara; perkebunan tebu di Sumba Timur dan Perkebunan Kemiri di Bajawa, Flores di Nusa Tenggara Timur.

Persoalan lain yang terus mengancam pesisir dan pulau kecil adalah terkait pengembangan industri pariwisata yang merampas ruang hidup masyarakat pesisir. Hal ini bisa kita temukan di wilayah pesisir Pulau Sumba dan Flores di NTT yang sudah dikavling korporasi nasional dan transnasional. Parahnya lagi, proyek pembangunan pariwisata yang menggunakan skema Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) telah berdampak pada perampasan dan terpisahnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dari laut sebagai ruang hidupnya.

Selain itu, persoalan proyek reklamasi di kawasan pesisir yang meningkat tajam dari 16 kawasan pada 2016 menjadi 42 kawasan pada 2018 juga tak mendapat tempat pada perdebatan capres kemarin. Padahal, kehadiran proyek reklamasi ini telah merusak ekosistem, merampas ruang hidup nelayan dan petambak garam, dan sebagian besar hanya untuk memenuhi kepentingan perluasan properti.

Seluruh kehadiran investasi berbasis lahan ini juga tak luput dari persoalan kekerasan dan intimidasi, yang berujung pada konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Dua contoh nyata atas persoalan ini bisa kita temukan di Pulau Romang, Maluku Utara dan Sumba Barat di NTT.

Di Pulau Romang, pelanggaran HAM begitu nyata, mulai dari praktik intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga yang menolak tambang, hingga hilangnya akses terhadap air bersih dan rasa aman bagi warga. Perusahaan menggunakan kekuatan brimob untuk mengamankan jalannya aktivitas pertambangan, alhasil masyarakat tidak lagi bebas berkegiatan seperti biasanya. Kegiatan pertambangan di Pulau Romang juga mengurangi hasil bumi masyarakat, seperti madu dan agar – agar yang menjadi komoditi utama masyarakat selama beberapa waktu. Selain itu, pelanggaran administrative dari prasyarat IPPKH juga terjadi. Namun, hal ini tidak mendapatkan perhatian dari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara di Sumba Barat, petani bernama Poro Duka tewas ditembak aparat kepolisian hanya karena menolak tanahnya dirampas untuk kepentingan pariwisata. Pola seperti ini kerap kali dilakukan di daerah yang akan digunakan untuk keperluan investasi semata. Penggunaan kekuatan kepolisian yang tak terukur menjadi pola yang lazim dilakukan karena pemerintah daerah gagal melakukan dialog dengan warga. Hal ini jelas menunjukkan bahwa negara mengabaikan kepentingan masyarakat di atas kepentingan investor.

Sejumlah persoalan di atas mestinya mendapat perhatian serius dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk kemudian serius mendorong penyelamatan pesisir dan pulau kecil dari seluruh kegiatan ekstraktif yang terbukti tidak menguntungkan masyarakat setempat. Upaya penyelamatan ini bisa dilakukan ketika kedua pasangan calon memiliki kadar pengetahuan yang cukup serta komitmen, mengingat karakteristik pulau-pulau kecil memiliki tingkat kerentatan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam, tidak mempunyai hinterland yang jauh dari pantai, memiliki daya dukung terbatas — terutama ketersediaan air tawar, mempunyai populasi terbatas dan relative homogen, serta sumberdaya hayati yang cenderung beragam dan melimpah.

Pesisir dan pulau-pulau kecil ini memiliki banyak sumberdaya yang sesungguhnya mampu menunjang pembangunan dan kebutuhan pangan, baik untuk kebutuhan domestiknya, maupun skala nasional. Keberadaan penduduk mampu berperan sebagai pelaku penting dalam mengakses sumberdaya alam, semisal distributor pangan yang berada di sekitar pulau-pulau kecil. Dengan berbagai pemanfaatan seperti ikan-ikan karang, aspek pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan serta komponen-komponen yang memiliki potensi finansial bagi daerah yang, semuanya tertuju pada kemandirian masyarakat pulau kecil.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 yang diikuti dua pasangan calon, yakni Joko Widodo – Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno kental dengan kepentingan para pebisnis tambang.

Hal ini terlihat jelas dalam lingkaran kedua pasangan calon, terdapat sejumlah nama penting yang terkait dan terlibat dalam bisnis tambang di Indonesia. Sebagian nama-nama ini menempati posisi penting, baik langsung sebagai calon presiden dan wakil presiden maupun sebagai Tim Sukses di Tim Kampanye Nasional atau Badan Pemenangan pasangan calon.

Di kubu Jokowi – Ma'ruf Amin, terdapat nama yang terkait langsung dengan bisnis pertambangan dan energi. Mereka adalah Luhut Binsar Panjaitan, Fachrul Razi, dan Suaidi Marasabessy yang tergabung dalam Tim Bravo 5, serta Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kalla, Jusuf Hamka, Andi Syamsuddin Arsyad, Oesman Sapta Oedang, dan Aburizal Bakrie.

Sementara di kubu Prabowo – Sandi, lebih gamblang lagi. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sendiri merupakan pemain lama dalam sektor tambang dan energi. Selain itu, terdapat Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Sudirman Said, dan Zulkifli Hasan.

Masing-masing mereka memiliki bisnis tambang langsung, memiliki sejumlah saham, dan memiliki peran atau kewenangan saat menjabat sebelumnya dalam memuluskan ekspansi pertambangan melalui kebijakan yang mereka kendalikan.

Selain itu, biaya kampanye kedua pasangan calon yang diduga bersumber dari industri tambang menguatkan kentalnya kepentingan pebisnis tambang pada Pemilu 2019 ini. Sandiaga Uno, misalnya, tercatat sembilan kali menjual saham untuk menutupi biaya kampanye. Sementara di kubu Jokowi – Ma'ruf, sebanyak 86% dari total biaya kampanye yang dilaporkan kepada KPU, sumbernya berasal dari Perkumpulan Golfer TBIG yang, diduga adalah PT Tower Bersama Infrastructure Group dan Perkumpulan Golfer TRG yang juga diduga adalah PT Teknologi Riset Global Investama. Setelah ditelusuri, pendiri kedua perusahaan tersebut adalah Wahyu Sakti Trenggono yang, dalam TKN Jokowi – Mar'uf memegang posisi bendahara.

Wahyu Sakti Trenggono, bersama Garibaldi Tohir, juga merupakan komisaris PT Merdeka Copper Gold, salah satu pemegang saham PT Bumi Suksesindo yang menambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi.

Pencantuman sumbangan dari perkumpulan Golfer TBIG dan TRG ini, patut diduga sebagai upaya menyamarkan sumber pendanaan yang berasal dari bisnis tambang, yang dalam proses aktivitasnya bukan tanpa masalah.

Keterkaitan dan keterlibatan langsung dalam bisnis tambang, hingga sumber dana kampanye dari kedua pasangan calon yang sebagiannya sama-sama berasal dari industri tambang menunjukkan betapa Pemilu 2019 sangat kental dengan kepentingan industri tambang. Kepentingan ini terkait dengan upaya memastikan kenyamanan investasi tambang yang sedang berjalan sekaligus membuka investasi serupa yang baru, serta terhindar dari upaya penegakan hukum.

Bahkan dalam kasus tambang emas Tumpang Pitu, baik Luhut Binsar Pandjaitan, Wahyu Sakti Trenggono maupun Sandiaga Uno sama-sama memiliki hubungan bisnis dalam jejaring kepemilikan tambang emas di Tumpang Pitu. Relasi politik dan bisnis yang melibatkan orang-orang penting ini, menjadi sangat mungkin penegakan hukum tak akan berjalan, bahkan sebaliknya akan dengan mudah mematikan resistensi warga, seperti yang terjadi pada Budi Pego dan warga lainnya di Banyuwangi yang dikriminalisasi.

Contoh lain ihwal tumpulnya penegakan hukum dalam sektor tambang, bisa kita temukan dalam kasus yang melibatkan perusahaan milik Luhut Binsar Pandjaitan di Kalimantan Timur yang, tercatat terlibat dalam perampasan tanah-tanah kelompok tani di Desa Sungai Nangka, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), Kutai Energi, dan Trisensa Mineral Utama yang semuanya anak perusahaan Toba Bara Group tercatat meninggalkan 36 lubang tambang, bahkan PT ABN telah menyebabkan rumah-rumah amblas akibat aktivitas tambang yang terlampau dekat dengan pemukiman.

Sejumlah perusahaan ini tetap beraktivitas, bahkan oleh rezim Jokowi – Kalla, konsesi tambang milik PT BSI dan PT DSI di Tumpang Pitu malah menjadi kawasan objek vital nasional, polisi menjaga keamanannya 1 x 24 jam sehari.

Relasi bisnis dan politik antara elit politik dan pebisnis tambang ini, juga kita temukan dalam kasus tambang di pulau-pulau kecil. Keberadaan tambang

di 55 pulau kecil di Indonesia, terutama Pulau Gebe, Pulau Gee, dan Pulau Wawoni di Maluku Utara tak terlepas dari sosok Fachrul Razi, yang tergabung dalam Tim Bravo 5. Fachrul Razi tercatat memegang posisi Presiden Komisaris di PT Central Proteina Prima dan Komisaris Utama PT Antam. Fachrul yang juga merupakan Komisaris PT Toba Bara Sejahtera, bahkan memiliki saham di PT Antam yang menambang pulau-pulau kecil di atas.

Jadi, harapan masyarakat di daerah lingkar tambang untuk bisa keluar dari krisis dan masalah tampaknya jauh panggang dari api. Pemilu 2019, dengan keterlibatan para pebisnis tambang berpotensi besar membuka lebar krisis dan masalah semakin parah. Sehingga, siapapun yang menang dalam Pemilu 2019, rakyat tetap berada di pihak yang kalah, menanggung risiko akibat praktik eksploitatif, sedangkan pebisnis tambang, berikut elit politik terkait, tetap menang, melanjutkan ekstraksi untuk keuntungan diri dan kelompok mereka.

Batu bara: sumber pendanaan kampanye politik

selain itu, dengan pertumbuhan yang cepat dalam 20 tahun terakhir, sektor batu bara telah menjadi salah satu sumber utama pendanaan politik di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemain kunci di industri batu bara memainkan peranan penting dalam pemilihan presiden 2019, baik di tim kampanye Joko Widodo – Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Para calon dan tim inti kampanye berbisnis dan terkait dengan sektor batu bara.

Di tingkat provinsi dan kabupaten, pilkada langsung dalam konteks desentralisasi memerlukan pendanaan politik yang tidak sedikit. Uang dari bisnis pertambangan batu bara kemudian mengisi kebutuhan pendanaan bagi para kandidat dalam pilkada. KPK dan organisasi masyarakat sipil mencatat adanya kenaikan tajam jumlah izin pertambangan saat kampanye pilkada atau segera setelah pilkada selesai.

Batu bara, korupsi politik, dan oligarki lama

Kebutuhan terhadap modal yang besar, keterkaitan erat dengan peraturan pemerintah, adanya royalti dan pajak serta ketergantungan terhadap

infrastuktur pemerintah untuk mengirimkan batu bara ke pasar menjadikan sektor ini terpapar korupsi politik, dalam bentuk perdagangan pengaruh, political capture dan regulatory capture. Perusahaan pertambangan batu bara harus berurusan dengan pejabat publik,yang kemudian mendorong "perselingkuhan" antara perusahaan, birokrat, dan politisi. Para elit politik juga menyatukan bisnis dengan politik di sektor pertambangan batu bara, antara lain Aburizal Bakrie (mantan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar serta mantan menteri di Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono) dengan Bumi Resources dan Prabowo Subianto (pendiri dan Ketua Umum Partai Gerindra) dengan grup bisnis Nusantara.

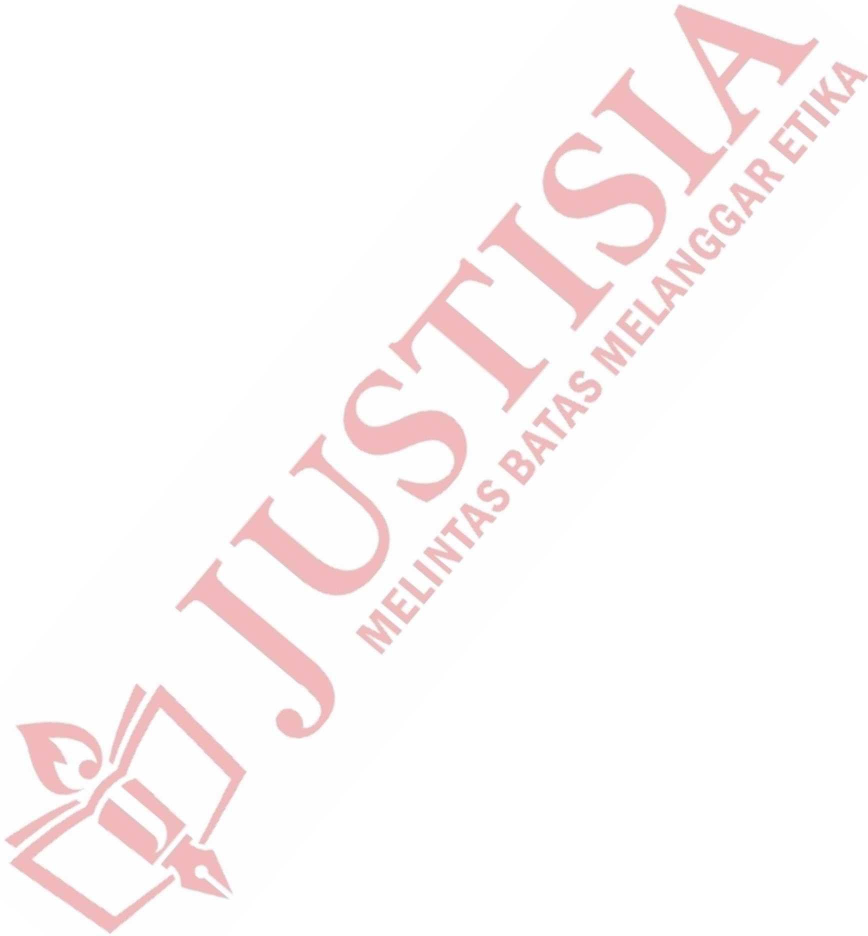
Terdapat elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batu bara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membawahi sektor pertambangan dan energi merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtra, perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batubara dan PLTU. Beberapa politically-exposed persons (PEPs) lainnya terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, termasuk anggota keluarga Luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal.

Dalam menyatukan bisnis dan politik di sektor batubara, Luhut menggunakan struktur lama oligarki politik: istana kepresidenan, militer, dan partai politik terutama Partai Golkar. Dia juga menggunakan lanskap baru yaitu desentralisasi dengan bekerja sama dengan elite dan penguasa lokal. Di Partai Golkar, Luhut terkoneksi dengan Aburizal Bakrie, Idrus Marham, AzisSyamsuddin, Syaukani Hasan Rais, dan Rita Widyasari.

Hukum di Indonesia mewajibkan perusahaan termasuk di sektor pertambangan batu bara untuk mengungkapkan pemilik sah perusahaan tersebut sebagaimana didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, pemilik manfaat, atau benifical owner,masih dapat menyembunyikan keterlibatan mereka.

Sebelum tahun 1999, peraturan dan izin pertambangan dikelola oleh pemerintah pusat. Setelah pelaksanaan desentralisasi, politisi di daerah

mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Elite politik di daerah memiliki kekuasaan untuk menerbitkan izin pertambangan, terutama sebagai bagian dari pendanaan politik. Oleh karenanya banyak terjadi tugar guling dana politik dengan sumber daya alam yang berada di daerah untuk dikuras.



Kontektualisasi Nilai-Nilai Islam dalam Menyelamatkan Lingkungan Hidup

Wahyu Eka Setyawan

Bumi sudah memasuki fase-fase kritis, hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena alam yang mulai keluar dari batas normal. Berdasarkan laporan terbaru IPCC (*The Intergovernmental Panel on Climate Change*) sebuah badan dari PBB yang berkonsetrasi pada asemen perubahan iklim, pada bulan Oktober 2018 menghimbau agar semua pihak, khususnya pemerintah agar mengambil sebuah keputusan yang pasti dan konkrit, terutama untuk menahan suhu bumi di bumi ini agar konstan di bawah angka 1,5 derajat celcius.

Menurut asemen dari IPCC, pemanasan global akibat ulah manusia (*anthropogenic*) telah mencapai 1 derajat celcius pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan masa pra industrial, kondisi menkhawatirkan tersebut terus meningkat kira-kira sekitar 0.2 derajat celcius dalam sepuluh tahun terakhir. Dengan kata lain, jika kondisi ini dibiarkan dan suhu terus meningkat dengan angka konstan seperti sekarang ini, pemanasan global karena tindakan manusia akan melewati batas kesepakatan global, yakni 1,5 derajat Celcius yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2040.[1]

Selain itu, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melaporkan bahwa akan ada peningkatan angka bencana hidrometeorologi (bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca), seperti bencana banjir, longsor dan puting beliung. Dalam kurun waktu 4 bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai maret tercatat ada 1.087 bencana yang

[1]IPPC. 2018. SPECIAL REPORT: GLOBAL WARMING OF 1.5 ºc. Diakses dari https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya ada sekitar 166 jiwa meninggal dan hilang, 313 jiwa luka-luka, dan 1.036.362 jiwa mengalami gangguan fisik dan psikis serta harus mengungsi. Bencana hidrometereologi ini juga telah menyebabkan 14.117 unit rumah rusak, dengan rincian 2.578 rumah rusak berat, 2.315 rumah rusak sedang dan 9.224 rumah rusak ringan. Tidak hanya itu tercatat ada sekitar 453 fasilitas publik rusak, dengan rincian 266 sekolah dan madrasah, 161 fasilitas ibadah dan 26 fasilitas kesehatan.[2]

Jika itu terjadi di tahun 2017, maka tren bencana hidrometeorologi semakin meningkat di tahun 2018. BNPB kembali merilis di tahun 2018, tercatat ada sekitar 2564 bencana di Indonesia. Bencana yang paling dominan muncul yakni angin puting beliung sekitar 799 kasus, banjir 677 kasus, dan longsor 472 kasus. Tidak hanya itu saja BNPB mencatat jika bencana hidrometereologi, telah menyumbang sekitar 97 persen dari total keseluruhan bencana di Indonesia. Sementara sisanya sekitar 3 persen merupakan bencana geologis, seperti gempa bumi dan tsunami. BNPB memprediksi pada tahun 2019 bencana akan semakin meningkat, terutama bencana hidrometereologi. Berdasarkan kajian dari BNPB bencana hidrometeorogi akan mendominasi sekitar 95 persen dari total bencana keseluruhan.

Perubahan iklim yang dipengaruhi oleh rusaknya lingkungan hidup menjadi faktor utama penyebab bencana. Tercatat ada beberapa faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup, seperti semakin meluasnya kerusakan di daerah aliran sungan (DAS), lahan kritis, kerusakan hutan dan konversi peruntukan lahan (baik produktif maupun kawasan resapan). Selain itu hingga kini tercatat ada sekitar 110.000 hektar lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, sedangkan lahan kritis telah mencapai 14 juta hektar.[3] Maraknya bencana alam di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perubahan struktur alam. Perubahan iklim nyatanya sangat erat kaitannya dengan perusakan vegetasi alamiah di bumi, seperti hutan, daerah aliran sungai dan lahan-lahan

[2]BNPB. 5 Mei 2017. Sudah 1.087 Bencana Selama 2017, Diprediksi Akan Terus Bertambah. Diakses dari https://www.bnpb.go.id/sudah-1-087-bencana-selama-2017-diprediksi-akan-terus-bertambah

[3]DWINDONESIA. 2019. Bencana Alam di Indonesia tahun 2019 Diprediksi Terus Terjadi. Diakses dari https://www.dw.com/id/bencana-alam-di-indonesia-tahun-2019-diprediksi-terus-terjadi/a-46909297

produktif. Namun, situasi demikian tak serta merta membuat berbagai pihak sadar, mengapa menjaga ekuilibrium lingkungan hidup itu merupakan hal yang substantif. Karena kerusakan lingkungan hidup sangat berkoherensi dengan bencana-bencana yang kian erat menyapa Indonesia belakangan ini, terutama bencana hidrometereologi.

Bencana Datang Akibat Rakusnya Manusia

Kilas balik pada tahun 2018 Walhi melaporkan terdapat kecenderungan eskalasi izin usaha pertambangan, dari berstatus eksplorasi menjadi eksploitasi terutama untuk ekstraktif batubara. Sebagaimana yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di wilayah kawasan Gunung Meratus. Situasi tersebut juga menjadi stimulan progresif bagi pengaktifan kembali status wilayah eksploitasi tambang yang telah lama non-aktif. Pemerintah sebagai regulator dan pemangku kepentingan, melihat ada potensi ekonomi yang lebih dari sektor ekstraktif ini.

Hal tersebut sangat erat relevansinya dengan meningkatnya harga batubara di pasar internasional, serta dipengaruhi juga oleh konjungtur nilai kurs rupiah di pasar uang. Sehingga untuk mempertahankan skala makro, pemerintah harus meningkatkan status izin usaha dari eksplorasi menjadi eksploitasi dan membuka selebar-lebarnya investasi. Produksi konsumsi harus dijaga, skema pasar mendikte pemerintah agar mengikuti alur tersebut agar neraca ekspor-impor terjaga. Pemerintah yang sebelumnya membatasi produksi batubara dari 485 juta ton, sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan RKP 2018. Melanggar aturan tersebut dengan memerintahkan ESDM untuk menambah kuota produksi batubara sebesar 100 juta ton, sehingga total ada 585 juta ton. Padahal jika dillihat dari kebutuhan batubara terutama untuk PLTU tidak membutuhkan batubara sebesar itu, karena wacana proyek 35.000 MW belum beroperasi secara maksimal. Kesemuanya untuk memenuhi skema pasar dan memanjakan korporasi-korporasi predatoris yang rakus akan lingkungan itu sendiri.[4]

Efek dari diperluasnya produksi batubara selain untuk ekspor, telah menjadi stimulan pembangunan masif PLTU Batubara di seluruh pelosok Indonesia.

[4] Walhi Nasional. 2018. Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi 2019. Dapat diunduh di https://walhi.or.id/tinjauan-lingkungan-hidup-2019/

Dalam dokumen pembangunan energi pemerintah, wacana pembangunan PLTU Batubara pada 2018 terus berlanjut. Wilayah-wilayah yang akan diakselerasi pembangunan tersebut yakni Riau, Indramayu, Cirebon, Cilacap, Tanjung Jati, Sumsel dan lainnya. Pilihan pemerintah dalam membangun PLTU Batubara menjadi prioritas pembangunan energi nasional, merupakan langkah yang sangat beresiko, terlebih pasokan listrik di beberapa wilayah atau bahkan secara keseluruhan sebenarnya dalam tataran aman, jika didistribusikan dengan baik. Karena dengan semakin ditambahnya PLTU Batubara, sama saja mengizinkan tanah-tanah dikeruk terus menerus, meninggalkan lubang dan limbang serta hak hidup rakyat pun dipertaruhkan. Selain itu dengan penambahan PLTU Batubara, sama saja dengan turut berpartisipasi dalam perubahan iklim, karena batubara menjadi salah satu material yang menghasilkan gas rumah kaca yang merusak ozon dan menjadi faktor determinan dalam kenaikan suhu.

Sementara itu untuk sektor kehutanan, berdasarkan pelaporan dari WRI-Indonesia terdapat peningkatan hilangnya tutupan di tahun 2012, sekitar seluas 928.000 hektar. Angka tersebut sempat turun signifikan pada tahun 2013, tetapi kembali meningkat pada rentang tahun 2014 dan 2015, masing-masing seluas 796.500 hektar dan 735.000 hektar, jikalau ditotal ada sekitar 1.531.500 hektar dalam kurun waktu dua tahun. Sebagai catatan saja, di pulau Kalimantan hampir separuh angka kehilangan tutupan hutan nasional terjadi di wilayah ini. Pada tahun 2015 terekam terdapat 323.000 hektar hutan yang hilang. WRI-Indonesia kemudian menemukan penyebab hilangnya tutupan hutan di wilayah Kalimantan, salah satunya karena ekspansi perkebunan kelapa sawit. Perluasan perkebunan sawit di Kalimantan hampir menyasar seluruh wilayah di pulau tersebut, sehingga wilayah kalimantan yang dikenal sebagai salah satu pancang hutan nasional kini terancam keberadaannya.

Sementara di wilayah Sumatera tercatat angka hilangnya hutan turun secara signifikan, dari rentang waktu 2014 hingga 2015. Tetapi setelah ditelaah lebih lanjut, adanya angka penurunan kerusakan kawasan hutan, dikarenakan tidak ada lagi hutan primer yang dapat dialihfungsikan. Terekam kini di wilayah Sumatera masih memiliki hutan primer seluas 321.000 hektar yang tersebar

di wilayah perbukitan, sehingga sangat susah untuk dialihfungsikan. Wilayah selanjutnya yakni Papua, yang menjadi pusat bagi sepertiga wilayah hutan hujan di Indonesia. Namun terdapat suatu hal yang cukup merisaukan, tercatat ada peningkatan angka hilangnya hutan di Papua. Tercatat terjadi kehilangan hutan yang cukup masif sejak tahun 2001. Sepanjang 2012 sampai 2015 provinsi Papua dan Papua Barat banyak kehilangan tutupan hutan. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh perluasan industri pertanian (proyek MIFE), konsesi penebangan kayu skala besar dan perkebunan. Greenpeace kemudian merekam ada sekitar 48 perusahaan perkebunan sawit telah memiliki izin di Papua dan Papua Barat, berkisar di antara 25.000 hingga 45.000 hektar. Sasaran utama alih fungsi terdapat di hutan primer yang menjadi tumpuan karbon Indonesia, serta lahan gambut yang menjadi salah satu penyeimbang karbon.[5]

Masih banyak lagi, contoh kasus yang melatarbelakangi menurunnya kualitas lingkungan hidup di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim. Kerakusan-kerakusan yang terus direproduksi dengan dalih kesejahteraan dan kedaulatan, nyatanya malah menjadi salah satu faktor kunci dari kerusakan struktur lingkungan hidup, dan menjadi faktor determinan dalam meningkatnya bencana alam di Indonesia. Secara adil, salah satu penyumbang bencana alam terbesar di Indonesia dilatabelakangi oleh rusakya ekosistem dan faktor perubahan iklim. Dengan kata lain bencana alam sesungguhnya bukan hanya karena faktor takdir (apokalisptik), namun juga karena ulah dari kerakusan manusia (*anthropogenic*) yang terfasilitasi dalam sistem yang bernama kapitalisme.

Islam dalam Memandang Pentingnya Menjaga Lingkungan Hidup

Di dalam ajaran agama Islam sendiri terutama dalam kajian tauhid, kita diajarkan untuk memelihara dan mengamalkan tiga hal, yakni *Hablum Minallah*, *Hablum Minannas* dan *Hablum Minalalam*. Jikalau *Hablum Minallah* merupakan hubungan vertikal antara sang pencipta dengan yang diciptakan, maka *Hablum Minannas* dan *Hablum Minalalam* merupakan hubungan horizontal, di mana kita diwajibkan untuk memelihara *ukhuwah* sesama umat manusia dan

[5]Arief Wijaya, dkk. 24 Mei 2017. 6 Tahun Sejak Moratorium, Data Satelit Menunjukkan Hutan Tropis Indonesia Tetap Terancam. Diakses dari https://wri-indonesia.org/id/blog/6-tahun-sejak-moratorium-data-satelit-menunjukkan-hutan-tropis-indonesia-tetap-terancam

menjaga segala sesuatu yang berada di sekitar kita, seperti tidak berbuat *dlarar* (kerusakan) dan berperilaku *ghuluw* (melampaui batas) dalam memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Perilaku-perilaku tersebut kerap dilakukan oleh mereka yang berwatak *mufsidun* (suka merusak), orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah karena perilakunya merugikan banyak orang.

Perihal bencana alam, dalam Islam sendiri sudah menjelaskan kondisi tersebut dalam sebuah peringatan yang tercatat dalam Al-Quran. Salah satunya yang tertulis di surat Ar-Rum ayat 41-42, yang mana Allah telah berfirman:

> *"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (41). Katakanlah (Muhammad), bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah) (42)."*

Pada surat Ar-Rum ayat 41 dan 42, sesungguhnya merupakan peringatan kepada manusia agar senantiasa menjaga perbuatan mereka, karena Allah menciptakan bumi ini saling melengkapi. Jika ada salah satu fungsi yang hilang, maka pengaruhnya akan mencakup semua hal. Semisal hutan di bukit ditebang secara membabi buta, tentu akibatnya ialah longsor akan menyambut dengan riang dan gembira. Bukankah, di dalam Al-quran sudah tegas mengingatkan agar tidak menganggu keseimbangan lingkungan, dengan mengkeploitasi mereka berlebihan. Karena satu fungsi yang terganggu, secara tidak langsung akan mempengaruhi fungsi lainnya sebagai sebuah koherensi.

Selain surat Ar-Rum, peringatan lainnya datang dari surat Al-A'raf surat 56-58. Surat ini lebih menunjukan sisi Allah sebagai sang pencipta yang memberikan karunianya kepada manusia, berupa alam yang dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan hidup manusia, berikut fiman Allah dalam surat Al-A'raf:

> *"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan (56). Dialah yang meniupkan angina sebagai pembawa kabar*

gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angina itu membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran (57). Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur (58)."

Allah secara tegas memerintahkan manusia untuk merawat lingkungan hidup yang telah diciptakan, serta melarang manusia berbuat kerusakan (*dlarar*), karena perbuatan itu akan berakibat pada bencana yang akan merugikan manusia itu sendiri. Alam telah menyediakan semuanya, jika dikontekstualisasikan dengan kondisi terkini, maka dalam surat ini mencakup hutan dan seluruh isinya. Jikalau hutan dialihfungsikan, dieksploitasi secara masif, tidak hanya manusia yang merugi, namun mahkluk lainnya seperti flora dan fauna pun juga akan terusik. Sehingga jika ditautkan dengan ajaran tauhid dasar mengenai relasi vertikal dan horizontal, *Hablum Minallah*, *Hablum Minannas* dan *Hablum Minalalam*. Maka merusak alam merupakan salah satu bentuk maksiat, atau dalam kata lain tidak menjalankan perintah-perintah Allah, seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Quran.

Situasi yang telah dijabarkan di dalam Al-Quran sangat erat kaitannya dengan konteks ekosistem, di mana pemanfaatan alam dalam hal ini tergambar dalam kerangka sumber daya alam, tidak boleh dieksploitasi secara serampangan. Ekosistem menurut Tansley (1935) merupakan suatu hal yang kompleks, bertumpu pada situasi yang alami dan menjaga keadaan agar tercipta keseimbangan dinamis. Ekosistem dipandang sebagai sebuah area yang relatif stabil dan tangguh, tetapi memiliki suatu kerentanan dan fluktuaktif. Dalam mengembangkan analisis ini, Tansley menarik sebuah perspektif dari matematikawan dan fisikawan Marxis Inggris, bernama Hyman Levy.

Dalam kerangka Levy, manusia dipandang sebagai "faktor biotik yang sangat kuat" yang rentan terganggu akibat berubahnya ekosistem. Penjelasannya yakni,

makanan kita berasal dari ekosistem alami dan pertanian. Ekosistem pertanian tradisional yang bergantung pada curah hujan telah dimodifikasi dalam beberapa kali, untuk menghasilkan lebih banyak dan lebih banyak makanan. Tentu dalam praktiknya dengan penambahan bahan kimia dan pemanfaatan air dari sistem irigasi yang baik. Tetapi semua hal tersebut masih tergantung pada energi matahari untuk pertumbuhan tanaman. Sama halnya dengan keberadaan air yang sangat bergantung dengan kondisi alamiah, seperti vegetasi, gunung dan tanah. Begitu juga migas, batubara dan mineral, terbentuk karena siklus alam. Jikalau itu semua dieksploitasi secara masif, hubungan biotik dan abiotik akan lenyap, tentu di sisi ini manusia akan terganggu kehidupannya.[6]

Penutup

Menjaga lingkungan hidup dalam konteks ini, sama halnya dengan melanjutkan perjuangan yang bersifat kemasyarakatan (*jihad ijtimaiyah*), mengembangkan ajaran moral, *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang) dan *I'tidal* (konsisten) dalam melawan *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara dasar organisasi sendiri Nahdlatul Ulama oleh Hadrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, salah satu tujuannya ialah untuk membela kaum *mustadh'afin*. Dalam konteks ini dapat dikaitkan dengan petani, yang kini sedang terancam oleh banalnya investasi. Kiai Hasyim pernah menulis di Soeara Moeslimin Indonesia pada 17 Desember 1943 (19 Muharram 1363), beliau menuliskan:

> *"Pendek kata, bapak tani adalah goedang kekajaan, dan dari padanja itoelah Negeri mengeloearkan belandja bagi sekalian keperloean. Pa' Tani itoelah penolong Negeri apabila keperloean menghendakinja dan diwaktoe orang pentjari-tjari pertolongan. Pa' Tani itoe ialah pembantoe Negeri jang boleh dipertjaja oentoek mengerdjakan sekalian keperloean Negeri, jaitoe diwaktunja orang berbalik poenggoeng (ta' soedi menolong) pada negeri; dan Pa' Tani itoe djoega mendjadi sendi tempat negeri didasarken."*[7]

---

[6] Tansley, A.G., 1935. *The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology*, 16(3), pp.284–307.

[7]KH. Hasyim Asy'ari. 1943. *Keoetamaan Bertjojok Tanam dan bertani; Andjoeran Memperbanyak Hasil Boemi dan Menjoeboerkan Tanah, Andjuran Mengoesahakan Tanah dan Menegakkan Ke'adilan*. Soeara Moeslimin Indonesia No 2 Tahun ke-2, 17 Desember 1943/19 Muharom 1363

Perusakan hutan, eksploitasi berlebihan merupakan hal yang dapat menimbulkan *dlarar* (kerusakan), oleh sebab itu haram hukumnya untuk dilakukan. Sebagaimana situasi yang terlihat sekarang ini, jikalau itu terus dilanjutkan maka bencana akan datang mengancam. Seperti yang diungkapkan oleh BNPB, yang mengatakan perubahan iklim menjadi penyebab utama bencana hidrometereologi. Melihat bahwa ulama-ulama terdahulu seperti Hadrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, Syaikh Arsyad Al-Banjari dan KH. Sahal Mahfudz, mengajarkan bagaimana pentingnya menjaga kesuburan tanah, kelestarian lingkungan dan membela kaum *mustadh'afin*.

Keberagaman dan kedamaian yang hilang tidak akan bisa tergantikan oleh emas. Pertanian terbukti bisa menyejahterahkan rakyatnya, bahkan laut dengan keanekaragamannya bisa menjadi mata pencaharian yang menjanjikan. Kiai Sahal Mahfudz dalam nuansa fiqh sosial, menyatakan Jika keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, bahkan seluruh aspek kehidupan manusia merupakan kunci kesejahteraan. Pernyataan Kiai Sahal secara eksplisit dapat dimaknai jika hilangnya lingkungan hidup akan berdampak pada aspek kesejahteraan. Alam yang menghidupi manusia, sudah seharusnya dijaga dengan benar dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Pada dasarnya secara prinsipil, semua akan terjaga asal perilaku boros dihilangkan dan berpedoman hidup sederhana sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW.[8]

Ibadah tidak hanya masalah transendensi antara manusia dengan Allah, namun juga memperjuangkan umat terkhusus untuk kaum *mustadh'afin*, terlebih Pak Tani, dari ancaman penindasan serta perilaku dzalim, merupakan ibadah yang sesungguhnya. Sebagai penutup, saya mengutip perkataan KH. Said Aqil Sirodj, Ketua PBNU dan juga mubaligh yang penulis takdzimi, pada saat lawatan di Samarinda pada bulan Februari 2013.

> *"Agama tak bisa ditegakkan di ruang hampa tanpa tanah dan air, karena itulah mencintai agama berarti mencintai tanah dan air, kehilangan tanah berarti kehilangan agama dan sejarah."*

---

[8]Mahfudh, K.S., 2008. *Nuansa Fiqh Sosial*. LKIS PELANGI AKSARA.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Wijaya, dkk. 24 Mei 2017. *6 Tahun Sejak Moratorium, Data Satelit Menunjukkan Hutan Tropis Indonesia Tetap Terancam*. Diakses dari https://wri-indonesia.org/id/blog/6-tahun-sejak-moratorium-data-satelit-menunjukkan-hutan-tropis-indonesia-tetap-terancam

Mahfudh, K.S., 2008. *Nuansa Fiqh Sosial*. LKIS PELANGI AKSARA.

Tansley, A.G., 1935*. The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology*, 16(3), pp.284–307.

Walhi Nasional. 2018. *Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi 2019*. Dapat diunduh di https://walhi.or.id/tinjauan-lingkungan-hidup-2019/



Lebaran, Mudik, dan Silaturahmi Nasional

Oleh: Sumanto Al Qurtuby

Visiting Senior Research Fellow, Middle East Institute,
National University of Singapore, dan Staf Pengajar di King
Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi

Tidak seperti negara-negara lain yang juga mayoritas berpenduduk Muslim, Indonesia mempunyai tradisi tahunan unik dalam merayakan hari raya Idul Fitri atau, dalam Bahasa Indonesia, Lebaran. Kata "Lebaran" ini berasal dari Bahasa Jawa "lebar" yang artinya selesai, maksudnya selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Di Indonesia, Lebaran bukan hanya semata-mata hari libur umat Islam tetapi juga hari raya bagi umat semua agama. Sebagaimana kaum Muslim, mereka dari agama non-Islam juga turut merayakan Lebaran dengan suka-cita.

Tidak berlebihan jika saya katakan bahwa Lebaran itu adalah sebuah "festival kultural nasional" bukan hanya tradisi agama kaum Muslim saja. Lebaran juga bisa disebut sebagai semacam simbol simbiose agama-budaya yang mampu menjadi pemersatu manusia dari berbagai etnis, suku, dan bahasa.

Meminjam istilah antropolog Belanda Arnold van Gennep, dalam buku klasiknya *The Rites of Passage*, Lebaran bisa dimaknai sebagai sebuah *"fase liminal rites de passage"* dimana Muslim dan non-Muslim merayakan hari raya ini secara bersama-sama tanpa adanya segregasi agama dan sekat budaya.

Batas-batas budaya lebur. Batas-batas agama lumer. Aturan-aturan kaku menjadi lentur. Mereka membaur

menjadi satu saling mengunjungi dan bersilaturahmi, saling meminta maaf, saling mengucapkan "salam Idul Fitri," yakni *minal aidin wal faizin* (meskipun kadang-ladang tidak jelas pelafalannya), saling berbagi makanan, dan seterusnya. Indah sekali. Inilah yang oleh Arnold van Gennep dan Victor Turner disebut "tahapan liminal" tadi.

Setiap tahun, saat menjelang lebaran, jutaan warga Indonesia dari berbagai latar belakang profesi, agama, dan etnik—baik yang tinggal di kota-kota di Indonesia atau bahkan di manca negara, baik yang puasa maupun yang tidak puasa—selalu atau sering menyempatkan diri untuk "mudik", sebuah "ritual tahunan" pulang ke kampung halaman (*home coming*) untuk bersilaturahmi dengan orang tua, keluarga, teman lawas, dan tetangga.

Menjalin hubungan kekerabatan

Kata "silaturahmi" (atau kadang-kadang disebut juga "silaturahim") berakar dari Bahasa Arab, yaitu "shilah" yang berarti hubungan dan "rahim" yang berarti "kerabat" atau "kasih-sayang". Jadi kata "silaturahmi" atau "silaturahim" bisa dimaknai sebagai hubungan kekerabatan atas dasar kasih-sayang. Dalam perkembangannya, kata silaturahmi bukan hanya dipakai dalam konteks antar-keluarga dekat sesama famili tetapi juga dengan "keluarga jauh" sesama warga negara dan umat beragama.

Dengan kata lain, silaturahmi ini bukan hanya berskala lokal tetapi sudah menasional. Salah satu makna penting dari ajaran atau tradisi silaturahmi ini adalah sebagai "mekanisme rekonsiliasi" yang sangat efektif bagi upaya penyelesaian berbagai kekhilafan, perselisihan, ketegangan, atau konflik—baik antar anggota keluarga atau masyarakat—yang terjadi di masa silam. Silaturahmi juga bisa dijadikan sebagai sarana relasi sosial untuk memecahkan perbagai kebuntuan dan problem ruwet di dalam keluarga maupun masyarakat secara umum.

Selain silaturahmi, mudik pada saat Lebaran juga dalam rangka untuk ziarah ke makam orang-orang terdekat yang sudah wafat. Ziarah kubur adalah salah satu bagian integral dari corak keislaman dan keagamaan masyarakat Indonesia yang sulit untuk dihilangkan karena sudah menjadi tradisi dan budaya warisan

turun-temurun ratusan tahun. Karena itu meskipun ada sejumlah kelompok Islam reformis-Salafi-Wahabi yang mengkafir-sesatkan atau mem-bid'ahkan ziarah kubur, kaum Muslim di Indonesia jalan terus mempraktekkan tradisi agama ini.

Ritual mudik

Bagi sebagian besar kaum Muslim di Indonesia, makna lebaran bahkan jauh lebih penting ketimbang puasa itu sendiri. Banyak umat Islam di Indonesia, khususnya *"kaum abangan"* dan *"wong nasional"* (bukan "kaum putihan" dan santri), yang tidak puasa selama bulan Ramadan atau mereka puasa hanya pada hari-hari pertama saja. Selebihnya absen.

Tetapi mereka akan mengupayakan sekuat tenaga untuk mudik merayakan "ritual tahunan": Lebaran dan salat Idul Fitri. Meskipun mereka kadang tidak pernah salat sama sekali tetapi untuk sembahyang Idul Fitri mereka akan mengupayakannya sekuat tenaga karena ada keyakinan bahwa dengan melakukan "salat istimewa" ini, dosa-dosa dan aneka "pelanggaran ibadah" yang mereka perbuat selama setahun akan diampuni oleh Tuhan.

Tujuan mendasar atau "makna utama" dari tradisi Lebaran ini adalah silaturahmi sekaligus permintaan maaf dan pengampunan kepada sesama manusia biasanya dimulai dari mereka yang statusnya "lebih rendah" dengan mereka yang "lebih tinggi" seperti anak kepada orang tua, buruh kepada majikan, yang muda kepada yang tua, anak buah kepada bos, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan *halal bihalal* yang menjadi inti atau ruh dari Lebaran, yakni sebuah pernyataan saling meminta maaf satu sama lainnya yang diterjemahkan dalam konteks bahasa lokal menjadi "Mohon maaf lahir dan batin." Kadang-kadang disambung dengan kalimat "Minal aidin wal faizin".

Ritual mohon maaf

Penting untuk dicatat bahwa "ritual tahunan permintaan maaf" ini, lagi-lagi, bukan hanya diucapkan oleh sesama Muslim saja tetapi juga berlaku untuk

non-Muslim. Setiap tahun, saya juga mendapat ucapan "Mohon maaf lahir-batin, minal aidin wal faizin" ini dari berbagai teman—baik "teman nyata" maupun "teman maya" di internet.

Ketika mengomentari tentang tradisi Lebaran, mendiang antropolog Amerika, Clifford Geertz (1926–2006), dalam buku *The Religion of Java* yang sangat populer itu, menulis dengan cermat: "*In a broad, diffuse and very general way, it [Lebaran] stresses the commonalities among all Indonesians, stresses tolerance concerning their differences [and] stresses their oneness as a nation. It is, in fact, the most truly nationalist of their rituals, and, as such, it indicates the reality and the attainability of what is now the explicit ideal of all Indonesians — cultural unity and continuing social progress.*"

Meskipun observasi Clifford Geertz itu dilakukan pada tahun 1950-an ketika ia sedang meneliti tentang agama dan perubahan sosial di masyarakat Jawa, komentarnya dalam banyak hal masih valid hingga kini.

Melihat karakter, kualitas, dan "fungsi sosial" Lebaran ini yang mampu menjadi "perekat budaya", maka bukanlah mengada-ada jika tradisi tahunan ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai medium kultural untuk menggapai integrasi sosial, toleransi agama, persaudaraan antar agama, atau bahkan rekonsiliasi nasional sehingga hubungan antar agama dan antar kelompok yang kadang diwarnai ketegangan, konflik, dan kekerasan itu bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan dari bumi pertiwi Indonesia.

Krisis Ekologi dan Bangkrutnya Peran Agama

Oleh: Roy Murtadho

“MANUSIA bisa hidup tanpa emas, tapi tak bisa hidup tanpa air”, demikian bunyi protes aktivis lingkungan di Banyuwangi atas eksploitasi hutan Gunung Tumpang Pitu oleh PT. BSI milik pengusaha Sandiaga Uno. Gunung yang diturunkan statusnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi oleh bupati Banyuwangi Azwar Anas pada tahun 2013 tersebut, kini terancam kerusakan total bahkan musnah oleh aktivitas pertambangan emas di sana.

Apa yang terjadi pada Gunung Tumpang Pitu merupakan salah satu gambaran kecil saja dari besarnya perusakan lingkungan di Indonesia oleh korporasi, baik di sektor perkebunan maupun tambang. Sehingga mudah ditebak, wilayah dimana ada sumber daya mineral bisa dipastikan sudah diduduki korporasi. Eksploitasi SDA oleh perusahaan-perusahaan tambang tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tapi juga sangat merugikan negara dan sebagian besar rakyat yang hanya mendapatkan dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Di Samarinda, Kalimantan Timur, contohnya, tambang batubara tidak hanya merusak lingkungan tapi juga membunuh puluhan anak-anak kecil yang tenggelam di bekas galian tambang yang dibiarkan menganga.

Jika ditinjau dari sejarah tahapan kapitalisme, meluasnya perusakan lingkungan dan meningkatnya konsentrasi kepemilikan penguasaan sumber daya pada korporasi-korporasi besar, merupakan bagian dari proses globalisasi dengan liberalisasi ekonomi sebagai ciri utamanya. Mengenai

hal ini, apa yang dikatakan Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis, pada akhirnya terbukti benar bahwa "kebutuhan akan pasar yang senantiasa meluas untuk barang-barang hasilnya menghalau borjuasi ke seluruh muka bumi. Ia harus bersarang di mana-mana, berusaha di mana-mana, mengadakan hubungan di mana-mana".

Kedaulatan negara, sebagaimana seringkali dibicarakan, di hadapan institusi ekonomi global seperti WTO, World bank dan IMF menjadi semu dan tak berarti apa-apa. Karena ketiga lembaga dunia tersebut, di balik jargon kebebasan yang dipromosikannya, sebenarnya hendak mengatakan bebas untuk menjarah di seluruh belahan dunia. Mengenai hal ini, Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis, lagi-lagi mengatakan, "di dalam hubungan-hubungan borjuis sekarang ini yang dimaksud dengan kemerdekaan ialah perdagangan bebas, pembelian dan penjualan bebas". Dengan ini, demokrasi yang mula-mula dipahami sebagai: "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat", kini telah bergeser menjadi: "dari korporasi, oleh korporasi, untuk korporasi". Tepat disinilah, peran seorang pemimpin negara Dunia Ketiga seperti Indonesia, sebenarnya tak lebih hanya sebagai salesman yang menjajakan potensi SDA yang melimpah sebagai bahan mentah industri dan tenaga kerja murah pada korporasi. Noorena Hertz dalam bukunya, The Silence Take-over: Global Capitalism and The Death of Democracy,[1] menunjukkan bahwa saat ini semua pelayanan publik yang seharusnya menjadi tugas negara telah terkooptasi oleh korporasi. Jadi, bisa dikatakan, pada hakikatnya negara telah sirna ditelan korporasi.

Ironis sekali, negeri yang seringkali dengan bangga disebut sebagai "Tanah Air" ini, ternyata sekitar 175 juta hektar teritorialnya (tanah dan laut) dalam bentuk HPH hutan, HGU perkebunan, dan KK pertambangan dan migas. Kalau ditotal, sekitar 175 juta hektar atau sekitar 93 persen luas daratan Indonesia telah dikuasai oleh korporasi. Sebanyak 85 persen kekayaan migas, 75 persen kekayaan batubara, dan 50 persen lebih kekayaan perkebunan dan hutan tak ada satu jengkal pun yang dikuasai republik ini. Sementara air tawarnya

[1]Lih. Noorena Hertz, The Silence Take-over: Global Capitalism and The Death of Democracy, London: William Heinemann, 2001.

dikuasai sekitar 246 perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), yang 65 persen dipasok oleh perusahaan semacam Aqua Danone dan Ades Coca Cola. Dengan kondisi ini tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, Indonesia akan mengalami krisis air. Bukan tidak mungkin, kelak air akan jauh lebih berharga ketimbang emas.

Sejak dibukanya kontrak karya pada tahun 1967, negeri ini telah menjadi surga bagi korporasi tambang dengan makin lebarnya jalan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan pintu terbukanya. Seolah-olah mereka disambut dengan spanduk besar: "Welcome to heaven…".

Berdasar laporan yang pernah dilansir Salamudin Daeng dari Institute for Global Justice (IGJ), di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan anehnya di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007), pemilik modal justru diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Sementara perusakan dan perampokan hutan di Indonesia diperkirakan telah mencapai 2 juta hingga 2,4 juta hektar pertahun, yang artinya pada tiap 1 menit hutan Indonesia hilang seluas 6x lapangan sepak bola dan dalam 1 tahun seluas 3x wilayah DKI Jakarta. Dan dalam 50 tahun terakhir, Indonesia telah kehilangan sekitar 64 juta hektar hutan atau 40 persen dari luas hutan sebelumnya. Artinya 3,8 juta hektar hutan rusak dalam setiap tahun, yang mengakibatkan turut musnahnya habitat alaminya.

Terhadap situasi seperti ini, sebagai kaum beragama, kita perlu bertanya: dimana sebenarnya peran agama dalam perjuangan penyelamatan ruang hidup oleh ancaman greedy kapitalisme global? Kita yakin bahwa semua agama pada dirinya merupakan jalan pembebasan, karena faktanya secara historis tak ada satupun agama yang lahir dari dalam istana. Semua agama lahir di tengah-tengah rakyat dan menjadi suara kaum tertindas melawan tirani dan ketidakadilan.[2] Namun, kenapa sekarang, di hadapan perusakan besar-besaran alam, agama justru surut ke belakang? Kenapa agama hilang dari panggung sejarah perjuangan?

[2]Roy Murtadho, Haji Misbach Sebagai Mukadimah, Makalah yang disampaikan dalam diskusi di MAP Fisipol UGM dengan tema "Agama dan Teologi Pembebasan" pada 7 Juni 2016.

Sebelum menganalisis lebih lanjut aspek-aspek yang memungkinkan surutnya peran agama dalam berbagai perjuangan penyelamatan alam dari eksploitasi besar-besaran korporasi, kiranya penting kita lihat terlebih dahulu sekilas, pandangan Islam terhadap alam dan peran manusia di bumi.

Secara teologis, Islam menempatkan manusia sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi yang sekaligus menerima amanat untuk menjaga dan mengelola bumi, sebagaimana dengan terang ditunjukkan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah, 2:30, dan QS. al-Ahzab, 33:72. Sayangnya, manusia, khususnya umat Islam, seringkali berbuat sebaliknya. Allah sendiri mengatakan bahwa manusialah yang sesungguhnya membuat kerusakan di bumi, sebagaimana dalam QS. Ar-Ruum:41, "Zhahara al-fasad fi al-barri wa al-bahr bima kasabat aidinnas…" (Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia), yang oleh Ibnu Abbas dimaknai sebagai perbuatan merusak di lautan yang mengakibatkan rusaknya habitat ikan-ikan di laut.[3] Sementara dalam QS. Al-A'raaf:56, "Wala tufsidu fi al-ard ba'da islahiha" (Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya). Oleh Al-Qurthubi, ayat ini ditafsirkan sebagai larangan Allah pada umat manusia untuk berbuat kerusakan di atas bumi, baik sedikit maupun banyak.[4]

Maka semua kerusakan di bumi merupakan ulah manusia-manusia yang serakah dan tidak menyukuri nikmat Allah dengan merawat bumi sebaik-baiknya. Al-Qur'an menunjukkan beberapa penyebab kerusakan lingkungan (fasad al-bi'ah) diantaranya: Merusak (Al-A'raf, 7: 56 dan 74), (Al-Baqarah, 2: 60); Curang (Hud, 11: 85), (Al-Syura, 42: 181-183); Mengurangi/mengubah. (Al-Nisa', 4: 118-119); Dorongan hawa nafsu (Muhammad, 47: 22) (Al-An'am, 6:123) (Al-Isra',17: 16); Tidak seimbang dan berlebihan (Al-Isra', 17: 25-26) (Al-An'am, 6:141) (al-A'raf; 7:31) (Al-Rahman, 55: 7-9) (al-Furqan, 25:67).

Betapa tingginya penghormatan Islam terhadap kehidupan dan kelestarian sampai ada hadis yang berbunyi begini: 'Siapa yang membunuh seekor burung

---

[3]Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, juz IV, hlm. 40.

[4]Ibid., Juz VII, hlm. 226.

dengan sia-sia (tanpa maksud tertentu), burung tersebut akan mengadukan kepada Allah di hari kiamat, seraya berkata: "Wahai Tuhan, si fulan telah membunuhku dengan sia-sia dan aku dibunuh tidak dengan tujuan yang bermanfaat."[5] Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda: "Jika tiba hari kiamat dan seseorang dari engkau sedang membawa bibit kurma, hendaklah ia (segera) menanamnya."[6]

Mengenai tata kelola SDA, seorang ulama besar, al-alim allamah Wahbah Al-Zuhaily berpendapat bahwa sumber mineral haruslah dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh dimonopoli oleh orang perorang atau dikuasai pihak swasta.[7] Senada dengan apa yang dikatakan oleh Al-Zuhaily, di kalangan madzab Hambali dan Maliki memandang semua ciptaan Allah, berupa tambang, bebatuan, air, rerumputan (pada masa itu air dan padang rumput sangatlah vital untuk pakan ternak) haruslah dimiliki oleh negara.[8] Sedemikian, dalam Islam, jangankan merusak, memakai apa yang dari alam secara berlebihan saja dilarang. Bahkan para Ulama sepakat melarang menggunakan air secara berlebihan walaupun persediaan air dalam kondisi melimpah.[9] Sedemikian, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam Islam, alat produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak haruslah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam tradisi pesantren juga terdapat kaedah-kedah yang secara jelas menolak perusakan. Diantaranya:

Kaidah: لا ضرار ولا ضرار

(Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain)

Kaidah: الضرر يزال بقدر الإمكان

(Kemudharatan harus dihilangkan semampunya)

---

[5]Lih. Sahih Ibn Hibban, Juz 13 hlm. 214, No. 5894.

[6]Lih. Musnad Abd bin Hamid, Juz 1 hlm. 366.

[7]Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu, Jilid V hlm. 586.

[8]Ibid., hlm. 522.

[9]Lih. Tuhfah al-Ahfazhi, Jilid I, hlm. 30.

Kaidah: الضرر لا يزال بضرر مثله

(Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama)

Kaidah: يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى

(Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar)

Kaedah: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

(Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum)

Kaidah: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

(Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya)

Kaidah: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

(Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan)

Bagaimana dengan sikap organisasi-organisasi Islam? Di atas kertas, sebenarnya tidak sedikit putusan hukum dari organisasi Islam yang mengecam perusakan lingkungan. Di NU misalnya. Dalam putusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-29 tanggal 4 1994/1 Rajab 1415 H di Cipasung, Tasikmalaya, menetapkan mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan dlarar, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat). Demikian juga dalam putusan Bathsul Masail NU pada muktamar 33 di Jombang, telah menetapkan bahwa neoliberalisme hukumnya haram. Namun, sayangnya, putusan-putusan hukum semacam itu belum terbukti efektif karena sifatnya sekadar himbauan moral dan tidak mengikat. Sehingga, perusakan tetap berlanjut dan bahkan tidak sedikit agamawan sendiri terlibat di dalamnya.

Sungguh negeri ini seperti telah dikutuk dengan berbagai kontradiksi, anomali dan ironi. Di tengah bisingnya suara promosi dan gegap gempitanya propaganda menjadikan Islam Nusantara sebagai model Islam dunia yang hendak menyelamatkan seluruh jagat raya, anehnya para kiai justru lupa untuk menyelamatkan perusakan Alam oleh korporasi perkebunan dan tambang yang tak hanya mengakibatkan krisis ekologi akut, tapi juga menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran kemanusiaan di mana-mana.

Mereka yang gemar mengatakan Islam "menyelamatkan", justru tutup mata tutup telinga terhadap berbagai kerusakan lingkungan maupun sosial, seperti ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan oleh persekongkolan jahat kapitalisme global dan pejabat publik. Malah, sepertinya, sekarang telah merebak agamawan munafik karena sikap pragmatis dan oportunisnya dalam berpolitik. Diam-diam mereka menjadi bagian dari perusakan lingkungan ini untuk memperkaya diri sendiri. Padahal, sebagaimana kita tahu, ekspolitasi SDA secara besar-besaran di tangan kuasa segelintir borjuasi berakibat fatal bagi keberlanjutan hidup bersama. Tidak hanya manusia tapi juga seluruh jagat raya. Maka dengan ini Allah menghimbau kita:

"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikan kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanamannya dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan" (QS. Al-Baqarah 204-205).

Sebagai kaum beragama, tentu kita patut marah dan kecewa dengan kondisi ini. Karena nyaris tak ada satupun statemen resmi dari kelompok agama untuk mengutuk bencana ekologis yang terjadi di hampir tiap jengkal wilayah negeri ini. Bahkan sulit kita temukan seorang agamawan yang berada di barisan depan para pejuang lingkungan melawan berbagai penghancuran dan penguasaan atas SDA di tangan sedikit pemodal.

Dengan demikian, kita menjadi tahu bahwa kebisuan agamawan, khususnya kiai, terhadap berbagai kerusakan dan penghancuran yang terus berjalan, bukanlah dilatari oleh semangat teologis melainkan sikap politik pragmatis dan oportunisnya yang bersembunyi di balik prinsip "moderasi". Tentu juga dibimbing oleh iman enjoyment dan kalkulasi untung rugi kapitalistik. Bahkan banyak yang sembrono menerima dana-dana yang tidak jelas sumbernya atau dana korporasi perusak lingkungan dan terang-terangan mengatakan dana-dana bantuan siluman tersebut sebagai rizki "min khaitsu la yahtasib", yang berarti rizki yang tak disangka-sangka datangnya yang diberikan oleh Allah bagi orang yang bertakawa.

Selain sikap pragmatis dan oportunis dalam berpolitik, kepercayaannya pada teori trickle down effect yang berasumsi bahwa eksploitasi Alam oleh korporasi di suatu wilayah akan memberi berkah kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya, juga turut mematikan spirit pembebasan Islam. Kondisi semacam inilah yang membikin pihak korporasi dan pejabat publik—yang hakikatnya pelayan korporasi—dengan mudah membungkam tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama atau para kiai. Biasanya melalui dana-dana CSR (corporate social responsibility) yang dikucurkan oleh pihak korporasi ke berbagai tokoh, agar mereka berkenan mendukung eksploitasi Alam dengan dalih pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sampai ada yang dengan enteng dan tanpa malu berseloroh: “Belum beroperasi saja korporasi sudah membawa berkah, bagaiamana kalau sudah beroperasi?”.

Entah sepakat atau tidak. Ketika Marx menganalisis kolonialisme Inggris di India dalam artikelnya ‘Future Result of British and in Europe’ yang pertama kali terbit di New York Daily Tribune, No. 3840, 8 Agustus 1853, sebenarnya telah mengingatkan kita bahwa semua pembangunan kapitalisme di Dunia Ketiga tak lain hanya untuk menumpuk kapital borjuasi, bukan untuk menyejahterakan rakyat.[10] Melalui industri modern berbasis kereta api yang dibangun Inggris di India, memang tak bisa dipungkiri telah menjadi pelopor industri modern di India. Dengan dibangunnya rel kereta api telah memicu cabang-cabang industri lainnya dan secara tidak langsung melenyapkan pembagian kerja yang bersifat turun temurun yang merupakan fondasi dari sistem kasta di India yang selama berabad-abad telah menjadi penghambat kemajuan dan memacetkan jalannya peradaban.

Namun, bagi Marx, pembangunan rel-rel kereta api oleh kaum millocracy Inggris di India bukanlah bertujuan untuk menyejahterakan rakyat India, melainkan semata-mata agar mereka bisa mengangkut kapas dan bahan-bahan mentah lainnya dengan biaya serendah mungkin demi kepentingan industri-industri manufaktur mereka. Demikian juga sebenarnya yang terjadi dengan

[10]Marx dengan jeli dan cerdas membongkar imperialisme Inggris di India yang sekilas tampak manusiawi, yang sebenarnya hanya untuk menumpuk kapital para petualang borjuasi Inggris. Lebih lanjut lihat. David Renton (ed), Marx on Globalisation, London: Lawrence & Wishart, 2001, hlm. 90.

eksploitasi Sumber daya alam di Indonesia. Semua eksploitasi Alam di Indonesia terbukti tidak memberi manfaat pada rakyat Indonesia. Bahkan, gencarnya pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan di sepanjang pesisir selatan Jawa, bisa dibaca sebagai jalan untuk memuluskan jalannya eksploitasi ini.

Karena semua persoalan hidup telah diperhitungkan oleh kalkulasi untung rugi, saya khawatir, jangan-jangan kita (kaum beragama), yang konon katanya hamba Allah, sekarang telah bermetamorfosis menjadi hamba korporasi. Naudzubillah mindzalik.

***Tulisan ini telah diterbitkan di Indoprogres pada 26 August 2016**



Masjid Sumbu Gerakan Kemandirian Umat

Judul : Etos Kerja, Pasar, dan Masjid; Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan

Penulis : M. Luthfi Mali
Penerbit : LP3S
Cetakan : Pertama, 2013
Halaman : xv + 308 halaman
ISBN : 978-602-7984-00-4
Resensator : Fadli Rais

Masjid menjadi titik tolak membangun mental berdikari oleh sub-etnis Gu-Lakudo. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat ibadah dalam tataran normatif-teologis. Institusi agama dijadikan sebagai simbol mengajak umat Islam mandiri secara ekonomi melalui aktivitas koperasi dan perdagangan. Peran itu dikenalkan oleh Kiai Haji Abdul Syukur dan Muhammad Asy'ari.

Masyarakat Gu-Lakudo yang terletak di pesisir Teluk Lasongko Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, mengkontruksi hubungan sosial masyarakat di masjid (institusi agama) dan pasar (institusi ekonomi) tak hanya sebagai transaksi jual-beli semata sebagaimana bangunan ekonomi konvensional terhadap pasar. Justru negosiasi sosial antara struktur pasar bernama penjual dan pembeli, dijadikan proses interaksi antara individu yang saling membutuhkan.

Ahmad Luthfi Hakim dalam karya Etos Kerja, Pasar dan Masjid; Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan menemukan satu pemahaman

terkait pengembangan pemikiran sosial-keagamaan yang diarahkan guna meningkatkan realitas. Ajaran agama yang notabene teridiri dari teks-teks belaka dapat dikontektualisasikan secara praksis dalam sosial kemasyarakatan. Komunitas Gu-Lakudo tidak membedakan institusi duniawi dan ukhrawi, melainkan keduanya integral untuk membangun mental warga sekitar.

Masjid saat masa Rasulullah tidak hanya sebagai tempat ibadah melainkan memainkan salah satu pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Masjid Kuba dijadikan tempat beribadah sekaligus bersosial agar memudahkan interaksi dan menjadi sumbu pertemuan di antara kabilah satu dengan kabilah lainnya.

Semangat memberdayakan masjid sebagai institusi agama di masa Rasulullah dikontekstualisasikan pada zaman sekarang. Masyarakat yang terdiri dari berbagai struktur sosial pasca melalukan ibadah melakukan kontak sosial guna membicarakan problem keummatan.

Bagaimana proses transformasi sosial orang Gu-Lakudo dari era ke era ? Peran ulama bernama H. Abdul Syukur yang menjadi lilin pembaharuan daerah tersebut. Meski pada 1970 di awal kedatangannya ditentang namun praksis ajaran-ajaran Islam sebagai nilai sosial dan merekonstruksi fungsi masjid sebagai institusi sosial sejalan dengan implementasi kemandirian umat dalam kehidupan nyata.

"Agensi sosial " dalam ilmu sosial dipersepsikan sebagai individu yang mampu mentransformasikan nilai-nilai yang diikuti oleh masyrakat ke pengembangan sosial-ekonomi. H. Abdul Syukur dan M. Asy'ari di sub etnis Gu-Lakudo berperan sebagai agensi sosial sekaligus ulama setempat. Ia tak hanya berperan sebagai "saleh pasif" melainkan "saleh aktif" untuk mengentaskan keterpurukan ekonomi setempat.

Cerita tersebut dituturkan oleh warga setempat kepada peneliti terkait peranan H. Abdul Syukur sebagai pengajar agam sekaligus "babad alas" di daerah Gu-Lakudo. Notabene daerah gersang dan tidak bersahabat untuk memaksimalkan potensi ekonomi untuk dijadikan sumber kehidupan sehari-hari. Pilihan untuk menjadi "perantau" di daerah Wakatobi dan bersentuhan dengan Etnis Bugis dan Tionghoa yang sudah mapan terlebih dahulu

Kedatangan Abdul Syukur untuk menetap tinggal di daerah orang Gu-lakudo dapat dikatakan membawa perubahan cukup mendasar terhadap kehidupan sosial-ekonomi mereka dari konteks ekonomi subsisten[1] di pedesaan beralih ke ekonomi pasar di perkotaan. Abdul Syukur tidak hanya mengubah orentasi dan tradisi keagamaan mereka, tetapi juga menggerakkan potensi sumber daya ekonomi masyarakat. Dia memotivasi nelayan tradisional memaksimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan melalui penangkapan ikan diawali dengan proses internalisasi pengetahuan tentang pengeloaan sumber daya ekonomi secara rasional dan kelembagaan, kemudian menumbuhkan etos ekonomi mereka untuk mengembangkan perdagangan. Motivasi orang Gu-Lakudo berkiprah di dunia perdagangan diawali dari pengembangan usaha hasil tangkapan ikan yang diperdagangkan bersama Abdul Syukur. Demikian memberi kesempatan luas karena mereka mengembangkan perdagangan desa-kota, antar kota dan antar pulau yang memungkinkan berkat jaringan hubungan kelautan yang terbuka lebar sejak kerajaan-kerajaan maritim Nusantara. (hal. 72).

Konsep sosial-religius yang diterbarkan oleh Kyai Abdul Syukur, bahwa umat muslim memanifestasikan ibadah melalui kemandirian ekonomi. Dalam melawan arus ekonomi konvensional yang bertumpu pada untung-rugi guna kebutuhan material saja, umat Muslim harus mendirikan ekonomi subsisten yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat sekitar.

Pandangan luasnya bahwa harta tidak saja bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pemenuhan rukun Islam dan Iman, melainkan membangun masjid sebagai institusi agama. Masjid akan memudahkan distribusi harta kekayaan melalui zakat serta dalam kacamata sosial akan memperkecil ketimpangan struktur ekonomi di masyarakat.

Dalam perjanalan bangsa ini, ulama yang turun basis dan memberdayakan masyarakat sudah banyak tersohor dengan pendekatan praksis guna mengimplementasikan pemikiran keagamaan. Gerakan transformatif dalam

[1]Ekonomi subsisten adalah produksi ekonomi yang orientasinya mendorong pemenuhan kebutuhan dan kepentingan sosial masyarakat, bukan individu.

rangka memecahkan masalah nyata di kalangan akar rumput agar ajaran-ajaran agama tidak berhenti pada teks-teks belaka. Persemaian ajaran melalui praksis inilah yang akan mengedepankan kemaslahatan umat.

Kyai Haji Abdul Syukur di tingkat lokal sama seperti para pendahulunya, HOS Tjokroaminoto, Agus Salim, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, dan Mohammad Natsir. Mereka mengejawantahkan pada masyarakat sekitar untuk mendorong progresifitas ekonomi, politik, dan budaya. Sisi "ideologis keagamaan" mereka sangat universal bahwa Islam memiliki visi subtansial-universal terhadap setiap upaya perbaikan kehidupan masyarakat, khususnya bagi kaum Muslim di Nusantara.

Seorang intelektual atau rausyanfikr memiliki ideologi yang konsisten terpatri dalam dirinya untuk mendobrak status quo dan mengubah ketimpangan struktur masyarakat. Dalam perspektif humanisasi Islam. Kedua kutub tersebut terkait dengan tujuan penciptaan manusia untuk berperan sebagai khalifah Tuhan di muka bumi yang secara evolusioner dan dialektis terus-menerus berproses sepanjang zaman. (hal. 114).

Koperasi Gu Makmur menjadi buah awal Kyai Haji Abdul Syukur dalam melibatkan masyarakat Gu-Lakudo untuk simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi nelayan. Proses peminjamannya berupa tangkapan sehari-hari disetarakan dengan nilai tukar uang. Istilah "barter" sesuai dengan kebutuhan nelayan setempat pasca mendapatkan hasill laut.

Sebagaimana koperasi pemberdayaan masyarakat, Kyai Haji Syukur juga memberikan wawasan baru kepada masyarakat Gu-Lakudo akan potensi alam dikelola lebih rasional sesuai dengan ajaran agama Islam. Buah pembelajaran tidak hanya menempatkan seseorang sebagai guru dari segala hal, melainkan inspirator untuk mengangkat masyarakat agar mandiri.

Peneliti menggambarkan Kyai Abdul Syukur sebagai pendobrak tradisi di Gu-Lakudo mendapatkan simpati karena pendekatan yang humanis ketimbang profokatif. Contoh nyatanya, ia tidak hanya menyingkirkan pemabuk melainkan mengajak bicara sekaligus memberi problem solving atas permasalahan, mengapa ia bisa terjerumus pada perilaku demikian. Egalitarian ia letakkan

guna pro-aktif terhadap permasalahan setempat agar amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya ditumpas.

Pasca Urban

Jiwa urban sub etnis Gu-Lakudo tidak dibarengi dengan pengetahuan yang luas. Geografis sosial-ekonomi tandu dan berbatu kapur tidak mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan. Kegiatan sehar-hari dari menangkap ikan di laut. Alam bicara berbeda, sumber daya alam laut mengalami penurunan secara drastis yang berimbas pada penghasilan nelayan setempat.

Urbanisasi menjadi pilihan bagi orang Gu-Lakudo. Tanpa ada jaminan mereka bisa berinovasi guna membuat akses usaha. Gerak spontan ini justru tidak bisa mengandung motif ekonomi yang kuat karena tak ditopang oleh semangat wirausaha memadai. Justru menambah kehidupan yang menyesakkan orang-orang Gu-Lakudo di daerah rantau.

Kelompok-kelompok gerak spontan masyarakat ketika melakukan migrasi ke daerah lain. Pertama, informasi tentang pentingnya perolehan nilai kemanfaatan ekonomi yang mendorong mereka pergi merantau. Kedua, terbentuknya jaringan migrasi di daerah tujuan yang dibangun oleh para migran sebelumnya (misalnya, jalinan relasi kerja atau terbukanya peluang usaha perdagangan. Ketiga, kian membaiknya sarana dan prasana transportasi darat laut yang memudahkan masyarakat lapis bawah melakukan ke daerah lain. (hal. 193).

Pasca melalui tahapan-tahapan gerak spontan kaum urban, orang Gu-Lakudo mampu mengimbangi dominasi pedagang Tionghoa dan Bugis-Makassar melalui relasi sosial ekonomi subsisten yang ditanamkan dan ditransformasikan oleh Kyai Haji Abdul Syukur.

Pola dan strategi adaptasi orang Gu-lakudo yang disarankan oleh Kyai Haji Abdul Syukur meninggalkan kampung halaman untuk memperbaiki kondisi hidup melalui tranfsormasi ekonomi tradisional (subsisten) ke ekonomi pasar (modern).

Ada tiga hal yang menyebabkan orang Gu-Lakudo yang berhasil mengarungi ekspansi ke kota yakni struktur fisik, persaingan dalam usaha perdagangan, dan

terbukanya peluang mengembangkan usaha dagang di kota lain. (hal. 235).

Kota Bau-Bau dipilih menjadi pelabuhan orang Gu-Lakudo untuk bergerak secara sosial dan dinamis dan adaptif bagi orang setempat. Di pusat kota Bau-Bau terdapat institusi –pasar dan masjid- yang dijadikan simbol aktivitas sehari-hari perdagangan kaum Muslim. Masjid Tomba, Masjid Bataraguru, Masjid Raya satu kawasan dengan Pasar La Elangi, Nugraha dan Mal Umna Rijoli di Kota Bau-Bau.

Integrasi kaum Gu-Lakudo sebagai kaum urban diimplementasikan dalam ruang fisik permukiman yang mencitrakan hubungan antara mereka dengan etnis lain. Aktivitas pasar justru mereka ekspresikan dalam proses interaksi sosial yang berlangsung intens secara internal dan eksternal. Dalam nilai-nilai agama terejawantahkan dalam sholat berjamah di masjid untuk merekatkan nilai-nilai sosial yang membantu eksistensi dalam mengembangkan usaha dan perdagangan.

Lagi-lagi tranformasi ala Kyai Haji Abdul Syukur yang mendorong integrasi masyarakat (instituisi sosial), pasar (institusi ekonomi), dan masjid (institusi agama). Tiga faktor itu tidak bisa didikotomikan satu sama lain karena memberikan efek positif pada masyarakat Gu-Lakudo dalam implementasi keseharian dalam membangun kemandirian umat melalui ekonomi.

Proses urban masyarakat Gu-Lakudo pasca 1970 memberikan dampak pada perekenomian masyarakat. Ketergantungan terhadap penghasilan laut yang kala degradasi sumber daya alam dapat teratasi berkat tangan dingin Kyai Haji Syukur.

Penelitian doktoral M Luthfi Malik memperkaya kajian sosio-ekonomi masyarakat di Indonesia. Kekhasan studi sosio-ekonomi pada organisasi sosial perdagangan yang berlandaskan ikatan keluarga, perkembangan posisi, teknologi sosial yang terbuka sehingga dapat bekerjasama dengan etnis lain. Masyarakat Gu-Lakudo berhasil menghilangkan ketegangan antara ajaran sosial dan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi keummatan.

Ilmuwan sosial non Indonesia yang pernah meneliti perkembangan sosial Indonesia adalah Cliford Geertz, Lance Castle, dan Mitsuo Nakamura.

Cliford Gertz dalam karyanya Agama Jawa ; Abangan, Santri, Priyayi menerangkan pemuka komunitas usaha ekonomi perdagangan (tembakau, tekstisl, dan pertokoan di Mojokerto berasal dari kaum muslim "reformis-puritan". Reformasi Islam berwujud ajaran puritan yang mayoritas para saudagar. Penjaga gawangnya aadalah santri sebagai "reformis-modernis" membentuk etos ekonomi berupa kewirausahaan Islam.

Sedangkan Lance Castle dalam karya Tingkah Laku Agama, Politik, Ekonomi di Jawa; Industri Rokok Kudus dan Mitsuo Nakamura dalam karyanya Bulan Sabit Di Atas Pohon Beringin; Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah 1910-2010 menganggap muslim modernis di Kudus dan Yogyakarta sukses dalam mendirikan suatu usaha. Mereka menjadi pemilik, pemasok tembakau untuk perusahaan besar di Kudus. Di Kota Gede santri Muhammadiyah memiliki basis kekuatan pengembangan ekonomi modern. Namun, model kewirausahaan individual justru tidak mampu menghadapi pengusaha Tionghoa yang responsif menghadapi zaman. Ia membangun usaha keluarga juga mengembangkan institusi itu sendiri.

Perbedaan studi Lance Castle, Mitso Nakamura dengan M. Lutfhi Malik adalah komunalitas dalam membangun wirausaha. Masyarakat Gu-Lakudo tidak hanya bergantung pada figur secara praksis karena mereka menerapkan sistem "magang" di tempat saudara yang kemudian diberi modal untuk mendirikan bukan dipekerjakan. Kyai Haji Abdul Syukur hanya "agensi" secara konsep dan memancing untuk masyarakat untuk memberikan stimulan kepada warga sekitar.

Dalam persaingan dengan Tioghoa dan Bugis tidak menjadi "vis a vis" melainkan integratif karena komunalitas yang digunakan oleh kelompok Gu-Lakudo ekonomi subsisten meskipun yang mampu masuk alam persaingan modern.

Sedangkan karya M. Lutfhi Hakim merasionalisasikan konsep yang ditawarkan Rochman Achwan dalam karya Orang Boyan Bawean; Perubahan Lokal dalam Transformasi Global, yang menggambarkan bahwa orang Bawean diperantauan menggunakan model migrasi tidak spontan karen sudah terdapat

jaringan sehingga ada kalkulasi pasca selesai merantau. Pun begitu Gu-Lakudo yang membawa semangat untuk mengurangi ketegangan melalui proses negosiasi sosial di institusi agama (masjid) sekaligus memupuk semangat kemandirian umat lewat implementasi teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang di ajarkan Kyai Haji Abdul Syukur dan M. Asy'ari.

Karya M. Luthfi Hakim ini bisa dinikmati untuk mengembangkan perekonomian bagi kemandirian umat. Namun dalam karyanya tidak banyak mengeksplorasi kegiatan Koperasi Gu Makmur yang hanya berdampak pada rasionalitas penduduk yang belum pernah didirikan. Seharusnya dalam penelitian ini memberikan satu perspektif jalinan masjid dan koperasi yang notabene menjadi tumpuan masyarakat akar rumput. Dan berpengaruh secara masif dan sistematis.

Membaca karya ini dan melakukan penelitian lanjutan adalah kerja-kerja konkrit membeberkan wacana baru.

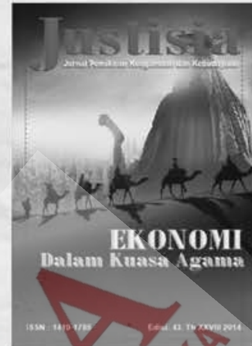
Jurnals Gallery



Jurnal Edisi 41 Th. XXVI 2014



Jurnal Edisi 42 Th. XXVII 2014



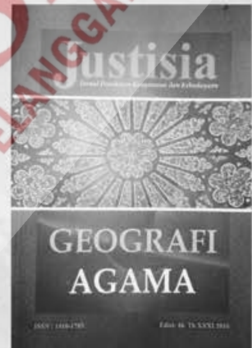
Jurnal Edisi 43 Th. XXVIII 2014



Jurnal Edisi 44 Th. XXXI 2015



Jurnal Edisi 45 Th. XXX 2015



Jurnal Edisi 46 Th. XXXI 2016



Jurnal Edisi 47 Th. XXXII 2016



Jurnal Edisi 48 Th. XXXII 2017



Jurnal Edisi 49 Th. XXXII 2017

Jurnal-jurnal yang terdapat pada galeri ini dapat dipesan melalui bagian sirkulasi LPM Justisia CP. **085-747-155-948** (Jaedin), atau datang langsung ke kantor Redaksi: Gedung Student Center Fakultas Syariah dan Hukum Kampus III UIN Walisongo Semarang Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan, Semarang 50185, Email : lpm_justisia@yahoo.com



Teo ekologi

Bumi mempunyai keterbatasan sebagaimana manusia, karena itu bumi harus dihargai bernilai pada dirinya sendiri. Etika ini perlu diperluas, tidak sebatas pada bumi belaka, bicara bumi itu berarti bicara sesuatu yang berada di atas bumi. Tanah, air, tumbuhan, hewan dan segala makhluk ciptaan Tuhanlainnya.

Akibat akhlak yang buruk terhadap lingkungan, dapat disaksikan dengan jelas bagaimana hutan dieksploitasi tanpa batas kemudian melahirkan malapetaka kebakaran hutan, yang mengakibatkan kerusakan pada hutan dan habitat hewan. Begitu juga eksploitasi kekayaan laut, bila tanpa memperhitungkan kelestarian ekologi laut melahirkan kerusakan hebat pada ekosistem laut. Tentu dari segala bentuk ekploitasi tanpa menilai batas pengerukannya apalagi sampai dilandasi dengan kebijakan negara yang sifatnya sementara akan melahirkan bencana parah yang tidak bisa ditangani, jika hal tersebut tidak segera dihentikan. Tidak hanya generasi saat ini yang merasakan akibatnya, generasi berikutnya pun menanggung beban amat memilukan.

Diterbitkan Oleh:



JUSTISIA
UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN

Lembaga Penerbitana Mahasiswa (LPM) Justisia
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang Jl. Raya Prof. Dr. Hamka KM. 2 Ngaliyan Semarang